

KODE/NAMA RUMPUN ILMU: 612/SOSIOLOGI

**LAPORAN
PENELITIAN DISERTASI DOKTOR**

**PRAKTIK SOSIAL DAN REPRODUKSI KEKERASAN PELAJAR
DI SMA KOTA YOGYAKARTA**



**disusun oleh:
ARIEFA EFLANINGRUM
NIDN. 0011047403**

**Dibiayai oleh DIPA Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat
Nomor DIPA - 023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014, DIPA Revisi 01 tanggal
03 Maret 2015. Skim Penelitian Disertasi Doktor Tahun Anggaran 2015
Nomor: 062/SP2H/PL/DIT.LITABMAS/II/2015 Tanggal 5 Februari 2015**

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2015**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Praktik Sosial dan Reproduksi Kekerasan Pelajar di SMA
Kota Yogyakarta

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap	: ARIEFA EFIANINGRUM
Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Yogyakarta
NIDN	: 0011047403
Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
Program Studi	: Kebijakan Pendidikan
Nomor HP	: 087836092364
Alamat surel (e-mail)	: efianningrum@gmail.com
Institusi Mitra (jika ada)	: -
Nama Institusi Mitra	: -
Alamat	: -
Penanggung Jawab	: -
Tahun Pelaksanaan	: Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun
Biaya Tahun Berjalan	: Rp 45.000.000,00
Biaya Keseluruhan	: Rp 0,00

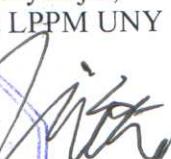
Mengetahui,
Dekan FIP UNY

(Dr. HARYANTO, M.Pd.)
NIP/NIK 196009021987021001

Yogyakarta, 9 - 11 - 2015
Ketua,

(ARIEFA EFIANINGRUM)
NIP/NIK 197404111998022001

Menyetujui,
Ketua LPPM UNY

(Prof. Dr. ANIK GUFRON, M.Pd.)
NIP/NIK 19621111198803001


DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
Abstrak.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Tinjauan Pustaka.....	15
E. Kajian Teori.....	22
F. Metode Penelitian.....	63
BAB II DINAMIKA PERSEKOLAHAN DI KOTA YOGYAKARTA.....	69
A. Persekolahan dalam Konteks Transformasi Yogyakarta.....	69
B. Strategi Pencegahan dan Penanganan Masalah Pelajar.....	73
C. Profil Sekolah.....	87
D. Hasil Penelitian di 2 Sekolah.....	109
BAB III PRAKTIK SOSIAL KEKERASAN DI SEKOLAH.....	115
A. Realitas Kekerasan	115
B. Kekerasan di Sekolah: Melintas Aktor.....	118
C. Habitus Kekerasan: dari yang Halus hingga yang Agresif/Brutal.....	122
D. Kekerasan dalam Perspektif Kebijakan: Sebuah Mekanisme Kontrol dan Pendisiplinan	124
BAB IV REPRODUKSI KEKERASAN PELAJAR.....	128
A. Pola Reproduksi Kekerasan.....	128
BAB V PENUTUP.....	139
A. Kesimpulan.....	139
DAFTAR PUSTAKA	140

SOCIAL PRACTICES AND REPRODUCTION OF VIOLENCE AMONG SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN YOGYAKARTA

Ariefa Efianingrum

Faculty of Education, Yogyakarta State University
email: efianingrum@gmail.com, efianingrum@uny.ac.id

Abstract

This study aimed at describing the dynamics of social practice and exploring the process of the reproduction of violence among students. Violence needs to be well understood as a network between the actor and the structure. Through figuring out the core of the problems and the dynamics of violence among students, it can be determined the right and effective strategy to overcome and prevent the recurrence of the violence.

This research used interpretive/qualitative approach to find out the meaning and intentionality of the action of the actor. This method required the researcher to do a careful analysis in order to gain detailed qualitative data so that a deep understanding on the subjects. This research was conducted in two high schools in Yogyakarta.

The practices of violent of high school students have been linked with student habits on the wider environment. The practices of students' violence at school area is a representation of violence in the family, peer group, and society. It's also an expression of cultural capital's ownership in the form of violent values that are understood and internalized within the students becomes violence habits. Violent students develop distinction as a strategy to distinguish themselves with the other group's identity. Schools can be considered as a place which reproduces violence, if it fails in breaking down the tensions experienced by students. In the context of power relations, students actually not only relating and negotiating with school authorities or with their parents, but also dealing and negotiating with their fellow students.

Keywords: *social practices, reproduction, students violence, school*

PRAKTIK SOSIAL DAN REPRODUKSI KEKERASAN PELAJAR
DI SMA KOTA YOGYAKARTA
Oleh: AriefaEfianingrum

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika praktik sosial dan menggali proses berlangsungnya reproduksi kekerasan pelajar. Kekerasan perlu dipahami sebagai jejaring antara aktor dan struktur. Dengan memahami akar permasalahan dan dinamika kekerasan pelajar, maka dapat ditentukan strategi yang tepat dan efektif untuk mengatasi dan mencegah terulangnya kembali kekerasan pelajar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretif/kualitatif dengan metode eksploratif untuk menggali dan menemukan makna tindakan aktor. Metode ini menuntut peneliti untuk melakukan kajian yang cermat, guna mendapatkan data kualitatif yang detail sehingga tercapai pemahaman mendalam tentang subjek kajiannya.

Praktik kekerasan pelajar SMA merupakan amatan panjang yang memiliki keterkaitan dengan habitus pelajar pada jenjang sekolah sebelumnya (SMP), sekolah lama (jika pelajar pindahan), dan habitus yang dibawa dari lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulannya. Praktik kekerasan pelajar yang hadir dalam arena persekolahan dengan demikian merupakan representasi kontestasi kekerasan yang terjadi pada lingkungan lain. Dengan kata lain, kekerasan yang hadir dalam praktik sosial kehidupan masyarakat menjalar hingga ke dalam praktik pendidikan di sekolah. Hal tersebut merupakan realitas yang tak terelakkan terjadi di sekolah. Praktik kekerasan pelajar hadir dalam arena persekolahan juga merupakan ekspresi kepemilikan modal cultural (*cultural capital*) berupa nilai-nilai kekerasan yang dihayati dan terinternalisasi dalam diri pelajar menjadi habitus kekerasan. Pelajar pelaku kekerasan mengembangkan strategi distingsi untuk membedakan identitas mereka dengan kelompok lain, misalnya melalui penampilan dan keberanian. Sekolah dapat dikatakan sebagai arena reproduksi kekerasan, jika gagal dalam mengurai ketegangan-ketegangan yang dialami oleh pelajar. Dalam konteks relasi kuasa, pelajar sesungguhnya tidak hanya sedang berelasi dengan pihak penguasa sekolah atau dengan orang tua mereka, melainkan juga berhadapan dan bernegosiasi dengan sesama pelajar.

Kata Kunci: praktik sosial, reproduksi, kekerasan pelajar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah sejatinya merupakan wahana pengembangan intelektualitas, ruang hidup bagi potensi/bakat, tempat bersemainya nilai-nilai humanis sekaligus berlangsungnya proses pembudayaan dalam menyiapkan generasi penerus bangsa. Para orang tua mempercayakan diri anak mereka sepenuhnya kepada sekolah untuk memekarkan multi kecerdasan dalam dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Idealnya tiga ranah tersebut tumbuh dalam satu tubuh (diri pelajar), namun dalam praktiknya menjadi terpisah-pisah karena pendidikan di sekolah menegasikannya dengan lebih menitikberatkan pada pengembangan aspek kecerdasan kognitif yang abai pada pengembangan karakter, kreativitas, dan kecerdasan sosial. Di sisi lain, sekolah juga menjadi entitas di mana norma pendisiplinan bagi pelajar berlangsung. Tata tertib sekolah diberlakukan melalui serangkaian aturan dan seperangkat mekanisme kontrol sosial melalui sistem poin maupun arsitektur pengawasan, seperti tembok-tebok tinggi, pagar besi, CCTV, dan beraneka sanksi/*punishment*. Mewadagnya inovasi arsitektural tersebut menjadi bagian yang tak terceraikan dari kekuasaan dan praktik pendisiplinan oleh sekolah. Dalam kondisi demikian, efek panoptik kian mewarnai suasana batin para pelajar, karena mereka merasakan terjadinya pengawasan terhadap diri. Pengawasan yang diinternalisasi tersebut menyebabkan pelajar memiliki oto-sensor dan menjadi semacam masyarakat terawasi.

Sekolah perlu dipahami bukan semata-mata sebagai arena belajar yang ditandai oleh hadirnya ruang fisik berupa gedung bertembok dan berpagar tinggi. Sekolah juga tidak sekedar terdiri dari ruang-ruang kelas yang tersekat-sekat sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran dan transfer pengetahuan. Namun, sekolah perlu dibaca sebagai entitas keruangan yang cair dan dinamis, dalam pengertian sebagai atmosfer (*circumstance*) yang di dalamnya terdapat proses relasional sekaligus kontestasi beraneka nilai (*values*) dan kultur (*habitus*) yang berasal dari sekolah maupun yang dibawa oleh setiap warganya ke sekolah. Sekolah mestinya tidak semata-mata membuka akses/kesempatan pendidikan, tetapi memberi ruang belajar bagi siswa-siswanya untuk memahami kehidupan sesungguhnya. Sekolah merupakan arena yang tidak dapat

dipisahkan dari institusi lainnya seperti: keluarga, *peer group*, masyarakat, dan media publik. Para pelajar mengalami relasi sosial tanpa batas khususnya dalam masyarakat *online*. Realitas di sekolah seringkali juga merepresentasikan realitas sosial yang terjadi pada masyarakat luas, termasuk di dalamnya fenomena kekerasan.

Kekerasan yang hadir dalam praktik sosial kehidupan masyarakat menjalar hingga ke dalam praktik pendidikan di sekola. Hal tersebut merupakan realitas yang tak terelakkan terjadi di sekolah. Dalam perkembangannya, pendidikan diharapkan menjadi agen inspirator bagi perubahan konstruktif dalam kehidupan. Awal mula persoalan yang muncul dalam proses pendidikan ialah adanya praktik hukuman yang terkadang berlebihan, mengurung kebebasan, kurang memandirikan, sehingga tidak menumbuhkan kreativitas dan kesadaran siswa. Selanjutnya, berlangsung proses imitasi/peniruan ketika pelajar mewarisi kultur kekerasan dari kakak-kakak kelasnya (Septi Gumiandari, 2009). Bahkan kekerasan tidak hanya diproduksi, melainkan senantiasa mengalami reproduksi dalam kehidupan sosial pelajar saat ini. Tradisi/ritus dan habitat/situs yang tetap diawetkan, membuka ruang bagi terjadinya reproduksi kekerasan. Di sisi lain kekerasan selalu diperbaharui oleh aktor-aktor baru seiring dengan fase zaman transformatif dan terus bergerak (Okamoto & Rozaki, 2006). Gumpalan kekerasan di sekolah kemudian menyublim dalam aneka bentuk aktivitas dan pelaku. Sekolah sebagai institusi, guru, maupun pelajar dapat berpotensi sebagai aktor sekaligus korban kekerasan, mulai dari kekerasan yang paling halus dan lembut hingga kekerasan yang agresif dan brutal. Dalam konteks pelajar, kekerasan dapat bersifat individual maupun kolektif (kerasan oleh geng sekolah). Terjadinya kekerasan oleh pelajar juga kian menguatkan bahwa sekolah tak ayal menjadi arena tempat berlangsungnya praktik sosial kekerasan sehingga berlangsung terus menerus dan selalu terulang bagaikan siklus yang tak kunjung terputus.

Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti: konteks budaya, ketetanggaan, keluarga, sekolah, dan gender. Hal ini menjadi perhatian serius di tingkat nasional bahkan internasional, dan oleh karenanya menuntut perhatian orang tua, pendidik, dan pengambil kebijakan pendidikan. Dalam realitasnya, kehidupan pelajar saat ini kian sarat dan akrab dengan budaya kekerasan. Hal tersebut tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah di Indonesia, namun juga ditemukan di sekolah-sekolah di banyak negara, tentunya dalam konteks sosio-kultural yang berbeda. Kekerasan pelajar sesungguhnya merupakan

bagian dari realitas kekerasan pemuda (*youth violence*) yang terjadi di sekolah (Benbenishty & Astor, 2005; Denmark et.all, 2005).

Selain konteks yang tersaji di atas, konten dan *exposure* (pajanan) media publik yang kian memadat di layar datar juga dapat menjadi preferensi baru bagi remaja (pelajar) dalam mengkonstruksi makna sekaligus sebagai rujukan untuk bertindak kekerasan. Kekerasan semakin sarat dan melekat dalam konten media yang beragam. Dalam arti representatif, isi media seringkali paralel dengan realitas dalam kehidupan sosial. Namun, adanya referensi media juga dapat menstimulasi kekerasan sebagai model/*prototype*, tentang bagaimana sosok "superhero, janggo" dikonstruksikan dan disimulasikan sehingga menginspirasi orang untuk bertindak secara berbeda (*different/distinct*). Media bahkan telah menjadi bagian dari pembentukan habitus seseorang, selain keluarga dan teman sebaya (*peer group*).

Kekerasan tidak saja ditemukan dalam konten media, tetapi juga hadir secara riil dalam praktik kehidupan sosial dalam masyarakat, dimana kelompok-kelompok kekerasan hadir di berbagai ruang dalam masyarakat. Supriyanto Adi (2009) menjelaskan bahwa pasca keruntuhannya rezim Orde Baru telah terjadi kemunduran Negara (*retreat of the state*) dalam bidang keamanan, yang berawal dari situasi jaringan bisnis dan politik keamanan. Perkembangan selanjutnya ditandai oleh menjamurnya berbagai agen dan broker keamanan dengan beragam pola relasi, klik, patronase, serta kompensasi politik dan ekonomi di antara aktor-aktor Negara (*state apparatus*) maupun organisasi-organisasi non negara. Kelompok-kelompok keamanan dan kekerasan yang justru dirawat dan diawetkan oleh para elit politik itu beranggotakan pemuda termasuk pelajar. Kelompok-kelompok tersebut juga sering *memback-up* kalau terjadi tawuran pelajar.

Sejumlah fakta menunjukkan bahwa kekerasan kian menyeruak dan telah lekat (*embedded*) di sekolah. Dalam konteks kurikulum, perubahan kurikulum pendidikan tidak juga menyurutkan terjadinya kekerasan oleh pelajar. Barangkali ruang sekolah yang semakin pengap dan sesak, dapat menjadi salah satu penjelas mengapa relasi yang kondusif dan komunikasi dialogis tidak memperoleh kesempatan terjadi di sekolah. Dalam menjelaskan realitas kekerasan pelajar, tidak bisa mengabaikan sambungan antara reproduksi kultural yang hidup dan bersemayam di balik praktik-praktik sosial di media, habitus dalam keluarga, dan konteks sosio-kultur masyarakat. Kekerasan pelajar di sekolah

bisa jadi merupakan reproduksi kontestasi kekerasan yang terjadi dalam lingkungan sosial lainnya. Hal tersebut terus menemukan konteks dan momentum, sehingga kekerasan pelajar menjadi realitas menyejarah dan tidak berwajah tunggal. Kekerasan lahir sebagai representasi relasi kuasa di keluarga, sekolah, masyarakat, dan media. Ekspresi kekerasan oleh pelajar di sekolah, dapat dimaknai sebagai proses reproduksi kontestasi kekerasan yang terjadi pada institusi-institusi lainnya.

Spirit pendidikan sesungguhnya adalah *enlightenment/pencerahan*, yaitu pembebasan manusia dari kondisi ketertindasan dan ketidakadilan. Yang perlu dikaji, dalam struktur masyarakat seperti apakah filsafat pembebasan itu bisa hidup. Pembebasan tidak selalu identik dengan liberalisme, tetapi juga berarti memanusiakan manusia sebagai subjek pendidikan dalam makna deliberatif. Eksistensi pelajar menjadi ada ketika dirinya berposisi subjek. Secara sosiologis perlu dijelaskan, kapan, bagaimana, dan mengapa dirinya (pelajar) sebagai penafsir, pemakna, ataupun pelaku menjadi hilang. Penjelasannya tidak dapat bersifat instrumental dan regulatif, tetapi menyentuh konsep makna. Makna subjek sebagai penafsir menjadi hilang oleh proyek modernisasi, kapitalisme, dan pemeliharaan feudalisme. Imaginasi tentang *civilizing/keberadaban* itu menjadi hilang karena di dalam diri pelajar tidak tersedia ruang untuk mengekspresikan diri sebagai subjek penafsir. Itulah yang menyebabkan potensi kritis daya nalar mereka seolah direpresi, dihambat, dan disumbat. Jangan-jangan kekerasan pelajar terjadi karena sistem pendidikan ada, tetapi tidak memberikan ruang belajar. Ada sekolah, ada pendidikan, tetapi tidak tersedia arena belajar, sebagai wahana ekspresi untuk mengenali segala sesuatu dalam kehidupannya. Sekolah idealnya membuka ruang untuk pilihan (*choice*) berdasarkan potensi yang dimiliki pelajar.

Kekerasan pelajar dalam berbagai konteks senantiasa mengalami peningkatan kuantitas bahkan kualitas. Dalam konteks nasional, Jakarta merupakan salah satu kota dengan tingkat dan intensitas kekerasan pelajar yang tinggi. Komnas Perlindungan Anak merilis jumlah tawuran pelajar pada tahun 2011 sebanyak 339 kasus dengan korban jiwa sebanyak 82 orang. Tahun sebelumnya, 2010 jumlah tawuran antar-pelajar sebanyak 128 kasus. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa pengaduan kekerasan kepada anak sebanyak 107 kasus, dengan bentuk kekerasan seperti

kekerasan fisik, kekerasan psikis, pembunuhan, dan penganiayaan (<http://edukasi.kompas.com/read/2011/12/23/10210953/tawuran>).

Data SNPK (Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan) juga menunjukkan bahwa sepanjang Januari-April 2013 tawuran pelajar tetap marak terjadi di wilayah pantauan SNPK. Kekerasan pelajar ini paling sering terjadi di wilayah Jabodetabek (58%), yang pada periode tersebut tercatat 28 insiden dan menyebabkan dua tewas serta 30 cedera. Kekerasan pelajar paling sering terjadi dalam bentuk tawuran sebesar (64%). Jika melihat masih maraknya kekerasan pelajar, maka patut dicermati efektivitas penanganan yang telah dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pendidikan setempat (Kajian Perdamaian dan Kebijakan *The Habibie Center*, edisi 04/Augustus 2013). Sumber-sumber yang lain menyebutkan data tawuran pelajar yang tidak kalah memprihatinkannya.

Data Tawuran Pelajar

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2011-2014

Tahun	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Kasus	20	71	52	36	179

Sumber: KPAI Bidang Data Informasi dan Pengaduan 2014

Selain Jakarta dan Bandung, pelajar di Yogyakarta juga mereproduksi tawuran antar geng sekolah. Tawuran tersebut merupakan implikasi dari adanya sentimen kolektif antar sekolah karena narasi sejarah dan kesan permusuhan masa lalu yang disosialisasikan terus menerus dari angkatan lama kepada angkatan baru. Aksi kekerasan pelajar yang terjadi semakin membuat miris. Mereka tidak bergerak sendirian (individual), melainkan melakukan kekerasan secara kolektif dengan jumlah yang bervariasi. Oleh karenanya, tafsir atau analisisnya tidak semata-mata bersifat psikologis, melainkan juga pada level kolektif, institusional, dan sistemik. Selain berupa tawuran pelajar, kekerasan pelajar seringkali juga berupa penggeroyokan. Dalam suatu pemberitaan, disebutkan kasus seorang pelajar meninggal karena dikeroyok oleh belasan pelajar. Yang merisaukan, motif penggeroyokan tidak jelas, bahkan tanpa target (KR, Sabtu Kliwon, 18 Oktober 2014, hal. 16). Dari kejadian ini dapat direfleksikan bahwa melumpuhkan lawan dengan cara memukul, melukai, dan menyakiti lawan hingga babak belur merupakan hal yang biasa. Dalam

kondisi demikian, nampak kiranya bahwa kekerasan kian mengalami banalitas (pendangkalan makna).

Fenomena lain terjadi pada hari Selasa (19/2/2013), dimana dua kelompok pelajar dari SMA 10 Yogyakarta dan SMA Muhamadiyah 3 Yogyakarta, pada pukul 16.00 WIB terlibat tawuran dengan saling melempar batu serta baku hantam dengan tangan menggenggam batu. Tidak ada korban jiwa dalam tawuran tersebut. Namun, beberapa siswa mengalami luka akibat lemparan batu serta pot tanaman. Tiga sepeda motor yang diduga milik siswa SMA 10 Yogyakarta, rusak parah dan langsung dibawa kabur pemiliknya. Di depan SMA Muhamadiyah 3, rombongan dengan sekitar 12 sepeda motor itu bertemu. Dua kubu terlibat pembicaraan dan saling bersitegang. Dua pelajar yang mengaku dari SMA 10 Yogyakarta HM (18) dan AN (18) diamankan di Mapolsekta Wirobrajan. Keduanya mengalami luka lecet pada lengan akibat lemparan batu (<http://jogja.tribunnews.com/2013/02/19/pelajar-terlibat-tawuran-di-depan-smamuhammadiyah-3-yogya/>)

Tawuran pelajar juga kerap terjadi pada saat pengumuman kelulusan. Bukan hanya konvoi pelajar berkendaraan bermotor yang mewarnai pengumuman kelulusan siswa SMA di Yogyakarta. Tawuran antar pelajar juga terjadi pada Selasa (20/4/2014). Sejumlah pelajar yang masih mengenakan seragam terlibat saling pukul dan saling lempar di perempatan Jalan Cik Di Tiro Yogyakarta Selasa petang. Bahkan mereka sempat melemparkan beberapa kursi dan kayu ke pengendara kendaraan yang lewat. Akibatnya kemacetan panjang tidak terhindarkan dan beberapa pengendara kendaraan luka-luka. Sekitar pukul 15.50 WIB segerombolan pelajar yang tiba-tiba datang dari arah Sagan dan Blimbingsari langsung terlibat baku hantam di Jalan Cik Di Tiro Yogyakarta. Perkelahian dengan saling lempar kayu serta batu itu terjadi sekitar 15 menit. Melihat hal itu para pengendara kendaraan lain marah dan mengusir para pelajar tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadisdikpora) DIY, mengaku sangat prihatin atas kejadian itu. Pada hari yang sama, pihaknya juga mendapatkan laporan terjadi tawuran antar siswa di SMKN 3 Yogyakarta pada hari yang sama. (<http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/14/05/20/n5vbbj1-tawuranpelajar-warnai-pengumuman-kelulusan-ujiannasional>)

Pengumuman kelulusan yang disambut suka cita dengan melakukan aksi coret-coret pada baju seragam, mengungkapkan ekspresi melalui konvoi di jalan raya, dan melakukan tawuran pelajar merupakan pemandangan umum yang jarang disaksikan. Menanggapi kenyataan tersebut, seorang pengamat pendidikan, Utomo Dananjaya (Kompas, Sabtu, 16 Juni 2007) mengatakan bahwa ekspresi tersebut menunjukkan bahwa pelajar merasa terbebas dari kekangan-kekangan selama mereka menjalani pendidikan. Ekspresi perayaan (celebrasi) kelulusan yang semakin vulgar tersebut, dapat diartikan bahwa sistem pembelajaran di sekolah terlalu mengungkung dan menindas sehingga menyebabkan mereka merasa terkekang dan tidak senang di sekolah. Jika disimak dan dibaca secara seksama dalam perspektif mereka (*their own perspective*), sepertinya pelajar sedang merayakan kebebasan, bukannya merayakan prestasi. Hal tersebut karena semua pelajar, berapapun nilainya, tinggi ataupun rendah, sepanjang mereka lulus mereka mengekspresikannya dengan perayaan (celebrasi) kelulusan dengan berbagai cara. Mereka sesungguhnya sedang mengkonstruksi ruang kolosal untuk merayakan kebebasan, bukan semata-mata ekspresi keberhasilan.

Sederet pemberitaan tentang kekerasan pelajar berikut ini menunjukkan betapa akarnya sulit diurai sehingga realitasnya tak kunjung usai. Tiga pelajar dibacok sekelompok orang tak dikenal saat nongkrong di Lapangan Monumen Diponegoro Tegalrejo, Sabtu (6/12/2014) malam. Pelaku diperkirakan berjumlah 6 orang bersenjata tajam sejenis pedang dan mengendarai motor berboncengan. Akibatnya, 3 pelajar mengalami luka sabetan antara lain di jari tangan kanan, di kepala, dan di bagian punggung. Diduga pelaku dan korban sudah saling kenal, namun motifnya belum diketahui. Sabtu malam, ketiga korban dan beberapa temannya sedang nongkrong. Sekitar pukul 22.00 WIB, dari arah selatan datang kelompok pelaku mengendarai tiga motor berboncengan. Pelaku yang diperkirakan berjumlah 6 orang itu langsung menyerang, setelah itu kabur. Sementara itu, diduga akan melakukan tawuran, 21 pelajar diamankan petugas Polresta Yogyakarta, Sabtu (6/12/2014) malam. Dari tangan para pelajar, petugas mengamankan motor, pedang, samurai, sabit, tongkat bambu, tongkat kayu, hingga gir.

Kejadian serupa, sekelompok pelajar menyerang SMKN 2 Depok di Mrican, Caturtunggal Depok, Rabu (10/12/2014). Penyerangan dilakukan sebanyak tiga kali, di antaranya pelaku masuk ke dalam sekolah. Penyerangan diduga dilakukan pelajar yang

tergabung dalam satu geng. Bahkan seorang guru dipukul oleh pelaku sehingga membuat pelajar SMKN 2 Depok marah dan melawan kelompok penyerang. Sore harinya, sekitar pukul 15.00 WIB, penyerang datang dengan massa lebih banyak kembali menyerang dengan melempari sekolah dengan batu.

Kejadian lainnya, dua orang pelajar dianaya sejumlah pelajar dari sekolah yang berbeda Selasa Sore (17/02/ 2015). Terkait kejadian tersebut, sebanyak 10 pelajar salah satu SMK di kawasan Caturtunggal Depok berhasil ditangkap warga dan petugas Polsek Depok Barat. Akibat aksi para pelajar tersebut, salah seorang korban mengalami gegar otak karena dipukul menggunakan balok kayu. Saat kejadian, kedua korban berboncengan melintas di depan para pelajar yang sedang nongkrong di warung burjo, tidak jauh dari sekolah mereka. Tanpa sebab, kedua korban langsung dikejar oleh para pelajar yang diperkirakan berjumlah belasan orang. Setelah berhasil ditangkap, kedua korban dikeroyok oleh para pelaku. Penganiayaan itu dilakukan menggunakan tangan kosong dan balok kayu. Warga yang melihat keributan langsung melerai dan mengamankan para pelaku.

Kekerasan pelajar antar geng juga tak luput dari penggunaan senjata tajam. Senjata tajam yang dipergunakan dalam kekerasan pelajar merupakan alat yang berfungsi sebagai tanda yang di dalamnya melekat nilai-nilai kekerasan. Belum lama ini, Polres Sleman memusnahkan sejumlah barang bukti yang merupakan hasil kejahatan yang sudah mendapatkan keputusan dari pengadilan.

Barang Bukti yang Disita Polisi

Jenis Senjata	Jumlah
Pedang	27
Pisau Belati	10
Tongkat	18
Gir dengan Tali Pelontar	7
Sabit	4

KR, Sabtu Kliwon, 18 Oktober 2014, hal. 16

Benda berbahaya tersebut mayoritas disita petugas dari kelompok remaja atau pelajar yang terlibat tawuran sejak Januari 2014. Senjata tersebut juga merupakan sitaan dari geng yang sengaja membawa senjata tajam saat nongkrong atau jalan-jalan dengan dalih untuk jaga diri. Berdasarkan data dari Polres Sleman (KR, 18 Oktober 2014, hal. 16), 70 % kasus kejahatan yang terjadi di Sleman melibatkan usia produktif atau anak sekolah. Fakta tersebut membuat keprihatinan banyak pihak, seperti orang tua, sekolah, dinas

pendidikan, dan kepolisian. Bahkan tindakan penegakan hukum seolah tidak menjadikan efek jera bagi para pelaku dan pelaku-pelaku lainnya. Kejadian serupa senantiasa mengalami pengulangan. Dari catatan kepolisian, kasus yang melibatkan remaja dan kerap terjadi adalah tawuran antarkelompok remaja yang berujung penganiayaan dengan saling serang menggunakan batu dan senjata tajam.

Kekerasan yang melibatkan para pelajar hadir dalam berbagai jenis dan bentuk, mulai dari kekerasan verbal hingga kekerasan fisik. Kekerasan fisik menggunakan modus yang semakin bervariasi, misalnya penggunaan senjata (*gaman*) yang senantiasa berubah karena diperbaharui dari waktu ke waktu. Pentungan, clurit, pedang, gir sepeda motor yang dilengkapi dengan tali pelontar/ikat pinggang, ketapel, paser (panah), ruyung, *double stick*, keling, merupakan contoh senjata tajam yang sering ditemukan dalam razia senjata di sekolah-sekolah. Senjata semacam itulah yang sering digunakan oleh pelajar sebagai strategi penyerangan ketika sedang *nglithih* maupun untuk melumpuhkan dan menundukkan kekuatan kelompok lawan, dengan alasan mempertahankan diri dan kelompok jika sewaktu-waktu terjadi serangan dari sekolah lain. Menjadi persoalan menarik ketika pelajar yang dikonstruksikan sebagai insan terdidik, justru mereproduksi kekerasan dengan menggunakan senjata.

Berdasarkan data Polda DIY, setidaknya terdapat 79 geng pelajar di DIY. Besarnya jumlah geng pelajar di Yogyakarta menunjukkan bahwa geng pelajar masih saja diawetkan oleh para pelajar, baik senior, yunior, maupun alumni. Dari jumlah geng yang terdeteksi tersebut, 2 di antaranya tidak aktif. Kelompok yang paling banyak berada di Kota Yogyakarta.

Data Geng Pelajar di DIY

Wilayah	Jumlah Geng	Keterangan
Polresta Yogyakarta	32	Aktif Semua
Polres Sleman	26	1 Tidak Aktif
Polres Bantul	16	1 Tidak Aktif
Polres Kulonprogo	4	Aktif Semua
Polres Gunungkidul	1	Aktif

KR, Sabtu Kliwon, 18 Oktober 2014, hal. 16

Realitas tawuran tidak terlepas dari keanggotaan pelajar dalam geng (*gang membership*). Dalam suatu pemberitaan disebutkan bahwa Yogyakarta dinobatkan sebagai kota geng pelajar (Sindo, 23 Januari 2013), tentunya hal tersebut perlu ditinjau ulang.

Konflik geng pelajar antar sekolah yang kian marak tidak dapat dilepaskan dari aroma kompetisi antar sekolah (*school competitiveness*), sejak mulai rekrutmen/seleksi masuk hingga proses pembelajaran berlangsung. Geng pelajar seringkali juga terinspirasi oleh geng pemuda kampung maupun geng suporter sepakbola yang eksis dan berhasil memperoleh penghormatan dari geng-geng lainnya. Hal tersebut diperkuat oleh kenyataan bahwa geng remaja merupakan fenomena sosial hasil interelasi konteks sosial-politik global, nasional, maupun lokal. Keberadaan geng remaja sangat dipengaruhi oleh suasana atau semangat zaman yang melingkupi kehadirannya. Jika dikaitkan dengan sekolah, sekolah merupakan institusi formal yang keberadaannya turut mempengaruhi adanya pertemanan kelompok sebaya (*peer group*) sebagai institusi informal. Terbentuknya geng pelajar di antaranya disebabkan oleh pertemanan yang terjalin karena ikatan formal anggota dalam komunitas sekolah yang sama-sama sebagai murid Sidik Jatmika (2010). Dalam pertemanan tersebut terjadi kontestasi dan negosiasi berbagai aspek. Di Yogyakarta telah terjadi transformasi geng, yang semula melekat dan berafiliasi dengan geng pemuda di luar sekolah (geng pemuda kampung) kini menjadi *embedded* dengan geng sekolah.

Pada tahun 1980-an hingga 1990-an, tawuran dianggap sebagai hiburan pelepas penat seusai sekolah karena dulu tidak ada televisi dengan beragam pilihan dan tidak ada gadget. Terkadang kalau mereka bosan, mereka melakukan tawuran karena menurut mereka menyenangkan (Sari Monik Agustin, 2014 dalam *detik.com*). Pada saat itu, orang memukuli anak atau guru memukuli siswa dianggap sebagai bentuk penertiban dan pendisiplinan. Semuanya berubah ketika memasuki era akhir 90-an dan 2000-an. Kekerasan pelajar kemudian dimaknai sebagai bentuk kefrustasian sosial dimana pelajar sebagai subjek aktif hanyalah mengekspresikan realitas sosial. Seringkali, tawuran juga dilakukan tanpa adanya alasan yang spesifik. Jika dulu tawuran dan kekerasan dianggap sebagai bentuk aktualisasi diri dan solidaritas, maka saat ini telah terjadi pergeseran makna mengenai definisi kekerasan dan tawuran.

Kemajuan zaman dan proses demokratisasi yang berlangsung bukannya menyurutkan intensitas kekerasan pelajar, namun kekerasan justru kian menemukan momentumnya sehingga seolah-olah telah “melembaga” bahkan “membudaya”, sehingga menampilkan sebagian wajah buram pendidikan di kota pelajar. Kota Yogyakarta dengan multi predikat sebagai kota budaya, kota pelajar, kota pariwisata, berimplikasi pada

kebijakan-kebijakan yang seringkali tidak sesuai dan berbenturan satu dengan yang lain. Sebagai kota pariwisata, Yogyakarta difasilitasi dengan berbagai sarana dan ruang publik yang tidak sesuai dengan predikat Yogyakarta sebagai kota pelajar. Misalnya tersedianya tempat-tempat hiburan dan tempat nongkrong yang aktif sepanjang hari, bahkan hingga 24 jam.

Pendidikan di sekolah tidak berlangsung dalam kevakuman konteks sosio-kultural masyarakat. Pendidikan di sekolah berada dalam konteks dan jalinan sosio-kultural. Sekolah bahkan dapat merupakan sebuah ruang publik (*public space*), sebagai arena kontestasi beraneka kepentingan. Ruang publik perlu dilihat sebagai ruang bersama (*common space*) dari berbagai kelompok kepentingan yang senantiasa berjuang memperebutkan hegemoni. Namun kenyataannya, dalam perkembangan lembaga publik seringkali timbul masalah, terutama masalah pokok bahwa ruang publik cenderung menjadi arena bagi tempat berlangsungnya kekerasan simbolik (*symbolic violence*) dan simulasi realitas (*simulacrum of reality*) dengan berbagai bentuknya (Piliang dalam Garin, 2005). Sekolah sebagai ruang publik seringkali mengalami kegagalan karena justru mereproduksi sekat-sekat sehingga pelajar tidak mendapatkan ruang atau arena untuk berekspresi dan berkreasi.

Ruang publik yang mestinya berorientasi pada publik, justru berpihak dan didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Praktik sosial kekerasan pelajar senantiasa berulang dengan menampakkan sifatnya yang episodik dan reproduktif, dimana kekerasan merupakan entitas historis yang harus “diwariskan” dari generasi ke generasi. Profil pelajar saat ini telah mengalami perubahan seiring dinamika pertumbuhan kota dan transformasi media. Pendidikan di sekolah seringkali melupakan proses bertumbuhnya dan transformasi kesadaran siswa. Transformasi kesadaran yang tidak terjadi menyebabkan pelajar bertindak ekstrim untuk berbuat kekerasan ketika menghadapi masalah dalam kehidupan mereka. Kekerasan juga bisa merupakan bentuk kefrustasian sosial, di mana mereka sebagai subjek aktif hanya mengekspresikan bentuk kefrustasian sosial akibat ruang yang makin sesak, di mana sistem pendidikan tidak menyediakan ruang bagi pelajar untuk berartikulasi. Konfigurasi anak-anak muda yang berusaha untuk memperoleh ruang seperti itu, mengalami penyumbatan (*bottle neck*) yang memerlukan kanalisasi. Sekolah perlu menyublimasinya dengan memfasilitasi dan menyediakan ruang sehingga pelajar yang

mengalami kebuntuan dapat melakukan eskapisme untuk mengartikulasikan ide, gagasan, potensi, dan ekspresinya.

Simpul-simpul kekerasan pelajar dalam konteks persekolahan (*schooling context*) selalu terjadi dan mengalami pengulangan karena senantiasa dikonstruksi dan direproduksi oleh pelajar yang merupakan para aktor. Hal tersebut memunculkan pemikiran spekulatif bahwa telah terjadi pergeseran pemaknaan (*meaning*) terhadap kekerasan dalam dunia sosial kaum pelajar. Betapapun telah banyak riset dilakukan tentangnya, fenomena kekerasan pelajar tidak mudah untuk diurai. Kondisi inilah yang menyebabkan siklus kekerasan tak kunjung usai. Sebagai suatu institusi pendidikan, sekolah tak luput menjadi arena yang kondusif dan kontestatif bagi berlangsungnya reproduksi kekerasan. Terjadinya praktik kekerasan telah mendukung melanggengnya kultur kekerasan yang senantiasa direproduksi, oleh pelaku-pelaku lama (alumni) kepada pelaku-pelaku (pelajar) yang baru, oleh pelajar senior kepada pelajar junior. Reproduksi kekerasan selalu hadir karena konstruksi "*enemy image*" yang terus dibangun dalam ingatan kolektif suatu komunitas (Novri Susan, 2012). Dalam konteks kekerasan pelajar, terjadi proses menyimpan peristiwa, stigma, persepsi melalui mobilisasi bahasa dan narasi-narasi sejarah masa lalu secara "*gethok tular*" baik dari mulut ke mulut hingga menyebar melalui media sosial, sehingga menghasilkan sayatan stigma identitas dan tindakan simbolis. Seiring perkembangan teknologi informasi dan media, stigma-stigma tersebut mengalami pengawetan dan penguatan.

Sekolah umumnya juga mempromosikan respon negatif kepada siswa. Sekolah membawa efek negatif karena menjadi arena berbahaya (*toxic and inhospitable places*), yang menyebabkan terjadinya malapetaka dan kerusakan akibat sekolah (*wounded and damaged by schooling*) (Harber, 2005; Smyth, 2014). Dalam mencari akar kekerasan di sekolah, Harber menunjuk pada struktur sistem persekolahan (*schooling*). Secara umum kebanyakan sekolah lebih mencerminkan model otoriter daripada model demokrasi. Di lingkungan sekolah lebih sering dipromosikan tentang pendidikan untuk melaksanakan kontrol sosial (*social control*) daripada pendidikan untuk membangun kesadaran kritis para pelajar terhadap *values* yang berkontestasi. Harber menyatakan bahwa sekolah tidak secara otomatis menguntungkan individu (siswa) maupun masyarakat. Hal demikian menunjukkan betapa terdapat sebuah realitas yang paradoks dalam konteks persekolahan.

Reproduksi kekerasan pelajar dapat terjadi secara individual, sehingga tafsir atau analisisnya bersifat psikologis karena kekerasan pelajar merupakan ekspresi emosional individual. Namun secara sosiologis, reproduksi kekerasan pelajar berkaitan dengan identitas individu, kelompok, institusi, dan sistem, sehingga bisa juga merupakan sentimen kolektif semacam *esprit de corps* sekolah, ketika emosi individual menjadi emosi kolektif yang saat ini melekat pada eksistensi identitas sekolah. Kekerasan yang kemudian terjadi adalah kekerasan pelajar antar geng sekolah. Pelajar melakukan kekerasan bisa jadi karena membela dan menjaga nama sekolah dengan cara yang *different*, sesuai dengan *values* yang mereka yakini. Sementara itu kelompok pelajar lain membela sekolah melalui prestasi akademik dan non-akademik. Di sekolah juga terjadi eksklusi antar kelompok berdasarkan intelektualitas dan kelas (ekonomi). Pelajar berprestasi mendapatkan apresiasi dan dihargai, sedangkan pelajar pelaku kekerasan memperoleh stigmatisasi dan *labelling*.

Kekerasan pelajar tidak berlangsung di ruang hampa. Kekerasan di sekolah merupakan representasi dari kekerasan komunal dan kolektif yang lebih luas. Kekerasan pelajar juga merupakan hasil konstruksi yang senantiasa direproduksi oleh para aktor. Riset ini memungkinkan pelacakan dan telaahan aneka perspektif dalam sosiologi yang bersifat multiparadigmatik, melalui pendekatan yang bersifat struktural-sistemik (mengacu pada kolektivitas) maupun agensi-aktor (mengacu pada individu) dengan membaca bekerjanya sejumlah faktor. Kekerasan bisa jadi merupakan habitus yang diekspresikan dalam arena sekolah untuk mempertontonkan nilai-nilai dan tindakan kekerasan karena sesungguhnya pelajar sedang berhadapan dengan kekuatan/kekuasaan lain seperti guru, sekolah, dan rezim akademis yang berkuasa. Kekerasan pelajar di sekolah, bisa juga merupakan representasi dari relasi kuasa di dalam keluarga dan di masyarakat.

Dalam realitasnya, ada sekolah-sekolah (SMA dan SMK) yang mampu mengelola konflik sehingga tidak bertransformasi menjadi kekerasan pelajar antarsekolah. Namun ada juga sekolah yang gagal dalam mengelola konflik antar pelajar dan justru menjadi arena yang kondusif bagi berlangsungnya reproduksi kekerasan pelajar. Kekerasan pelajar dapat ditinjau dari berbagai pendekatan dan perspektif dengan fokus pada dimensi-dimensi yang saling bertaut. Pandangan konservatif melihat kekerasan semata-mata sebagai bentuk patologi sosial dan penyimpangan moral. Pandangan strukturalis yang melihat adanya faktor determinan yang berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan pun tidak lagi memadai

untuk menganalisisnya. Oleh karenanya, penjelasan dan pandangan yang sifatnya normatif perlu dilampaui. Menurut pandangan kritis, terjadinya kekerasan pelajar tidak semata-mata karena determinisme oleh struktur, melainkan selalu ada ruang negosiasi bagi pelajar untuk bisa keluar dari ketegangan-ketegangan sosial yang dialami.

Mendasarkan pada konstelasi fenomena di atas, penelitian disertasi ini berikhtiar menjawab pertanyaan pokok “Bagaimana praktik sosial dan reproduksi kekerasan pelajar itu terjadi? Mengapa sekolah menjadi arena kondusif bagi berlangsungnya reproduksi kekerasan pelajar?”. Reproduksi kekerasan pelajar perlu mendapatkan penjelasan yang lebih substansial untuk memahami nalar sosial (*the social logic*) di dalamnya. Namun, kekerasan tidak semata-mata diamati melulu sebagai akibat dari luar, melainkan juga sebagai akibat yang dibatinkan oleh para aktor. Dengan demikian nalar sosial para aktor di sekolah dan pemahaman mereka tentang kekerasan dan konteks persekolahan (*schooling context*) menjadi penting sebagai titik pusat kajian dalam penelitian disertasi ini.

Terus terulangnya kembali kasus kekerasan pelajar mengisyaratkan perlunya mengurai realitas kekerasan tersebut tidak hanya dari satu dimensi. Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai kekerasan pelajar dari pandangan kritis yang tidak sekedar melihat realitas kekerasan pelajar berdasarkan determinisme oleh struktur, melainkan bergerak melampauinya untuk mengungkap dan menafsir narasi-narasi kecil versi pelajar yang bersifat spesifik sesuai dengan dinamika transformatif dalam dunia sosial pelajar. Kekerasan pelajar tidak semata-mata dibaca sebagai gejala sosial yang bersifat patologis dan deviasi semata. Kekerasan pelajar memiliki rasionalitas yang perlu dijelaskan dari perspektif pelaku (*their own perspective*), bukannya *adult perspective*. Kekerasan pelajar seringkali mewujud dalam tindakan distingtif berdasarkan habitus. Kekerasan pelajar juga merupakan ekspresi atas pengalaman pelajar dalam memahami relasi kuasa dalam dunia sosialnya. Dalam riset ini dikaji bagaimana para pelajar berhadapan dengan kekuasaan sekolah sekaligus berelasi dengan sesama pelajar. Dalam masyarakat tontonan (*the spectacle society*) yang diperantarai oleh media, realitas kekerasan seolah menemukan konteks dan momentum, habitus kekerasan menemukan habitatnya pada arena persekolahan. Kekerasan mengalami transformasi makna berdasarkan kontestasi habitus yang *built-in* dalam kehidupan sosial pelajar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dinamika praktik sosial kekerasan pelajar di Kota Yogyakarta?.
2. Bagaimana berlangsungnya reproduksi kekerasan pelajar di sekolah ?.
3. Ruang sekolah seperti apa yang memungkinkan terjadinya reproduksi kekerasan pelajar?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami dinamika praktik sosial kekerasan pelajar di Kota Yogyakarta.
2. Memahami mekanisme berlangsungnya reproduksi kekerasan pelajar di sekolah.
3. Menguraikan ruang sekolah seperti apa yang memungkinkan terjadinya reproduksi kekerasan pelajar.

D. Tinjauan Pustaka

Berikut ini dipaparkan sejumlah riset empiris dengan bidang permasalahan yang relevan dan memiliki keterkaitan (*collateral*) dengan fokus kajian dalam penelitian ini, namun menggunakan pendekatan yang berbeda. Paparan riset yang relevan dipaparkan sebagai berikut:

Studi tentang “Perkelahian Pelajar: Potret Siswa SMU di Jakarta” yang dilakukan oleh Hasballah M. Saad (2003) menunjukkan adanya hubungan antara perilaku agresif dengan sejumlah variabel seperti: kondisi lingkungan tempat tinggal, kualitas hubungan dengan orang tua, dan konsep diri remaja. Hasil riset menunjukkan bahwa: “Semakin baik kondisi lingkungan tempat tinggal, maka semakin rendah kecenderungan remaja berperilaku agresif”; “Semakin baik kualitas hubungan dengan orang tua, maka kecil kemungkinan remaja berperilaku agresif”; dan “Semakin positif konsep diri, kemungkinan remaja berperilaku agresif semakin rendah.” Riset ini dilakukan di sejumlah sekolah di Ibukota Jakarta. Penelitian ini lebih menekankan pada determinasi kekuatan faktor eksternal dan seolah menafikan eksistensi pelajar yang bertindak sebagai individu/agensi yang memiliki kehendak. Nampaknya, peneliti tidak melihat sekolah

sebagai variabel yang determinan, sehingga lebih melihat perilaku agresif dari aspek psikologis seperti konsep diri individu, dan aspek sosiologis yang berhubungan dengan kualitas interaksi dalam keluarga, dan kondisi lingkungan tempat tinggal.

Penelitian Abd. Rahman Assegaf (2004) tentang “Pendidikan Tanpa Kekerasan: Tipologi Kondisi, Kasus, dan Konsep” mengkaji tentang tipologi perilaku kekerasan dalam pendidikan, kondisi yang melatari munculnya kekerasan dalam pendidikan, dan rekomendasi kebijakan pendidikan tanpa kekerasan. Kekerasan dalam pendidikan dijelaskan melalui bekerjanya beberapa variabel seperti faktor (*independent variable*), kondisi (*antecedent variable*), dan pemicu (*intervening variable*). Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial historis secara deskriptif melalui analisis isi (*content analysis*) pada pemberitaan di surat kabar harian lokal di Yogyakarta. Riset ini tidak menggunakan metode interview secara mendalam sehingga tidak terjadi relasi antara peneliti dengan yang diteliti. Kekerasan pelajar juga bisa terjadi karena rasa setia kawan, balas dendam, salah paham, merasa terusik, ataupun sebab-sebab sepele lainnya. Di lingkungan SMA, kasus tawuran bahkan sampai menyebabkan korban jiwa. Pemicu kekerasan pelajar bisa jadi awalnya merupakan persoalan pribadi yang berkembang menjadi permasalahan kelompok. Adanya rasa ketersinggungan salah satu pihak seringkali berbuntut pada pemukulan dan penyerangan sekolah lain. Akibatnya, muncul solidaritas sesama teman untuk melakukan aksi balasan yang muncul lebih keras daripada aksi pertama. Begitu aksi kekerasan tidak diselesaikan, muncul kekerasan susulan berikutnya.

Supriyatyo Adi, dkk. Dari PUSHAM UII (2009) dalam buku berjudul “Agen-agen Kekerasan: Studi Atas Kelompok Sipil di Yogyakarta” menjelaskan bahwa pasca keruntuhan rezim Orde Baru telah terjadi kemunduran Negara (*retreat of the state*) dalam bidang keamanan. Dari sanalah jaringan bisnis dan politik keamanan kemudian berkembang yang ditandai oleh menjamurnya berbagai agen dan broker keamanan dengan beragam pola relasi, klik, patronase, serta kompensasi politik dan ekonomi di antara aktor-aktor Negara (aparat) dan aktor-aktor atau organisasi-organisasi non Negara. Diungkapkan juga bahwa kelompok-kelompok keamanan dan kekerasan justru dirawat oleh para elit politik lokal itu beranggotakan pemuda termasuk di dalamnya pelajar. Kelompok-kelompok tersebut disinyalir juga sering *memback-up* kalau terjadi tawuran pelajar. Pelajar sebagai bagian dari anak muda perlu dilihat sebagai agensi yang aktif dalam

mendekonstruksi dan mereproduksi kekuatan yang ditanamkan kepada mereka melalui berbagai kebijakan sekolah, pengawasan komunitas, dan nilai-nilai keluarga serta konstruksi Negara. Geng pelajar pasca Orba tidak lagi dilindungi oleh para petinggi (biasanya ayah yang berpangkat militer tinggi), namun bersifat lebih mandiri dalam membangun jaringan dengan penduduk kampung yang mempunyai basis geng dan laskar kuat (Hatib Abdul Kadir, 2011).

Penelitian Sidik Jatmika (2010) dengan judul “Genk Remaja: Anak Haram Sejarah ataukah Korban Globalisasi?”. Ia menyatakan bahwa genk remaja merupakan fenomena sosial hasil interelasi konteks sosial-politik global, nasional, maupun lokal. Keberadaan genk remaja sangat dipengaruhi oleh suasana atau semangat zaman yang melingkupi kehadirannya. Jika dikaitkan dengan sekolah, sekolah merupakan institusi formal yang keberadaannya turut mempengaruhi adanya pertemanan kelompok sebaya (*peer group*) sebagai institusi informal. Pertemanan kelompok sebaya dalam genk terbentuk di antaranya oleh pertemanan yang terjalin karena ikatan formal anggota-anggotanya dalam komunitas sekolah yang sama-sama sebagai murid.

Kekerasan pelajar tidak berlangsung dalam ruang hampa. Kekerasan pelajar merupakan produk dari struktur dan sistem sosial yang sarat dengan problematika yang kompleks. Kekerasan di sekolah merupakan representasi dari kekerasan komunal dan kolektif yang lebih luas. Kekerasan pelajar juga merupakan hasil konstruksi yang senantiasa direproduksi oleh para aktor. Riset ini memungkinkan pelacakan dan telaahan aneka perspektif dalam sosiologi yang bersifat multiparadigmatik, melalui pendekatan yang bersifat struktural-sistemik (mengacu pada kolektivitas) maupun agensi-aktor (mengacu pada individu) dengan melacak bekerjanya sejumlah faktor.

Kehadiran geng pelajar yang sering terlibat kekerasan dapat dianalisis dari dua level, yaitu level makro dan level mikro. Pada level makro, keberadaan geng sekolah berkaitan erat dengan situasi politik pada masanya. Umumnya organisasi yang direstui di sekolah adalah Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Sekolah dan guru merupakan kepanjangan tangan dari *state apparatus* (pemerintah) sebagai birokrat pengambil kebijakan. Siswa seringkali diposisikan sebagai objek pendisiplinan dan kontrol sosial melalui aturan sekolah. Pelajar tergabung dalam geng karena menemukan komunitas yang sesuai. Geng sekolah seringkali terinspirasi geng pemuda kampung maupun geng supoter

sepakbola yang melakukan aktivitas kekerasan untuk menarik perhatian dari geng lain dalam komunitasnya. Sedangkan pada level mikro, keterlibatan pelajar dalam geng sekolah merupakan kebutuhan untuk memperoleh kesenangan di masa muda (Hatib Kadir, 2010). Dengan melakukan tawuran, pelajar mendapatkan reputasi dan meraih status tinggi dalam jaringan geng. Kepopuleran dan kecakapan anggota dalam geng membuat kagum di kalangan mereka. Dengan bergabung pada geng, seorang pelajar memperoleh status yang lebih tinggi dan lebih berdaya dalam jaringan sosial dengan teman sebayanya. Mereka merasa aman dan senang dengan loyalitas antar anggota dalam geng melalui dukungan sosial di antara mereka. Dengan menjadi anggota geng, pelajar merasa punya teman dan punya “dekengan” (*feel supported*). Kecenderungan pelajar tergabung dalam geng juga disebabkan mereka mencari dan menemukan komunitas yang sesuai. Terjadinya proses *missing community in school* menyebabkan pelajar mencari komunitas yang berbeda.

Tawuran pelajar tidak terjadi setiap saat, tetapi berlangsung secara sporadis dan musiman (Hatib, 2010). Ada masa-masa di mana terjadi puncak tawuran pelajar, namun ada juga masa tawuran jarang terjadi bahkan berhenti. Puncak tawuran pelajar biasanya terjadi ketika siswa baru telah mengetahui identitas kelompok sendiri dan dengan kelompok mana (kelompok lain) mereka bermusuhan. Sosialisasi dan reproduksi mengenai musuh ini umumnya dilakukan oleh para siswa senior kepada siswa baru pada saat inisiasi atau Masa Orientasi Siswa (MOS). Kemudian, peralihan kepemimpinan geng dari siswa kelas 3 kepada siswa kelas 2 terjadi setelah ujian akhir (sekitar bulan Juni). Melalui kekerasan, anggota geng sedang membangun modal *simbolis* dalam interaksi sosial.

“The more often a boy does tawuran (mass fight), the more he is respected by his peers, because only the toughest students are brave enough to attack an enemy school group alone with just one friend for support. Frequently, carrying out tawuran builds symbolic capital of any geng member who aims to be considered as a gentho (Hatib, 2010).

Kekerasan pelajar juga dapat dimaknai sebagai bentuk tindakan yang memberikan kesenangan tersendiri, sebagai ekspresi keseruan dalam berinteraksi, sekaligus sebagai bentuk resistensi dan marginalitas, ungkapan kefrustasian, maupun perlawanan simbolis mereka terhadap rezim akademik yang menjadi *mainstream* dan membelenggu dalam kehidupan sekolah. Kekerasan pelajar telah menjadi bagian tak terpisahkan dari subkultur anak muda. Kekerasan yang berlangsung sejalan dengan jiwa berontak remaja yang sedang mencari identitas diri. Sosok “*tough guy*” menjadi primadona dan kekerasan dianggap

sebagai hal yang keren (Phaerly Mavie, 2010). Parameter keren atau tidaknya seorang pelajar berbeda-beda dalam konteks kelas sosial dan ekonomi.

Menurut Bourdieu (Haryatmoko, 2013), jika kelas atas melakukan dominasi, maka kelas menengah mereproduksi gaya hidup kelas atas dengan sok pamer melalui hobi dan kepemilikan. Sementara itu, kelas bawah cenderung melakukan resistensi. Pelajar yang berasal dari kelas ekonomi atas cenderung mempertontonkan harta dan kepemilikannya yang selalu diperbarui sebagai alat untuk tampil keren. Pelajar yang berasal dari kelompok intelektual tinggi mempertontonkan prestasi akademiknya. Sedangkan pelajar dari kelas ekonomi dan intelektual bawah menunjukkan identitasnya melalui keberanian (*brave*) melakukan sesuatu supaya disegani, seperti: berani bicara kasar, berani merokok, berani melawan orang yang lebih besar, berani melakukan kekerasan, dan lain-lain.

Distorsi komunikasi merupakan penyebab utama merebaknya fenomena geng remaja, sebagaimana dikemukakan Jurgen Habermas (Triyono Lukmantoro, 2007). Remaja tidak mampu memahami atau sengaja tidak mau menyepakati aturan-aturan budaya masyarakat dan komunitas sebagai tempat berfungsinya dengan baik. Perbaikan pola komunikasi antara guru-orang tua dengan remaja kemudian dipercaya sebagai salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi potensi kenakalan remaja. Sedangkan Hairus Salim HS, dkk (2011) mengungkap bahwa saluran partisipasi seperti OSIS di sekolah menjalankan dua fungsi kontradiktif, di satu sisi membuka ruang aktivitas siswa, namun sekaligus membatasinya pada aktivitas maupun keterlibatan kelompok-kelompok yang direstui. Dalam penelitian yang mengkaji secara etnografis praktik-praktik pluralisme di lembaga sekolah menengah ini, ruang publik sekolah yang menjadi lokus pluralisme merupakan ruang bersama dimana semua ekspresi keragaman diakomodasi dan menjadi arena belajar siswa dalam mengelola keragaman. Namun dalam praktiknya, seringkali terdengar tentang dominasi dan diskriminasi ruang publik siswa di sekolah oleh kelompok dengan ideologi tertentu.

Tawuran antar anak sekolah kelas menengah bawah di Jawa menggambarkan habitus maskulin yang dirujuk dalam kekerasan kolektif lokal (Pam Nilan, Argyo Damartoto, Agung Wibowo, 2011). Setidaknya terdapat empat poin penting yang muncul tentang maskulinitas. Pertama, tawuran merupakan kegiatan temporal terbatas yang berakhir dengan transisi dari sekolah ke dunia kerja. Kedua, alkohol memainkan peran

penting dalam memperkuat konflik dan perselisihan demi kehormatan. Ketiga, mendapatkan pacar menuntut ekspresi habitus maskulin dari yang diperlakukan melalui tawuran. Geng dengan demikian adalah formasi untuk pembangunan maskulinitas.

Bentuk-bentuk serta mekanisme berlangsungnya kekerasan simbolik di sekolah, tidak banyak mendapat perhatian serius. Mekanisme kekerasan simbolik melalui BSE (Buku Sekolah Elektronik) dengan mengkomparasikan proporsi habitus kelas atas dan kelas bawah (Nanang Martono (2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kalimat dan gambar yang dimuat dalam BSE memuat habitus kelas dominan (kelas atas). Realitas dalam BSE ini dapat mencerabut siswa di luar kelas dominan dari akar sosial budayanya.

Pelajar dalam usia yang dikategorikan sebagai anak muda (*youth*), dapat mendefinisikan diri mereka sendiri. Pelajar yang sering berafiliasi dengan geng, dapat dipahami sedang mengekspresikan diri mereka dari tatanan sekolah, Negara, dan komunitas yang mengharuskan mereka patuh terhadap bentuk-bentuk struktural yang mapan. Dalam konteks organisasi pelajar, sekolah hanya mendukung dan merestui secara resmi organisasi-organisasi kesiswaan seperti OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) untuk memudahkan dalam melakukan kontrol terhadap aktivitas pelajar (Hatib, 2011). Selama ini, riset mengenai kekerasan pelajar lebih banyak menyoroti bagaimana pelajar berhadapan dengan sekolah, Negara, dan komunitas. Belum banyak riset-riset kekerasan pelajar yang melihat bagaimana pelajar berhadapan dengan teman sekelompoknya sekaligus bernegosiasi dengan nilai-nilai yang berkontestasi di dalamnya.

Dalam salah satu tulisannya, Pam Nilan (2010) menjelaskan bahwa para anggota geng sekolah bukanlah pemuda kampung, gali, atau preman. Fakta menunjukkan bahwa mereka adalah siswa laki-laki yang berada pada masa tiga tahun terakhir sekolah menengah. Keluarga mereka memiliki sarana dan fasilitas untuk mempertahankan mereka di sekolah, bahkan diperpanjang untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Pada saat yang sama, mereka tunduk pada trend yang dimediasi oleh hipermaskulinitas global, yang menempatkan dan semakin meningkatkan tekanan pada laki-laki muda untuk menegaskan maskulinitas mereka melalui penampilan yang menampakkan kekuatan dan dominasi.

Yang menarik dari fenomena geng sekolah di Indonesia adalah terbatasnya temporalitas/waktu. Pada sebagian besar kaum muda, masa-masa berada dalam situasi

perang antar geng yang heroik berakhir pada tahun ketiga di sekolah menengah atas. Hal tersebut tampaknya mendukung salah satu kesimpulan dalam penelitian Barry (Nilan, 2010) bahwa kaum muda mengalami masa transisi menuju masa dewasa. Dia menunjukkan bahwa banyak remaja memiliki beberapa pengakuan yang berarti dan diakui secara sosial dalam dunia sosial. Selama fase transisi ini, beberapa orang melihat perilaku anti-sosial sebagai sarana mendapatkan pengakuan sementara, yang berasal dari jaringan pertemanan di sekolah maupun masyarakat yang lebih luas. Kemudian, ketika terdapat peluang yang ditawarkan kepada mereka di masa dewasa awal, mereka berhenti dari praktik tersebut.

Pada tahun 2008, terdapat sekitar 23 geng sekolah, yang berasal dari sekolah yang termasuk sekuler, Katolik, Kristen, dan sekolah Islam. Graffiti (vandalisme) di seantero Yogyakarta mengungkapkan terjadinya kontestasi antar geng anak sekolah. Hasil investigasi Hatib Abdul Kadir (2011) juga menemukan bahwa permusuhan antar geng sekolah tersebut nyaris tersembunyi. Namun demikian, bagi banyak orang muda di Yogyakarta yang terlibat dalam konflik geng di sekolah, aktivitas tersebut merupakan bagian dari pengalaman “manis” mereka yang akan selalu diingat setelah mereka meninggalkan sekolah. Ada kesenangan dalam strategi perencanaan dan berjalannya pertarungan, apalagi pada saat mengalami kemenangan. Mereka sedih ketika rekan-rekan mereka terluka dan hancur ketika mereka kalah berkelahi. Pada dasarnya, sekolah itu membosankan tapi geng itu mendebarkan. Umumnya, laki-laki muda yang sudah bekerja dan mahasiswa kadang-kadang kembali ke gerbang sekolah lama mereka di sore hari untuk mendesak pada geng pelajar saat ini dan mengenang romantika masa mereka bertempur (Nilan, 2010). Keterlibatan dalam pertempuran geng di sekolah muncul untuk mengembangkan rasa solidaritas terhadap tujuan dan identitas maskulin yang kuat.

Anak muda oleh masyarakat diminta menggambarkan perjalanan waktu biografi mereka sendiri, untuk membangun hubungan yang berarti dengan waktu sosial. Ini berarti membangun hubungan yang signifikan antara individu dan kolektif, masa lalu, sekarang, dan masa depan. Keanggotaan geng sekolah pada kelas menengah yang dijelaskan di sini menyiratkan hubungan yang signifikan antara pemuda dan identitas kolektif yang lebih luas dan tujuan. Ini berfungsi sebagai contoh dari proyek yang luas mampu menyatukan dimensi individu dan kolektif melalui singularitas tujuan dan kesepakatan tentang perilaku yang sesuai (Nilan, 2010). Nilai tertentu menjadi pemenang dalam kontestasi nilai tersebut.

Beberapa kajian yang relevan memberi inspirasi dalam memetakan secara teoretis maupun empiris fenomena kekerasan pelajar. Kekerasan dan pendidikan sesungguhnya merupakan dua hal yang saling bertentangan. Keduanya dapat dikatakan bersifat paradoksal, di mana di satu sisi posisi pendidikan ditempatkan sebagai daya upaya agar anak didik dapat merealisasikan diri dan mengantarkan anak didik menuju kepada kedewasaan (*civilizing process*). Namun, di sisi yang lain harus diakui bahwa dalam praktik pendidikan, tidak jarang juga terjadi kekerasan (Abdul Munir Mulkan, 2002). Kenyataan tersebut mengandaikan bahwa pendidikan memainkan dua peran sekaligus, namun bersifat kontradiktif. Pendidikan merupakan instrumen bagi sosialisasi nilai-nilai kemanusiaan untuk mengurangi kekerasan, namun sekaligus juga sebagai determinan dan menjadi arena yang kondusif bagi berlangsungnya kekerasan (Jamil Salmi, 2005). Dalam konteks sekolah, guru memainkan peran sebagai agensi yang merupakan kepanjangan *state apparatus* yang secara tidak langsung mempengaruhi terjadinya reproduksi kekerasan melalui kebijakan dan peraturan yang kurang tepat, sekaligus berperan sebagai penyelamat untuk memutuskan rantai kekerasan, melalui transformasi narasi kekerasan menjadi narasi perdamaian.

Praksis nilai dalam realitas sosial seringkali sarat dengan aneka dinamika, ketegangan-ketegangan, yang seringkali dirasakan namun tak terungkap secara kasat mata. Jika sekolah ditengarai berkontribusi terhadap terjadinya reproduksi kekerasan pelajar, barangkali tidak secara langsung. Guru di sekolah tidak mengajarkan siswa untuk bertindak buruk, namun tidak berhasil mengurai ketegangan-ketegangan yang dialami oleh pelajar serta tidak mampu menyediakan ruang untuk mengartikulasikan potensi pelajar dalam kehidupan di sekolah. Seringkali siswa juga tidak menyadari bahwa mereka bertindak buruk. Berbagai kebijakan yang kurang tepat menyebabkan pelajar mengalami beban akademik berupa materi yang sedemikian padat (Abdul Munir Mulkan, 2002). Beban akademik tersebut masih ditambah lagi dengan target angka kelulusan yang harus tinggi. Belum lagi iklim kompetisi (*competitiveness*) yang dominan menjalar dan merasuk hingga ruang-ruang kelas dan memadati kultur sekolah. Kompetisi antar siswa dan kompetisi antar sekolah, berkontribusi pada aroma persaingan yang dapat memicu kekerasan pelajar antar sekolah. Dengan demikian dapat dibayangkan betapa saratnya suasana akademik (*academic atmosphere*) yang dirasakan dan dihayati oleh para pelajar.

Kekerasan pelajar selama ini lebih banyak dilihat dari perspektif perilaku menyimpang (patologi sosial), belum banyak kajian yang menyentuh pada perspektif pelaku (aktor), di mana subjek memiliki peluang dalam melakukan proses negosiasi. Dalam mengkaji tindakan kekerasan, sesungguhnya perlu memahami manusia sebagai pelaku (*agency*) yang aktif bertindak dalam memahami dunianya. Dengan kata lain, manusia bertindak secara aktif dalam ruang dan waktu yang konstitutif dan diskursif (Abdul Munir Mulkan, 2002). Sungguh merupakan suatu simplifikasi jika kekerasan sekedar dilihat sebagai fenomena penyimpangan terhadap norma sosial dan pelanggaran moral. Untuk memahami praktik sosial dan reproduksi kekerasan pelajar, perlu melihat kontestasi berbagai kepentingan dalam ruang publik sekolah yang konstitutif dan transformatif.

E. Kajian Teori

1. Kekerasan sebagai Praktik Sosial Reproduktif

Kekerasan di sekolah merupakan segala bentuk aktivitas kekerasan di lingkungan sekolah atau dalam konteks sekolah, termasuk di dalamnya kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikhis, hingga kekerasan seksual. Kekerasan fisik adalah bentuk paling umum dari kekerasan yang berhubungan dengan kekerasan di sekolah. Ada banyak alasan mengapa terjadi kekerasan di sekolah. Hal ini terutama karena adanya pelaku-pelaku (aktor) potensial dalam lingkungan (arena) sekolah. Siapapun warga sekolah berpotensi menjadi pelaku kekerasan, mulai dari guru hingga siswa di sekolah. Dalam relasi guru dengan siswa, kekerasan seringkali tak dapat dihindari karena alasannya menegakkan peraturan dan kedisiplinan. Dalam relasi sesama siswa, pelaku tersebut mencoba untuk mendominasi dan “menjinakkan” siswa lain yang bisa berakhir dalam perkelahian. Orang tua, guru, pihak sekolah dan teman sebaya juga memiliki peran dalam mempengaruhi kekerasan di sekolah.

Kekerasan pelajar (*student violence*) adalah bagian dari kekerasan remaja (*youth violence*), bahkan kekerasan yang lebih luas di masyarakat:

“Young people take seriously the question of their relationship to the wider society. Current political debate about young people’s citizenship tends to focus on what young people do not do, creating an image of young people as deficient citizens” (Kabeer, 2005:127).

Kekerasan pelajar merupakan perilaku yang mungkin merupakan lanjutan dan warisan dari masa sebelumnya. Kekerasan mencakup berbagai tindakan seperti kekerasan fisik dengan maupun tanpa senjata. Korban dapat menderita cedera fisik serius, sosial, emosional, bahkan kematian. Kaum muda bisa menjadi korban, pelaku, atau saksi kekerasan (*Understanding School Violence*, 2010). Praktik kekerasan yang terjadi merupakan implikasi dari resiko yang dihadapi oleh pelajar. Menurut Chapin & Glason (2004), terdapat resiko individu maupun lingkungan, seperti dikemukakan dalam pernyataan ini:

“Students (as a group) have risks regarding to personal risks (being the victim of violence, being the perpetrator of violence) and environment risks (violence in school)”

Kekerasan yang seringkali terjadi, dapat berupa kekerasan fisik yang cenderung mudah terlihat, namun kadang-kadang hadir juga dalam bentuk non-fisik yang bersifat *sublime* sehingga nyaris tidak kentara. Bentuk-bentuk kekerasan yang beranekaragam penting untuk dipahami, karena tidak semua tindakan kekerasan dapat teramat secara langsung. Membincangkan kekerasan seringkali hanya dipahami sebagai kekerasan fisik yang mudah diamati. Kekerasan yang bersifat *sublime* misalnya kekerasan psikis, verbal, dan simbolis. Dampaknya tidak meninggalkan luka fisik pada korban, namun menimbulkan perasaan tidak nyaman secara psikis atau perasaan tertekan. Jenis kekerasan yang bersifat *sublime* inilah yang ditengarai paling banyak terjadi, dan berimplikasi pada terjadinya kekerasan dalam bentuk yang lain.

Oleh Bourdieu (Haryatmoko, 2014), kekerasan simbolis adalah kekerasan yang tidak kasat mata. Dalam kekerasan simbolis semacam ini, bagi korbannya seringkali tidak dilihat atau tidak dirasakan sebagai suatu kekerasan, melainkan sebagai sesuatu yang alamiah dan wajar. Kekerasan yang seringkali terjadi, dapat berupa kekerasan fisik yang cenderung mudah terlihat, namun kadang-kadang hadir juga dalam bentuk non-fisik yang bersifat *sublime* sehingga nyaris tidak kentara. Bentuk-bentuk kekerasan yang beranekaragam penting untuk dipahami, karena tidak semua tindakan kekerasan dapat teramat secara langsung. Membincangkan kekerasan seringkali hanya dipahami sebagai kekerasan fisik yang mudah diamati. Kekerasan yang bersifat *sublime* misalnya kekerasan psikis, verbal, dan simbolis. Dampaknya tidak meninggalkan luka fisik pada korban, namun menimbulkan perasaan tidak nyaman secara psikis atau perasaan

tertekan. Jenis kekerasan yang bersifat *sublime* inilah yang ditengarai paling banyak terjadi, dan berimplikasi pada terjadinya kekerasan dalam bentuk yang lain.

Oleh Bourdieu (Haryatmoko, 2013), kekerasan simbolis adalah kekerasan yang tidak kasat mata. Dalam kekerasan simbolis semacam ini, bagi korbannya seringkali tidak dilihat atau tidak dirasakan sebagai suatu kekerasan, melainkan sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan sebagai sesuatu yang semestinya.

Kekerasan di sekolah seringkali dilegitimasi dengan alasan untuk menegakkan disiplin, sebagai *corporal punishment* di kalangan pelajar (Nanang, 2012). Oleh karena itu, kekerasan dapat dikatakan telah menjadi sebuah budaya yang seolah-olah menjadi mekanisme yang dilegalkan. Selain alasan menegakkan disiplin, kekerasan dalam dunia pendidikan juga dapat terjadi karena motif menunjukkan solidaritas, proses pencarian identitas atau jati diri, serta kemungkinan ada gangguan psikologis dalam diri siswa maupun guru. Sedangkan menurut Estefanía Estévez (2008), *school violence* merupakan jenis kekerasan antar siswa (anak dan remaja) yang terjadi di sekolah. Insiden kekerasan di sekolah kini lebih sering terjadi, berawal dari situasi tertentu yang mengandung konsekuensi tertentu. Faktor-faktor penyebab kekerasan di sekolah antara lain: a) faktor individual, seperti rendahnya tingkat empati, ketidakpuasan dalam hidup, reputasi masyarakat non-konformis, dan sikap terhadap norma dan otoritas institusional; b) keluarga, yang merupakan lingkungan di mana berlangsung komunikasi orang tua-remaja, dukungan orang tua, dan kohesi keluarga; c) sekolah, meliputi kualitas lingkungan kelas, pertemanan, relasi guru-siswa, penerimaan sosial dan penolakan sebaya; dan d) sosial, menyangkut juga efek media massa, internet, video games.

Penjelasan tentang reproduksi kekerasan tidak dapat terlepas dari reproduksi sosial dan reproduksi kebudayaan. Sistem pendidikan mereproduksi struktur distribusi modal budaya antara kelas (dan bagian kelas) dimana budaya ditransmisikan dan ditanamkan lebih dekat pada budaya dominan daripada cara penanaman yang dilakukan oleh keluarga.

The educational system reproduces all the more perfectly the structure of the distribution of cultural capital among classes (and section of a class) in that culture which it transmits in closer to the dominant culture and that the mode of inculcation to which it has resource is less removed from the mode of inculcation practiced by the

family (Bourdieu, 1973:57). An institution officially entrusted with the transmission of the instruments of appropriation of the dominant culture which neglects methodically to transmit the instruments indispensable to the success of its undertaking is bound to become the monopoly of those social classes capable of transmitting by their own means, that is to say by that diffuse and implicit continuous educational action which operates within cultured families (often unknown to those responsible for it and to those who are subjected to it), the instruments necessary for the reception of its message, and thereby to confirm their monopoly of the instruments of appropriation of the dominant culture and thus their monopoly of that culture (Bourdieu, 1973:58)

Bagi Bourdieu (Lury, 1998) reproduksi sosial terkait dengan bagaimana suatu masyarakat atau komunitas bereproduksi atau mempertahankan diri melampaui waktu, bukan sekedar sekumpulan individu, melainkan individu dalam kelompok tertentu dengan hubungan kekuasaan satu sama lain. Terkait dengan kebudayaan, sebagaimana dikemukakan oleh Clifford Geertz (1973:89), bahwa:

“It denotes an historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a system of inherited conceptions expressed in symbolic form by means of which men communicate, perpetuate, and develop their knowledge about attitudes toward life. Of course, terms such as meaning symbol and conception cry out for explication. But that is precisely where the widening the broadening and the expanding come in. The concept of meaning in all its varieties, is the denotation, signification, communication are our intellectual stock in trade”.

Kebudayaan merupakan pola dari pengertian atau makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol dan ditransmisikan secara historis. Kebudayaan juga merupakan sistem mengenai konsepsi yang diwariskan dalam bentuk simbolik, di mana manusia dapat berkomunikasi, melestarikan, dan mengembangkan pengetahuan dan sikapnya tentang kehidupan. Aspek kesejarahan dari kebudayaan merupakan bahan diskusi yang belum selesai karena dinamika dalam pengertian dan makna belumlah menjadi wilayah diskusi secara mendalam (Irwan Abdullah, 2006:1).

Selanjutnya dijelaskan bahwa pembedahan kebudayaan sebagai sistem simbol setidaknya mengandung empat persoalan pokok (Irwan Abdullah, 2006:2), yaitu:

1. Tentang batas-batas dari ruang budaya yang mempengaruhi pembentukan simbol dan makna yang ditransmisikan secara historis, berbagai bentuk ekspresi dan pergeseran kebudayaan yang dinamis.

2. Batas-batas dari kebudayaan yang menentukan konstruksi makna dipengaruhi oleh adanya hubungan kekuasaan yang melibatkan sejumlah aktor. Dalam hal ini, makna dibangun dan diubah dalam suatu ruang dengan serangkaian pilihan nilai dan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing aktor/agen dengan tingkat kekuasaan yang berbeda.
3. Pola hubungan kekuasaan ini mengejawantah dalam identitas kelompok dan kelembagaan, yang menjadikannya realitas objektif dan menentukan cara pandang antarkelompok.
4. Identitas yang terbentuk melalui serangkaian simbol diterima sekaligus menjadi objek pembicaraan, perdebatan, dan gugatan yang menegaskan perubahan yang mendasar dalam batas-batas kebudayaan. Sifat relatif menjadi bagian dari ruang negosiasi atas berlakunya suatu nilai dan praktik, sekaligus menjadi titik penting bagi perubahan masyarakat secara mendasar, di mana makna-makna mengalami pergeseran dari waktu ke waktu, menuju suatu arah yang bersifat *debatable* sekaligus kontestatif.

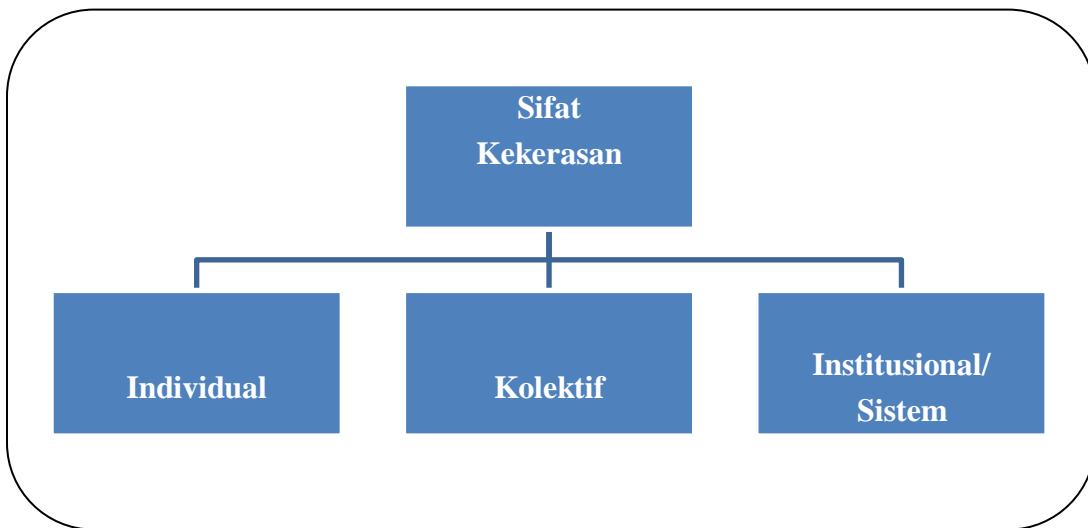
Dalam konteks perubahan, simbol kebudayaan bukan lagi sebagai pengaruh yang menentukan *code of conduct* yang dipatuhi dan memiliki daya paksa di masyarakat, melainkan menjadi alat politik bagi perjuangan kepentingan pihak-pihak yang terlibat, baik individu, kelompok, maupun institusi. Dengan demikian, memahami kebudayaan harus dimulai dengan mendefinisikan ulang kebudayaan, bukan sekedar sebagai kebudayaan generik yang merupakan pedoman yang diturunkan, namun sebagai kebudayaan yang sifatnya diferensial yang dinegosiasikan dalam keseluruhan interaksi sosial. Suatu praktik tidak dapat dijelaskan hanya dari suatu kultur fisik yang sifatnya generik, melainkan sebagai respon terhadap pengalaman hidup sehari-hari (*daily life acticity*) dalam lingkungan yang menyempit dan terbagi dalam sub budaya dengan otoritasnya masing-masing yang membedakannya dengan budaya general yang hampir tidak dipatuhi lagi (Irwan Abdullah, 2006:9-10).

Realitas kekerasan tidak dapat dipisahkan dari konteks kebudayaan yang luas. Praktik kekerasan dalam berbagai bentuk, selain merupakan kritik terhadap kemandulan dari suatu sistem sosial dan hukum, juga sebagai suatu tekanan bagi lahirnya adaptasi sistem supaya mampu memainkan fungsi kontekstual dalam arti

lokalitas maupun historisitas. Kekerasan memiliki definisi dan makna yang tidak tunggal, oleh karenanya diperlukan aneka perspektif teoretik tentangnya. Sejumlah pengertian tentang kekerasan dapat dipilah dalam tiga kelompok besar, yaitu: kekerasan sebagai tindakan aktor atau kelompok aktor, kekerasan sebagai produk dari struktur, dan kekerasan sebagai jejaring antara aktor dan struktur (Thomas Santoso, 2002). *Kelompok pertama* dipelopori ahli biologi, fisiologi, dan psikologi berpendapat bahwa manusia melakukan kekerasan karena kecenderungan bawaan (*innate*), faktor biologis, atau sebagai konsekuensi kelainan genetik. *Kelompok kedua* beranggapan bahwa kekerasan sebagai produk dari struktur mendefinisikan kekerasan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Sedangkan *kelompok ketiga* beranggapan bahwa kekerasan sebagai jejaring antara aktor dan struktur. Perspektif teoretik yang ketiga inilah yang akan digunakan dalam mengkerangkai riset ini.

Kekerasan pelajar bisa merupakan realitas yang bersifat individual dan dapat dianalisis dari perspektif psikologis. Dalam pandangan umum, kekerasan pelajar juga seringkali dilihat sebagai bentuk penyimpangan moral. Kekerasan pelajar mestinya tidak sekedar dibaca sebagai sebuah patologi sosial, namun kekerasan pelajar perlu mendapatkan tafsir yang sifatnya kultural, menyangkut reproduksi budaya dan sejarah masa lalu (*enemy images*) yang dibangun, serta tafsir yang menyangkut kolektivitas, institusional, dan sistem. Pandangan-pandangan struktural cenderung melihat problem kekerasan berkaitan dengan akses dan dimensi kekuasaan. Sedangkan menurut pandangan kaum kritis, kekerasan bukanlah semata-mata berakar pada determinisme oleh struktur, karena selalu ada ruang negosiasi untuk bisa keluar dari ketegangan-ketegangan yang dialami. Kekerasan pelajar yang terjadi saat ini juga diwarnai dengan kehadiran media yang menyediakan konten dalam tontonan yang dapat menjadi model/*prototype* kekerasan. Media bahkan bisa dianggap sebagai preferensi orang untuk bertindak brutal ketika menyaksikan kasus tentang kekerasan.

Bagan 1
Sifat Umum tentang Kekerasan



Di sisi lain, kekerasan pelajar juga perlu dibaca sebagai sebuah ekspresi kefrustasian sosial akibat dari ruang yang makin sesak dan menyempit, di mana sistem pendidikan mereproduksi sekat-sekat sehingga pelajar tidak punya ruang untuk berartikulasi. Ketika pendidikan itu sebagai sebuah sistem yang menjadi penghambat diria untuk berkreasi, ketika punya ruang sedikit saja langsung diekspresikan. Seringkali kekerasan tidak disadari sebagai tindakan yang buruk, tetapi hanya ekspresi. Rata-rata mereka baru menyesali ketika disadarkan, bahwa di balik tindakan kekerasan itu mereka sesungguhnya merugikan orang lain. Dengan demikian, kekerasan pelajar bukan semata-mata sebagai gejala psikologis, melainkan perlu dilihat sebagai suatu gejala sosial. Kekerasan dapat melibatkan aktor individual, kolektif, institusi, maupun sistem. Dalam realitasnya, tidak semua pelajar potensial melakukan kekerasan. Umumnya, pelaku kekerasan pelajar orangnya tertentu dan tidak selalu muncul sentimen koletif di dalam relasi sosial mereka. Namun demikian, kekerasan tetap perlu diurai, supaya tidak terjadi pemberan dan pemberian terhadapnya.

2. Multi Perspektif tentang Kekerasan

Secara lebih luas, kekerasan dapat dijelaskan dengan teori biologis, psikologis, dan sosiologis. Dalam perspektif sosiologis, kekerasan muncul sebagai respons tidak

langsung terhadap struktur sosial, baik oleh karena adanya kontrol sosial yang berlebihan sehingga menindas kebebasan individu yang kemudian menjadi frustasi atau karena tiadanya kontrol sosial sehingga menimbulkan kekacauan. Dalam perspektif sosiologis, pastilah menjadi anggapan banyak ahli bahwa kekerasan merupakan hasil proses belajar, yaitu suatu keterampilan yang dipelajari secara sosial (Abdul Munir Mulkhan, 2002).

Praktik sosial, menurut Pierre Bourdieu (Ritzer, 2004:523) perlu dipahami sebagai kegiatan reflektif dan reproduktif, baik dalam hal relasi-relasi sosial yang objektif maupun interpretasi-interpretasi subjektif. Pusat dari tindakan ini adalah ide tentang habitus. Tindakan memperantara habitus dan kehidupan sosial. Di satu sisi, habitus diciptakan melalui praktik (tindakan), namun di sisi lain, habitus adalah hasil tindakan yang diciptakan kehidupan sosial. Seluruh kehidupan sosial pada dasarnya bersifat praktis. Setiap masyarakat, setiap kebudayaan, dan setiap kelompok manusia yang mengakui diri mereka sebagai satu kolektivitas, memiliki teori tentang dunia dan tempat mereka di dalamnya: model tentang bagaimana dunia ini, tentang bagaimana dunia seharusnya, tentang sifat manusia, tentang kosmologi. Orang akan mengetahui sesuatu hanya ketika orang tersebut melakukan sesuatu (Jenkins, 2010:96-97).

Berbagai perspektif dapat dipergunakan untuk memahami realitas kekerasan. Penelitian yang hanya menggunakan satu perspektif saja secara semena-mena dalam memahami realitas sosial, sudah berarti gagal secara parsial dalam memahami realitas sosial sejak awal.

Tindakan kekerasan perlu mendapatkan penjelasan yang lebih substansial untuk memahami nalar sosial (*the social logic*) di balik suatu tindakan kekerasan. Untuk mengkaji realitas kekerasan pelajar terdapat beberapa perspektif, yaitu perspektif instrumental, survival, dan kultural yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Perspektif Instrumental

Dalam perspektif psikologis, Breakwell (1998) dalam bukunya “*Coping with Aggressive Behaviour*” mengemukakan bahwa kekerasan dapat bersifat emosional dan instrumental. Kekerasan instrumental merupakan tindak kekerasan untuk mencapai suatu tujuan dan cenderung sebagai perilaku yang diarahkan pada

tujuan. Dalam perspektif instrumental, kekerasan tidak pernah dilakukan demi kekerasan (Abdul Munir Mulkan, 2002). Tindakan agresif yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok dapat digolongkan menjadi a) tindakan agresi instrumental dan b) motif tindakan agresi, yang timbul sebagai respon (Solomon dalam Suhardi, 2001). Tindakan kekerasan selalu memiliki alasan, kepentingan, dan tujuan. Kekerasan memiliki proses, prospek, dan perspektif tindakan. Setiap kekerasan mengandaikan konteks kondisi, mentalitas, dan wacana kehidupan. Dalam filsafat etika setiap perbuatan manusia (*actus humanus*) memiliki kepentingannya. Dalam konteks ini, kekerasan sebagai agensi.

Penjelasan tentang kekerasan dari perspektif sosiologis menunjukkan bahwa munculnya kekerasan sebagai respons tidak langsung terhadap struktur sosial, baik karena adanya kontrol sosial yang berlebihan sehingga menindas kebebasan individu yang kemudian menjadi frustasi atau karena tidak adanya kontrol sosial sehingga mendatangkan kekacauan. Dalam konteks sosiologis, kekerasan tidak muncul begitu saja secara spontan, melainkan sebagai hasil dari proses belajar, yaitu suatu keterampilan yang dipelajari secara sosial. Sementara itu, Anthony Giddens dalam teori strukturasi mengasumsikan adanya interdependensi antara tindakan dan struktur (Abdul Munir Mulkan, 2002). Realitas merupakan produk dari interrelasi ruang dan waktu yang di dalamnya berlangsung berbagai kondisi pembentuk interaksi sosial.

Dalam perspektif instrumental, kekerasan dilakukan untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan tujuan pribadi dan kelompoknya. Dalam perspektif ini, kekerasan instrumental muncul karena tujuan-tujuan yang ingin dicapai, yang disebabkan oleh *enemy images* yang terus dibangun, kontinuitas dan warisan sejarah, spirit permusuhan, competitiveness, ekspansi teritori untuk menguasai kelompok lain, misi penundukan/penaklukan sekolah lain, dan mencari pendukung.

Penjelasan kaum konstruktivis atas gejala kekerasan telah membawa pemahaman pada hadirnya konteks eksternalitas dalam munculnya suatu tindakan kekerasan, karena peta kondisi-kondisi yang melatarbelakangi suatu peristiwa menjadi penjelasan yang penting. Tidak banyak diskusi yang memperhatikan apa sesungguhnya yang ingin dicapai dari suatu tindakan kekerasan, karena seting dan

sejarah tentang terjadinya kekerasan lebih menjadi pokok perhatian (Berger & Luckmann dalam Irwan, 2006). Tindakan kekerasan merupakan instrumen bagi tujuan-tujuan individu dan kelompok yang penggunaannya mengalami pendefinisian, pertimbangan, dan kalkulasi yang seksama. Tindakan kekerasan perlu memperoleh penjelasan yang lebih substansial untuk memahami *the social logic* dari suatu tindakan kekerasan (Irwan, 2006).

b. Perspektif Survival

Mochtar Mas'oed (2012) mengemukakan perspektif yang berbeda dengan menyebutkan bahwa kekerasan bukan semata-mata pelampiasan untuk memperoleh sesuatu atau mencapai tujuan tertentu, tetapi untuk mencegah terjadinya sesuatu yang merusak peluang untuk *survive*. Tindakan kekerasan dilakukan dalam pandangan pelakunya, bukan soal pilihan (*choice*), melainkan keterpaksaan (*necessity*). Asumsinya bahwa:

“Jika seseorang berkepentingan terhadap hasil tindakan kekerasan, maka ia akan melakukan tindakan kekerasan. Apabila lingkungan tidak mencegah, maka seseorang melakukan tindakan kekerasan”.

Jadi, kekerasan dilakukan karena seolah-olah ada dorongan lain, sehingga mau tidak mau seseorang/sekelompok orang melakukannya. Studi mikro tentang kekerasan dalam kerumunan (*crowd*) berbeda dengan studi tentang individu. Kajian tentang kekerasan perlu memperhatikan kondisi atau situasi insidental. Hakikat manusia bukan hanya diwarnai oleh keinginan dan pamrih pribadi, tetapi juga rasa takut. Manusia tidak hanya ingin kejayaan, tetapi juga menghindari kemusnahan (*survival ethics*) dan menjaga kehormatan. Dengan demikian, terjadi *security dilemma* (Mochtar Mas'oed, 2012) di mana seseorang atau sekelompok orang melakukan kekerasan karena dilema keamanan yang dihadapinya.

Sedangkan dalam perspektif survival, kekerasan pelajar terjadi karena dihalanginya peluang mereka untuk *survive*. Pelajar merasakan semacam dilema, yang menyebabkan mereka melakukan praktik kekerasan. Dalam perspektif ini, kekerasan berhubungan dengan pertahanan diri (*self defence*) atas kondisi ketidakamanan dan ketidaknyamanan yang dialami dalam kehidupan pelajar.

c. Perspektif Eksistensial

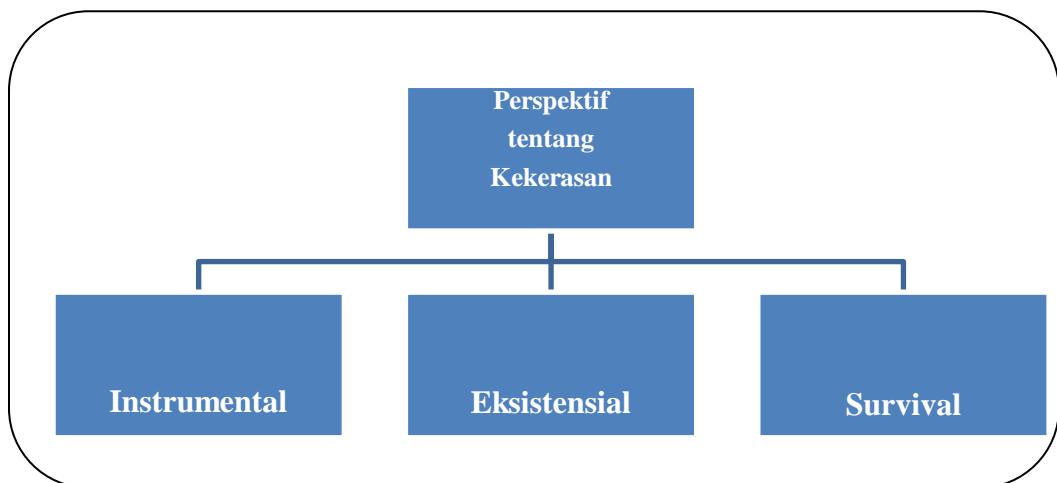
Selain penjelasan di atas, kekerasan juga menjadi keabsahan atas tindakan menampilkan identitas mengada yang bersifat eksistensialis (Mochtar Mas'oed, 2012). Kekerasan dapat terjadi karena kondisi eksistensial manusia, untuk mempertahankan kehidupannya sendiri sekaligus menghindari hambatan untuk berkembang secara positif.

Pendapat tersebut diperkuat Parkes (Irwan Abdullah, 2006) yang menyatakan bahwa: *“Violence therefore had multiple meaning”*. Maksud pernyataan tersebut adalah bahwa tindakan kekerasan merupakan instrumen bagi pencapaian tujuan individu dan kelompok yang penggunaannya mengalami pendefinisian ulang, pertimbangan, dan kalkulasi yang seksama. Pada saat kekerasan terjadi secara meluas dan intensif dalam keseluruhan proses sosial, maka kekerasan menjadi suatu keniscayaan. Kekerasan bisa jadi bukan lagi menjadi sesuatu yang menyimpang atau berada di luar norma, melainkan telah menjadi suatu mekanisme yang *built-in* dalam masyarakat dalam menjawab berbagai tantangan sendiri dengan cara-cara yang sah menurut logika dan praktik yang dianutnya.

Dalam teori spiral kekerasan (Camara, 2000) kekerasan bisa jadi telah mengalami transformasi dari *naluri/nature* berubah menjadi *budaya/culture*. Dalam konteks yang luas, konflik atau sengketa pada umumnya terjadi karena pelanggaran di setiap tahapan yang tidak segera diatasi secara tuntas. Dalam resolusi konflik, dikenal adagium yang menyatakan bahwa tumpukan atau timbunan konflik yang tidak terselesaikan secara damai, dapat berujung pada kekerasan (Lambang Triyono, 2014). Dalam konteks sosio-kultural, seringkali juga berlaku “sing uwis yo uwis” (yang sudah terjadi ya sudahlah, tidak usah diungkit-ungkit). Strategi resolusi konflik semacam ini tidak menyelesaikan, namun hanya melupakan masalah. Sengketa antar kelompok yang tidak terselesaikan hanya akan tersimpan dalam memori anggota kelompok dan jika kondisi memungkinkan, suatu saat melahirkan kekerasan yang lain. Dalam konteks sosio-budaya Indonesia, kekerasan seringkali hadir dalam praktik kehidupan sosial sehari-hari. Kekerasan seringkali muncul ketika proses sosialisasi individu memerlukan pendidikan disiplin. Pendisiplinan seperti itu seringkali dianggap umum dan tidak berlebihan.

Dalam persepektif eksistensial, kekerasan pelajar dapat dimaknai sebagai tindakan dalam kaitannya dengan habitus kekerasan. Kekerasan juga merupakan strategi untuk mengukuhkan posisi dan meneguhkan eksistensi, melalui penempatan kapital yang dimiliki, khususnya kapital sosial, budaya, dan simbolis melalui kekerasan kolektif. Hal ini terkait dengan ekspresi, reproduksi budaya kekerasan, reproduksi identitas (apa dan seberapa penting identitas bagi anak muda). Kekerasan bisa jadi tidak semata-mata dipahami sebagai penyimpangan, tetapi sebagai cara untuk yang dipakai untuk mengartikulasikan identitas. Identitas bisa menjadi akar/sumber kekerasan jika identitas tidak terartikulasikan dalam ruang. Ruang kian menyempit, beban berat di sekolah. Dalam perspektif ini, kekerasan juga terkait dengan gengsi, reputasi, membangun legitimasi, meneguhkan perbedaan, dan ekspresi frustasi sosial. Seringkali kekerasan juga merupakan reaksi sekaligus perjuangan memperebutkan ruang.

Bagan 2
Perspektif tentang Kekerasan



Kekerasan pelajar dapat ditinjau dari perspektif instrumental ketika kekerasan dilakukan karena tujuan tertentu; perspektif eksistensial ketika kekerasan pelajar merupakan ekspresi simbolis dari artikulasi potensi dan reproduksi identitas, dan perspektif survival yang melihat kekerasan pelajar sebagai tindakan survival atau mempertahankan diri.

Dalam perspektif instrumental, pelajar melakukan tindakan kekerasan dalam rangka menjaga reputasi geng dan nama sekolah, dengan cara mereka. Pelajar yang memiliki kecerdasan intelektual, bisa jadi membela sekolah melalui prestasi akademik dan tergabung dengan OSIS. Sedangkan pelajar dengan modal intelektual pas-pasan membela sekolah melalui keberanian melakukan tawuran. Keberanian anggota geng pelajar menjadi salah satu ukuran penting dalam menentukan posisi sosialnya. Dengan demikian telah terjadi transformasi dimana pelajar memahami kekerasan sebagai aksi yang keren dan gaya. Terlibat dalam kekerasan juga merupakan pengalaman yang menyenangkan di masa SMA/SMK. Bergabung ke dalam geng pelajar membuat mereka merasa dihargai dan “dianggup”. Berpartisipasi dalam geng juga merupakan suatu bentuk resistensi terhadap struktur sosial yang dominan, sebagaimana penjelasan Bourdieu tentang kecenderungan resistensi pada kelas bawah (Haryatmoko, 2013), (Hatib, 2010). Gang juga memfasilitasi kesenangan dan sosialitas sebagai ekspresi atas marginalitas yang dirasakan.

3. Konstruksi dan Reproduksi Identitas

Identitas diterjemahkan sebagai kategori sosial yang kehadirannya selalu ditandai dengan entitas diri (*self*) dan entitas yang lain/liyan (*others*) (Barker, 2000). Sebagai kategori sosial, identitas memberikan tanda pada dua bentuk: a) identitas memberi batas pembeda antara yang anggota dengan yang bukan anggota, yang terlibat dan yang tidak terlibat, inklusi dan eksklusi, b) identitas juga menunjukkan batas-batas (kepercayaan, minat, komitmen, moral, dan atribut fisik) dari bentuk pemikiran atau perilaku tertentu yang harus diikuti dan ditaati (Fearon dan Laitin, 2000). Penerjemahan identitas tersebut, menjadi relevan ketika ada entitas yang lain, maka keterlibatan dan ketidakterlibatan ini sering kali menjadi basis bagi fragmentasi. Fragmentasi masyarakat modern dibangun dari kesadaran masing-masing identitas sosial, baik yang sifatnya primordial/esensial atau identitas yang sifatnya bisa dikonstruksikan (*constructed*), seperti kelas sosial, etnis, ras, gender, seksualitas, nasionalitas, dan kelompok usia sebagai penanda sosial individual (Nurul Aini, 2011).

Identitas tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan yang menurut Foucault (19:...) selalu ada dan menyebar ke dalam agensi-agensi. Implikasi dari relasi kekuasaan ini adalah subjek yang menyandang identitas tertentu, yang ada di luar lingkaran kekuasaan seringkali menjadi subjek yang termarjinalkan, terpinggirkan. Subjek yang marjinal ini seringkali mengalami apa yang dinamakan disilusi/dissilution and displacement (keterpisahan dari dunia sosial dan kultural). Identitas yang termarjinalkan dan terpinggirkan ini juga tidak jarang menjadi basis dari konflik dan kontestasi. Politik identitas ini menjadi politik kemudian dijalankan oleh kelompok sosial yang selama ini dianggap marjinal supaya mereka bisa memperebutkan representasi identitas atau artikulasi kepentingan mereka tersalurkan.

Dalam konteks kepemudaan, anak muda bernegosiasi dengan kehidupan mereka, masa depan mereka, dan apa yang mereka lakukan dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi, seperti terungkap dalam pernyataan White & Wyn (1998) sebagai berikut:

“Young people negotiate their own lives, futures and meanings, but they do so in the context of specific social, political, and economic circumstances and processes.”

Kekerasan di sekolah (*school violence*) adalah bagian dari kekerasan remaja (*youth violence*), bahkan kekerasan yang lebih luas di masyarakat:

“Young people take seriously the question of their relationship to the wider society. Current political debate about young people’s citizenship tends to focus on what young people do not do, creating an image of young people as deficient citizens” (Kabeer, 2005:127).

Dalam hubungan generasi dalam masyarakat, kaum muda tidak hanya menjadi agen dalam pendefinisian ulang nilai-nilai sosio-kultural. Istilah kaum muda telah menunjukkan pada kisah pembangkangan atau kisah-kisah di seputar protes. Masyarakat juga memahaminya sebagai perilaku yang keluar dari nilai-nilai umum atau dari aturan normatif dalam lingkungan sosial tertentu (Bradley dalam Irwan, 2006). Hal tersebut tidak lain karena: 1) ada anggapan bahwa nilai yang menjadi milik umum seharusnya juga dimiliki oleh kaum muda (karena proses belajar), sehingga pada saat nilai tidak ditemukan, dianggap telah terjadi penyimpangan, 2)

pada saat meneliti suatu komunitas yang heterogen, berbagai kategori seperti gender, generasi, kelas telah dicampuradukkan menjadi satu.

Jika dikaitkan dengan representasi, Hebdiege (Burton, 1999) menghasilkan berbagai oposisi yang sederhana, namun dapat diakui tentang “generasi muda sebagai kesenangan” dan “generasi muda sebagai masalah”. Pemuda pembuat masalah diasosiasikan dengan penyimpangan, kejahatan, dan kekerasan. Pemuda dan kesenangan identik dengan aktivitas kala senggang (*leisure time*). Nasikun (Najib, 2013) bahkan menyebut pemuda sebagai kombinasi antara *toxic* (sumber penyakit) dan *tonic* (sumber kekuatan perubahan).

Michael Brake (Burton, 1999) juga menawarkan konsep generasi muda sebagai berikut:

- a. Generasi muda yang terhormat.
- b. Generasi muda yang melakukan pelanggaran norma/hukum.
- c. Generasi muda melakukan pemberontakan-pemberontakan kebudayaan.
- d. Generasi muda yang militan secara politik.

Sedangkan Formas melihat generasi muda didefinisikan dengan tiga cara (Burton, 1999), yaitu:

- a. Sebagai fase perkembangan fisiologis.
- b. Sebagai kategori sosial yang dibentuk oleh institusi-institusi seperti sekolah, dan untuk sebagian didefinisikan melalui ritual-ritual sebagai konfirmasi.
- c. Sebagai fenomena kebudayaan yang berpusat pada pengungkapan identitas.

Kemudian bukan sekedar sebagai suatu kriteria biologis yang membedakan kelompok berdasarkan usia atau umur kuantitatif, melainkan juga merupakan konstruksi sosial budaya yang bersifat dinamis. Dengan kecenderungan tersebut, kaum muda tidak dipahami sebagai suatu keutuhan dalam dirinya dengan pemahaman logika-logika di balik tindakan dan objek-objek yang mereka kenakan sendiri tanpa terkait dengan sistem general. Perbedaan antar generasi seolah-olah harus didefinisikan sebagai penyimpangan, padahal sesungguhnya tindakan mereka memiliki logikanya sendiri (Griffin dalam Irwan, 2006). Pandangan umum yang berlaku dengan sejumlah klaim dan stigmatisasi menyebabkan para peneliti gagal dalam melakukan empati. Tindakan kaum muda perlu dipahami sebagai praktik

otonom dari sisi subjek, karena ia memiliki keabsahannya sendiri demi suatu pemahaman (*verstehen*) sebagai proses empati. Tentu bentuk pilihan rasional mereka berada dalam suatu ruang sosial tertentu dan situasi yang mengkondisikan tindakan itu dilakukan.

Berbagai praktik kehidupan kaum muda sesungguhnya menunjukkan suatu reaksi atau protes sosial terhadap ukuran-ukuran baku dan nilai-nilai yang berlaku yang merupakan usaha aktif mereka menegosiasikan ideologi yang mereka yakini, yang berbeda dengan ideologi yang telah ada (Irwan, 2006). Penelitian tentang kekerasan pelajar menjadi penting untuk mengungkap dan mendefinisikan agen-agen dan nilai-nilai yang telah dibentuk, diawetkan, dinegosiasikan, dan diubah oleh agen. Selain itu juga perlu dikaji bagaimana kaum muda tidak hanya terpengaruh oleh serangkaian nilai dan faktor, melainkan juga bagaimana mereka memahami dan memanfaatkan setiap nilai yang mereka terima dan mereka akses.

Pada saat kekerasan terjadi secara meluas dan intensif dalam keseluruhan proses sosial, maka kekerasan menjadi suatu keniscayaan. Kekerasan bukan lagi menjadi sesuatu yang berdiri di luar pagar, melainkan menjadi suatu mekanisme yang *built-in* dalam komunitas dan masyarakat yang menjawab tantangan-tantangannya sendiri dengan cara-cara yang sah menurut *logic* dan *practic* yang dianutnya (Irwan, 2006). Realitas kekerasan, khususnya kekerasan pelajar yang terjadi sekarang ini, penjelasannya tidak semata-mata sebagai reproduksi kultur dan sejarah masa lalu, tetapi juga ada faktor media. Media sebagai preferensi bagi pelajar dalam mengenali dan mempraktikkan kekerasan. Media bisa dianggap sebagai preferensi orang untuk bertindak brutal ketika menyaksikan kasus tentang kekerasan. Dan cecapan kesan heroisme dan jenggoisme tersebut menjadi acuan dalam praktik kehidupan sosial para pelajar. Betapa pemaknaan tentang rasa sakit dan menyakiti telah berubah menjadi sesuatu yang banal (banalitas kekerasan).

Dalam beberapa tahun terakhir, media, media digital dan jaringan telah menjadi tertanam dalam kehidupan kita sehari-hari dan merupakan bagian dari perubahan berbasis luas untuk bagaimana kita terlibat dalam produksi pengetahuan, komunikasi, dan ekspresi kreatif. Pembentukan identitas sering melibatkan proses stereotip atau penyederhanaan kognitif yang memungkinkan orang untuk

membedakan dengan mudah antara diri dan lainnya, dan untuk mendefinisikan diri mereka sendiri dan kelompok mereka dengan cara yang positif (Buckingham, 2008).

Identitas menyangkut tentang bagaimana individu atau kelompok melihat dan mendefinisikan diri mereka, dan bagaimana individu atau kelompok lainnya melihat dan menentukan keberadaan mereka. Identitas terbentuk melalui proses sosialisasi dan pengaruh lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, sistem pendidikan, dan media massa.

Identity is about how individuals or groups see and define themselves, and how other individuals or groups see and define them. Identity is formed through the socialization process and the influence of social institutions like the family, the education system, and the mass media (Browne, 2008:38).

Konsep identitas merupakan salah satu hal penting, terkait dengan pembentukan identitas “kita” dan belajar tentang identitas individu dan kelompok “lain” yang dalam hubungan sosial antarsesama mereka. Dengan memiliki identitas, mereka dapat mengidentifikasi diri ketika berhubungan dengan kelompok sebaya, tetangga, orang lain, dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu identitas individu mengacu pada konteks masyarakat di mana mereka tinggal.

The concept of identity is an important one, as it only through establishing our own identities and learning about the identities of other individuals and groups that we come to know what makes us similar to some people and different from others, and therefore forms social connections with them. How you see yourself will influence the friends you have, who you will marry or live with, and the communities and groups to which you relate and belong. If people did not have an identity, they would lack the means of identifying with or relating to their peer group, to their neighbors, to the communities in which they lived or to the people they came across in their everyday lives. Identity therefore ‘fits’ individuals into the society in which they live (Browne, 2008:38).

Identitas individu, kelompok, maupun identitas keduanya, melibatkan kedua unsur pilihan pribadi dan tanggapan dan sikap orang lain. Individu tidak bebas mengadopsi identitas apapun yang mereka suka, dan faktor-faktor seperti kelas sosial mereka, kelompok etnis, dan jenis kelamin mereka cenderung mempengaruhi bagaimana orang lain melihat mereka. Melalui identitas, seseorang ingin menegaskan diri dan menginginkan orang lain untuk menerima dan mengakui mereka. Individu memiliki banyak identitas. Identitas juga dapat berubah dari waktu ke waktu.

The identity of individuals and groups involves both elements of personal choice and the responses and attitudes of others. Individuals are not free to adopt any identity they like, and factors like their social class, their ethnic group, and their sex are likely to influence how others see them. The identity that an individual wants to assert and which they may wish others to see them having may not be the one that others accept or recognize. Individuals have multiple identities, asserting different identities in different circumstances. Identities may also change over time (Browne, 2008:39).

Identitas budaya ditandai oleh sejumlah faktor seperti: ras, etnis, jenis kelamin, dan kelas. Pertanyaan perbedaan adalah emotif ; kita mulai mendengar ide-ide tentang kami dan mereka, teman dan musuh, milik dan bukan milik, kelompok dalam dan kelompok luar, yang menentukan kita dalam kaitannya dengan orang lain.

Cultural identities are marked by a number of factors: race, ethnicity, gender, and class to name but a few; they very real locus of these factors, however, is the notion of difference. The question of difference is emotive; we start to hear ideas about us and them, friend and foe, belonging and not belonging, in groups and out groups, which define us in relation to others, or the other (Clarke, 2008:510).

Sebuah pertanyaan sentral dalam perdebatan ini, apakah kita memilih identitas atau identitas berada di luar kendali kita?. Kita juga bisa bertanya apakah identitas merupakan konstruksi sosial atau bagian dari proses psikodinamik ?.

A central question in this debate, however, is: who ascribes a cultural identity, to whom and foe what reason?. Do we choose our identity, or is it beyond our control?. To further complicate this matter we could also ask whether identity is a social construction or part of a psychodynamic process.

Dalam melihat karya Frankfurt School, Franz Fanon dan Slavoj Zizek mendapati apa yang diperdebatkan mengenai inti dari identitas budaya itu adalah gagasan tentang identitas yang memiliki kaitan dengan orang lain sekaligus budaya lain. Gagasan identitas budaya menjadi lebih kuat dan lebih tegas ketika kita mendefinisikan diri kita dalam kaitannya dengan budaya lain .

In looking at the work of the Frankfurt School, Franz Fanon and Slavoj Zizek we get to what I argue is at the crux of a cultural identity: that is the notion of identity as shaped not just in relation to some other, but to the other, to another culture. The notion of cultural identity becomes much stronger and firmer when we define ourselves in relation to a cultural other (Clarke, 2008:511).

Dapat dikatakan kemudian bahwa identitas budaya adalah cair dalam kaitannya dengan keadaan sejarah dan budaya. Stuart Hall mencatat bahwa "Kita semua menulis

dan berbicara dari tempat dan waktu tertentu, dari sejarah dan budaya yang spesifik. Apa yang kita katakan selalu "dalam konteks", diposisikan. Kami mungkin memiliki beberapa identitas untuk memilih dari dalam konteks tertentu. Cara di mana orang membayangkan dunia untuk menjadi dan membayangkan cara yang lain di dunia merupakan pusat pembangunan identitas. Tidak peduli keyakinan yang mungkin lebih fiksi daripada fakta, karena imajinasi manusia merupakan pusat konstruksi identitas; karena itu beton dan memiliki konsekuensi yang sangat nyata bagi dunia di mana kita hidup.

It could be argued then that cultural identity is fluid and contingent in relation to historical and cultural circumstances. As Stuart Hall has noted: "We all write and speak from a particular place and time, from a history and a culture which is specific. What we say is always "in context", positioned. We may have multiple identities to choose from in a given context. The way in which people imagine the world to be and imagine the way that others exist in the world is central to the construction of identity. It does not matter that belief may be more fiction than fact, because the human imagination is central to identity construction; it is therefore concrete and has very real consequences for the world we live in (Clarke, 2008: 527-528).

Identitas menurut Jonathan Rutherford (Yasraf A. Pilliang, 1998) merupakan suatu mata rantai masa lalu dengan hubungan-hubungan sosial, kultural, dan ekonomi di dalam ruang dan waktu satu masyarakat hidup. Setiap individu dalam suatu masyarakat merupakan sintesis dari hubungan-hubungan yang ada di masa sekarang, dan sekaligus sejarah hubungan-hubungan di masa lalu. Dalam konteks sosial, identitas merupakan sesuatu yang dimiliki bersama oleh seseorang dengan sejumlah orang lain, dan sekaligus membedakannya dengan kelompok orang lainnya (*others*). Pada tingkat fundamental dan individual, identitas memberikan seseorang pengertian tentang lokasi dan posisi personal, sebagai titik pusat individualitas yang stabil dan mantap.

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (Yasraf A. Pilliang, 1998) mengaitkan identitas dengan proses pembentukan realitas dalam suatu hubungan sosial. Identitas merupakan elemen kunci dalam pembentukan realitas sosial-subjektif yang mempunyai hubungan dialektis dengan masyarakat. Identitas dibentuk melalui proses sosial. Sekali identitas mengkristal, ia akan dipelihara, dimodifikasi, dan bahkan

diubah melalui hubungan-hubungan sosial. Pembentukan identitas dengan demikian sangat ditentukan oleh pola-pola (perubahan) sosial.

Pendapat di atas tidak sejalan dengan pendapat Stuart Hall dan Rutherford (Yasraf A. Pilliang, 1998). Hall melihat perbincangan mengenai identitas tak lain dari perbincangan tentang perubahan abadi. Identitas tidak pernah sempurna, selalu dalam proses, dan dibangun dari dalam. Identitas merupakan proses menjadi. Identitas bukanlah sesuatu yang sudah ada melampaui waktu, tempat, sejarah, dan kebudayaan. Identitas memiliki sejarah dan mengalami transformasi terus-menerus. Dalam era kapitalisme mutakhir, pencarian identitas adalah sebuah pengembalaan tanpa akhir, yang di dalamnya tidak ada satu representasi identitas yang dominan. Identitas dibangun berdasarkan apa yang disebut filsafat diferensi, yaitu pengakuan keserbagagaman dan sekaligus ketidakberpihakan.

Ketika pelajar sedang tawuran, bisa jadi mereka melakukan *identity building*, merekonstruksi pembangunan identitas dan mereproduksi kekerasan kepada adik kelas (junior), dalam rangka menjaga reputasi geng, reputasi sekolah, gengsi, dan meluaskan/ekspansi teritori. Pembentukan identitas sering melibatkan proses stereotip atau penyederhanaan kognitif yang memungkinkan orang untuk membedakan dengan mudah antara diri dan yang lain (others), dan untuk mendefinisikan diri mereka sendiri dan kelompok mereka dengan cara yang positif (Buckingham, 2008). Identitas juga menyangkut tentang bagaimana individu atau kelompok melihat dan mendefinisikan diri mereka, dan bagaimana individu atau kelompok lainnya melihat dan menentukan keberadaan mereka. Identitas terbentuk melalui proses sosialisasi dan pengaruh lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, sistem pendidikan, dan media massa.

Identity is about how individuals or groups see and define themselves, and how other individuals or groups see and define them. Identity is formed through the socialization process and the influence of social institutions like the family, the education system, and the mass media (Browne, 2008:38).

Dalam konteks tersebut, kekerasan sebagai identitas menjadi sangat kuat dikonstruksi, dihidupi, dan diawetkan dalam kehidupan pelajar.

4. Reproduksi Kekerasan dalam Konteks Persekolahan

Permasalahan mendasar dalam pendidikan adalah bentuk-bentuk praksis pendidikan yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan pendidikan. Setiap sistem pendidikan dengan tujuannya ditentukan oleh filsafat tentang manusia dan masyarakat yang dianut sehingga tidak pernah netral ataupun bebas nilai (Haryatmoko, 2014). Maka, di balik tujuan-tujuan yang ditetapkan, tersirat suatu filsafat manusia dan masyarakat yang mendasarinya. Setidaknya, terdapat empat tujuan yang menjadi dasar idealisme pendidikan:

- a. Pemerolehan pengetahuan dan keterampilan (kompetensi) atau kemampuan menjawab permintaan pasar. Tujuan pendidikan adalah menekankan pemerolehan pengetahuan dan kemampuan untuk mempersiapkan peserta didik agar nantinya mendapatkan kesempatan kerja.
- b. Menekankan orientasi humanistik. Pendidikan diarahkan untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan penalaran untuk mempertanggungjawabkan pernyataan, keyakinan, dan tindakannya. Sasarannya ialah bisa memahami apa dan mengapa, serta meningkatkan kemampuan mengorganisasi pengalaman dalam konsep-konsep yang sistematis.
- c. Menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan keadilan. Pendidikan diarahkan untuk menyiapkan orang untuk bisa mengenali dan menjelaskan masalah yang dihadapi masyarakat. Tujuan ini tidak lepas dari dimensi hakiki politis dalam pendidikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Paulo Freire (*Pedagogy of the Oppressed*), bahwa pada hakikatnya pendidikan adalah pelibatan politik.
- d. Tumbuhnya minat dalam diri peserta didik untuk memahami secara kritis perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Peserta didik menjadi peduli terhadap masalah ketidakadilan, konflik, peka terhadap penderitaan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat.

Kompleksitas yang hadir dalam praktik pendidikan persekolahan hendaknya perlu senantiasa dipahami oleh para pendidik, calon pendidik, maupun peserta didik sehingga mereka tidak sekedar menjalankan aktivitas pedagogisnya secara pasif, melainkan senantiasa berpikir skeptis untuk mengurai problematika struktural maupun kultural yang terjadi dalam praktik pendidikan persekolahan.

Terdapat tiga model komunikasi pedagogis (Haryatmoko, 2014) yang dapat dikembangkan dalam praksis pendidikan, yaitu:

- a. Model komunikasi pedagogis dengan kompetensi objektif yang berbentuk penjelasan. Model ini menekankan pada penjelasan supaya dimengerti dan dipelajari oleh peserta didik.
- b. Bentuk komunikasi pedagogis apropiasi atau pedagogi dengan tanggung jawab tak terbatas. Dalam model komunikasi ini, proses pembelajaran sebagian besar menjadi tanggung jawab peserta didik.
- c. Model komunikasi pedagogis dialogis atau model pedagogi di mana tanggung jawab dipikul bersama. Pendekatan ini cenderung interkonstruktivis.

Teori pendidikan tidak dapat direduksi sekedar sebagai teori persekolahan.

Pemikir Kritis tentang Pendidikan (Young Pai, 1990)

	Proses Pendidikan	Praktik Pendidikan
Paulo Freire	Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia (humanis)	Memposisikan siswa sebagai individu aktif dan subjek pembelajar
Ivan Illich	Pendidikan mengarah pada formalisasi	Peran sekolah telah mendominasi masyarakat
Pierre Bourdieu	Pendidikan untuk mempertahankan posisi dominan kelas tertentu	Sekolah sebagai mekanisme reproduksi dan alat seleksi sosial

Persekolahan merupakan domain teori pembelajaran untuk membentuk rasionalitas yang mengabaikan fokus utama pada perubahan sosial, relasi kuasa, dan konflik dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Hanya dengan cara menekankan pada potensi manusia dan perjuangan transformatif, kita dapat mewujudkannya.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Young Pai (1990) berikut ini:

"Schools need to challenge the established practices, institutions, and ways of thinking and conceive new and alternative possibilities. Teachers and other educators need to reject educational theories that reduce schooling either to the domain of learning theory or to forms of technocratic rationality that ignore the central concerns of social change, power relations, and conflicts both within and outside of schools. Only in this way schools can highlight the human potential and struggle and expose the discrepancies between society as it exists and as we envision it" (Young Pai, 1990: 44)

145).

Dalam pedagogik kritis, posisi pendidik dan peserta didik adalah sebagai sesama subjek yang berelasi satu sama lain. Dalam pendidikan, pendidik perlu memahami dan memposisikan peserta didik sebagai subjek yang bersifat unik untuk mencapai kedewasaan secara bertahap (Suparno et. al, 2002:25). Masing-masing peserta didik memiliki karakteristik dan kekhususan tersendiri, memiliki potensi dan kemampuan yang tidak sama, berbeda satu dengan yang lain. Tidak ada peserta didik yang persis sama satu dengan lainnya. Peserta didik hendaknya diperlakukan sebagai subjek, bukan objek.

Dalam pedagogik kritis, pendidik dan peserta didik sama-sama memiliki peran sebagai aktor perubahan, sebagaimana pendapat Giroux dan Freire (Breuning, 2005) berikut ini:

“Teachers at all levels of schooling represent a potentially powerful force for social change. Teachers can develop pedagogical theories and methods that link self-reflection and understanding with a commitment to change the nature of the larger society. Teaching is, thus, a theoretical, intellectual, and political within the critical classroom. Students are not empty vessels, but rather are individuals with life experience and knowledge, situated within their own cultural, class, racial, historical, and gender contexts. Students arrive in the critical classroom with their individual expectations, hopes, dreams, diverse backgrounds, and lived experiences, including a long history of previous schooling and educational hegemony”.

Paulo Freire (Shor, 2001), mengandaikan pendidikan yang membebaskan. Kurikulum formal lebih banyak menceramahi peserta didik tentang demokrasi, namun tidak pernah memberikan kebebasan kepada mereka untuk mempraktikannya. Mestinya, praktik demokrasi perlu disituasikan di dalam batas pengembangan siswa. Keterarahan dan kebebasan harus diletakkan sebagai hal baru di dalam masing-masing kelas. Bukannya tetap melanggengkan dominasi pendidik atas peserta didik.

Critical Theories of the Role of Schooling

	<i>Critical</i>
Present Role	<i>Legitimatize oppressions and reinforce the roles of the subjugated; teach uncritical acceptance of the social order</i>
Future Role	<i>Develop critical literacy to have learners raise questions about their position, history, and social order for liberation for freedom, human rights, and educational and economic equality</i>

Sumber: Yong Pai, 1990.

Kini menjadi jelas akan pentingnya teologi politik pendidikan yang mampu membebaskan kaum marginal dari "ketertindasan". Dalam sebuah kelas yang membebaskan, pendidik secara bertahap menarik diri dari posisi instruktur/pelatih menjadi pengarah kekuatan. Ketika diskusi berkembang semakin berhasil mengundang inisiatif kritis, pendidik harus mendorong kemampuan swaorganisasi (*self organization*), serta partisipasi mereka dalam menyusun agenda kurikulum. Sasaran dari swaorganisasi pada kelas yang membebaskan penting untuk mengembangkan kesadaran kritis peserta didik.

Dalam teori sistem ekologi (*ecological system theory*) dari Urrie Bronfenbrenner, pendidikan merupakan pemrosesan majemuk melalui aneka forum dalam konteks persekitaran individu (Harkonen, 2007). Sistem ekologi dalam pendidikan: pendidikan merupakan pemrosesan majemuk melalui aneka fora, yaitu: mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan kronosistem.

Kekerasan mencakup berbagai bentuk kekerasan dan penyalahgunaan senjata. Korban dapat menderita cedera fisik serius, sosial, emosional, bahkan kematian. Kaum muda bisa menjadi korban, pelaku, atau saksi kekerasan (*Understanding School Violence*, 2010). Kekerasan pelajar bukan semata-mata dijelaskan melalui kultur dan sejarah masa lalu. Namun perlu dilihat juga bagaimana bekerjanya kurikulum dan berlangsungnya proses dan sistem pembelajaran. Kehidupan dan interaksi sosial di sekolah seringkali juga diwarnai oleh terjadinya distorsi komunikasi dan ketegangan-ketegangan sosial dalam kehidupan sosial pelajar yang berpotensi mengalami sumbatan (*bottle neck*). Jika tidak diurai, akan berpotensi menjadi ekspresi yang brutal. Sekolah dan guru memiliki peran sebagai *agencies* dalam menyediakan kanalisasi untuk mengurai ketegangan tersebut.

Praktik kekerasan yang terjadi merupakan implikasi dari berbagai resiko yang dihadapi oleh pelajar. Menurut Chapin & Glason (2004), terdapat resiko individu maupun lingkungan, seperti dikemukakan dalam pernyataan ini:

“Students (as a group) have risks regarding to personal risks (being the victim of violence, being the perpetrator of violence) and environment risks (violence in school)”

Kekerasan di sekolah sering dilegitimasi dengan alasan menegakkan disiplin, sebagai *corporal punishment* di kalangan siswa (Nanang, 2012). Oleh karena itu, kekerasan dapat dikatakan telah menjadi sebuah budaya yang seolah-olah menjadi mekanisme yang dilegalkan. Selain alasan menegakkan disiplin, kekerasan dalam dunia pendidikan juga dapat terjadi karena motif menunjukkan solidaritas, proses pencarian identitas atau jati diri, serta kemungkinan ada gangguan psikologis dalam diri siswa maupun guru. Sedangkan menurut Estefanía Estévez (2008), *school violence* merupakan jenis kekerasan antar siswa (anak dan remaja) yang terjadi di sekolah. Insiden kekerasan di sekolah di pusat-pusat pendidikan kini lebih sering terjadi, berawal dari situasi tertentu yang mengandung konsekuensi tertentu. Faktor-faktor penyebab kekerasan di sekolah antara lain: a) faktor individual, seperti rendahnya tingkat empati, ketidakpuasan dalam hidup, reputasi masyarakat non-konformis, dan sikap terhadap norma dan otoritas institusional; b) keluarga, yang merupakan lingkungan di mana berlangsung komunikasi orang tua-remaja, dukungan orang tua, dan kohesi keluarga; c) sekolah, meliputi kualitas lingkungan kelas, pertemanan, relasi guru-siswa, penerimaan sosial dan penolakan sebaya; dan d) sosial, menyangkut juga efek media massa, internet, video games.

Kekerasan pelajar juga bisa terjadi karena rasa setia kawan, balas dendam, salah paham, merasa terusik, ataupun sebab-sebab sepele lainnya (Abd. Rahman Assegaf, 2004). Di lingkungan SMA, kasus tawuran bahkan sampai menyebabkan korban jiwa. Pemicu kekerasan pelajar bisa jadi awalnya merupakan persoalan pribadi yang berkembang dan meluas menjadi permasalahan kelompok. Adanya rasa ketersinggungan salah satu pihak seringkali berbuntut pada pemukulan. Sebagai akibatnya, muncul solidaritas sesama teman untuk melakukan aksi balasan yang muncul lebih keras daripada aksi pertama. Begitu aksi kekerasan susulan tidak diselesaikan, muncul kekerasan susulan berikutnya.

Clive Harber (2005) membahas bahwa sekolah bisa menjadi tempat yang berbahaya bagi pelajar karena mereka dapat mereproduksi kekerasan sosial di lingkungan sekolah mereka. Harber memperkenalkan tiga kemungkinan hubungan antara sekolah dan masyarakat.

- ✚ Sekolah sebagai konstruksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut perspektif ini, pendidikan merupakan hal yang baik bagi individu karena mengembangkan sikap sosial warga secara partisipatif. Menurut Harber, ini merupakan pandangan dominan dalam wacana global tentang pendidikan.

“The first constructs schooling as beneficial to society. According to this perspective, schooling is good for the individual because it develops participative citizens with a social attitude. For Harber, this is the predominant view in the global discourse on education”

- ✚ Perspektif kedua memahami sekolah sebagai lokus tempat berlangsungnya reproduksi kesenjangan sosial yang ada.

“The second perspective understands schooling as reproducing existing social inequalities”.

- ✚ Perspektif ketiga lebih melihat sekolah sebagai lokus yang berbahaya.

“The third perspective goes further and sees schooling as sometimes actively harmful. He pointed out that there is truth to all three of these perspectives. However, it is the third perspective – the argument that violence is systematically generated within and by schools – that formed the core of Harber’s presentation”.

Secara menggelitik, Clive Harber (2005) bahkan melontarkan pertanyaan berikut:

"Ketika Anda tanyakan kepada sejumlah murid tentang apa yang mereka sukai dan apa yang tidak mereka sukai tentang sekolah, jawaban yang lebih banyak muncul adalah mereka tidak suka sekolah”.

Maksud argumen Harber di atas adalah bahwa sekolah umumnya mempromosikan respon negatif kepada siswa. Hal ini meliputi ketahanan aktif dan agresif pada lingkungan sekolah, pengucilan, perlawanan pasif, pembolosan, *drop-out*, dan fobia sekolah. Dalam mencari akar kekerasan di sekolah, Harber menunjuk pada struktur sistem persekolahan (*schooling*). Dia menjelaskan bahwa secara umum kebanyakan sekolah lebih mencerminkan model otoriter daripada model demokrasi. Di lingkungan sekolah lebih sering dipromosikan tentang pendidikan untuk melaksanakan kontrol sosial (*social control*) daripada pendidikan untuk membangun kesadaran kritis para pelajar. Pendidikan untuk kontrol sosial bertahan lama karena salah satu tujuan sekolah adalah menciptakan kedisiplinan siswa. Harber memperingatkan bahwa otoriterisme di sekolah lalai mengajarkan kepada

anak tentang bagaimana mereka mengembangkan nilai-nilai dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Harber menyatakan bahwa sekolah tidak secara otomatis menguntungkan individu (siswa) maupun masyarakat. Hal demikian menunjukkan betapa terdapat sebuah entitas yang paradoks dalam konteks persekolahan.

That to say, the values that schools are being urged to give primacy to - greed, competition, individualism, consumption, marketization as well as docility and compliance- are precisely the kind of values that construct hierarchical values of one kind or another that permit, license, and legitimate violence and damage on/by teachers, as well as on/among students (Smyth, et al, 2014)

Dalam buku *The Socially Just School*, John Smyth (2014) menuliskan salah satu chapter tentang *Wounded and Damaged by Schooling*. Dapat dikatakan bahwa nilai-nilai yang diutamakan di sekolah cenderung memberikan penekanan pada keserakahan, persaingan, individualisme, konsumsi, marketisasi serta kepatuhan yang memungkinkan terjadinya kekerasan, baik oleh guru, maupun di kalangan siswa

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu direfleksikan kembali tentang peran sekolah. Seperti dituntut oleh Kingeri (1998), sistem persekolahan perlu menyediakan ruang yang aman bagi para siswa untuk berinteraksi di sekolah. Sekolah perlu melakukan identifikasi problema-problem yang mungkin terjadi untuk mencegah dan mengurangi kekerasan di sekolah. Dalam sebuah tulisannya, Dimitriadis & Cameron (1999) juga mengemukakan bahwa para kritikus telah mencoba menyampaikan pesan korektif kepada sekolah karena dalam kenyataannya sekolah telah menjadi situs bagi terjadinya kekerasan fisik maupun simbolik. Bahkan di sekolah juga, para pelajar mendapati pengalaman kekerasan dalam berbagai cara, di dalam maupun di luar kelas, melalui sistem persekolahan dan kurikulum.

Terkait dengan praktik kekerasan di sekolah, terdapat sejumlah mitos yang berkembang (Astor et.all., 2010), antara lain :

1. *Fatal victimization on school grounds*
2. *Weapons on school grounds*
3. *Expulsion for weapons and zero tolerance*
4. *School physical fights*

5. *Other nonfatal forms of violence*
6. *Gang activity at school*

Menghadapi kenyataan terjadinya kekerasan di sekolah, Astor et.al (2010) mengemukakan tentang pentingnya dilakukan penelitian pendidikan yang dapat mengatasi kekerasan di sekolah melalui tahapan sebagai berikut:

1. *Examining gaps in theoretical, conceptual, and basic research on the phenomena of school violence*
2. *Reviewing key issues in the design and evaluation of evidence-based practices to prevent school violence*
3. *Suggesting new directions for a translational science agenda that can inform policy and practice*

Dalam buku *The Socially Just School: Making Space for Youth to Speak Back*, disebutkan bahwa anak muda tidak berada dalam kevakuman sosio-politik, mereka terpengaruh oleh berbagai kejadian dan proses yang sangat cepat. Anak muda adalah agen perubahan, bukan sekedar saksi bisu. Mereka adalah subjek aktif, bukannya objek pasif yang hanya menunggu orang lain untuk melakukan sesuatu, berpikir, dan berbicara. Yang menarik dalam buku tersebut, sekolah membawa efek negatif karena sebagai *toxic and inhospitable places*, yang menyebabkan terjadinya malapetaka dan kerusakan akibat sekolah (*wounded and damaged by schooling*).

5. Kekerasan Pelajar dalam Perspektif Teoretik Foucault, Bourdieu, dan Debord

Pendidikan tidak dipahami sekedar sebagai *transfer of knowledge* dan *transfer of value* saja. Di dalam pendidikan terjadi kontestasi, di mana terdapat persaingan dan perjuangan dalam interaksi yang memunculkan pemenang. Dalam kontestasi, terdapat beberapa pihak dengan kepentingannya masing-masing yang saling berkompetisi maupun bernegosiasi. Dalam kontestasi tersebut, terdapat satu proses sosial yang bersifat konstruktif, akomodatif, dan resisten. Kontestasi ini berlangsung dalam sebuah relasi sosial di mana di dalamnya terjadi saling mendukung, berjuang, bersaing, dan menghancurkan (Pradipto, 2007).

Gagasan Foucault mengenai kekuasaan menjelaskan bahwa konstelasi kekuasaan menyebar dan bekerja dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam

pendidikan. Bagi Foucault, kekuasaan bekerja di dalam proses pembentukan kekuasaan. Kuasa itu dipraktikkan, kuasa itu ada di mana-mana, menyebar, tidak memusat, dan tidak dapat dilokalisir. Kuasa menentukan susunan, aturan-aturan, dan hubungan-hubungan dari dalam, seperti hubungan keluarga, hubungan seksualitas, media komunikasi, dan pendidikan. Kekuasaan selalu terartikulasikan melalui pengetahuan dan pengetahuan memiliki efek kekuasaan.

Kekerasan di sekolah merupakan segala bentuk aktivitas kekerasan di lingkungan sekolah atau dalam konteks sekolah, termasuk kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan tawuran pelajar. Kekerasan fisik adalah bentuk paling umum dari kekerasan yang berhubungan dengan kekerasan di sekolah. Ada banyak alasan mengapa terjadi kekerasan di sekolah. Hal ini terutama karena adanya pelaku-pelaku (aktor) potensial dalam lingkungan sekolah (arena). Pelaku tersebut mencoba untuk mendominasi dan “menjinakkan” siswa lain yang bisa berakhir dalam perkelahian. Namun demikian, orang tua, guru, pihak sekolah dan teman-teman juga memiliki peran dalam mempengaruhi kekerasan di sekolah.

Dalam karyanya *Discipline and Punish*, Michel Foucault (Ritzer, 2012:1050) melihat lebih banyak pada genealogi kekuasaan dan tidak lagi pada strukturalisme, wacana, dan sebagainya. Ia juga mengemukakan bahwa kekuasaan dan pengetahuan secara langsung menyiratkan satu sama lain. Ia mengerahkan perhatiannya pada suatu periode ketika penyiksaan terhadap tahanan diganti dengan kontrol atas mereka dengan menggunakan peraturan-peraturan penjara. Sistem peraturan yang muncul menggantikan penyiksaan bersifat lebih teratur, lebih efektif, lebih konstan, dan lebih detail pada efeknya. Sistem baru tersebut dirancang untuk lebih manusiawi, tetapi untuk menghukum dengan cara lebih baik, memasukkan kekuasaan untuk menghukum secara lebih mendalam ke dalam tubuh masyarakat. Teknologi kekuasaan yang baru dalam memberi hukuman seperti itu terjadi lebih dulu dalam proses penyimpangan, lebih banyak, lebih birokratis, lebih efisien, lebih tidak personal, lebih bervariasi, lebih serius, dan melibatkan pengawasan tidak hanya kepada para pelaku kriminal, tetapi seluruh masyarakat.

Teknologi baru tersebut, teknologi kekuasaan disipliner, didasarkan pada model militer. Teknologi itu melibatkan bukannya sebuah sistem kekuasaan tunggal

yang sangat melingkupi, melainkan sebuah kekuasaan-kekuasaan mikro. Foucault (Ritzer, 2012:1051) menggambarkan mikro-fisik kekuasaan dengan titik konfrontasi yang tidak terhingga banyaknya. Kemampuan untuk membuat penilaian yang menormalisasi dan menghukum mereka yang melanggar norma. Dengan demikian, seseorang bisa saja dinilai secara negatif dan dihukum berdasarkan dimensi waktu (karena terlambat), aktivitas (karena tidak memperhatikan), dan perilaku (karena tidak sopan). Penggunaan penyelidikan untuk mengamati subjek dan membuat penilaian yang menormalisasi tentang orang. Instrumen kekuasaan disipliner yang ketiga ini melibatkan dua instrumen lainnya.

Foucault tidak sekedar berpandangan negatif terhadap masyarakat disipliner, ia melihat bahwa hal itu juga memiliki konsekuensi positif. Ia melihat disiplin berfungsi dengan baik dalam lingkup masyarakat militer dan di berbagai pabrik industri. Foucault memiliki ketakutan yang sungguh-sungguh terhadap menyebarluasnya disiplin, karena hal itu mulai terlihat masuk ke dalam jaringan Negara-polisi, sehingga akan menjadikan seluruh masyarakat sebagai bidang persepsi dan objek disiplin. Perubahan itu pada gilirannya membawa serta pemikiran tentang normalitas dan moralitas (Ritzer, 2012:1052). Petugas penjara dan polisi kemudian menjadi pihak yang menilai normalitas dan moralitas para tahanan. Pada akhirnya, kemampuan untuk menilai tersebut diperluas pada psikiater dan pengajar di sekolah. Mode baru penaklukan tersebut bahwa orang didefinisikan sebagai objek pengetahuan dan objek wacana ilmiah.

Foucault menaruh perhatian pada cara pengetahuan dalam melahirkan sejumlah teknologi yang menerapkan kekuasaan. Dalam konteks ini, ia berhadapan dengan *panopticon* (Ritzer, 2012:1053). *Panopticon* adalah sebuah struktur atau bangunan yang memberikan pada petugas kemungkinan memiliki pengawasan secara menyeluruh, bahkan bukan sekedar adanya bangunan dan petugas akan membatasi para kriminal. *Panopticon* dapat berupa sebuah menara yang terletak di tengah-tengah sebuah bangunan penjara yang melingkar, sehingga dari tempat itu dapat memeriksa semua sel. *Panopticon* adalah sumber kekuasaan yang sangat besar bagi petugas penjara, karena bangunan tersebut memberikan mereka kemungkinan pengawasan secara total. Jauh lebih penting, kekuasaannya menjadi semakin kuat para tahanan

menjadi pengontrol diri mereka sendiri, mereka dengan sendirinya berhenti melakukan berbagai hal karena mereka takut bahwa mereka bisa ketahuan penjaga. Di sinilah letak keterkaitan antara pengetahuan, teknologi, dan kekuasaan. Dalam konteks persekolahan, sekolah merupakan entitas di mana peraturan pendisiplinan berlangsung dan aturan tata tertib berlaku.

Karena kontestasi di sekolah dapat bersifat mendukung, berjuang, bersaing, dan menghancurkan, bisa jadi kekerasan pelajar di sekolah juga merupakan kontestasi dalam rangka memperjuangkan identitas pelajar. Pelajar memiliki identitas yang melekat dengan konteks sekolah. Predikat tersebut berimplikasi pada pemosision mereka dalam relasi guru-murid dalam pembelajaran di kelas, maupun relasi antar siswa dalam kontestasi berbagai kepentingan. Merupakan upaya yang tidak mudah untuk mengatasi fenomena kekerasan pelajar di sekolah tanpa mengkaji secara teoretik maupun konseptual melalui penelitian mendalam. Setelah mengurai akar kekerasan pelajar di sekolah, dapat ditemukan strategi yang efektif untuk mencegah kekerasan sehingga tidak menjadi siklus yang berulang. Untuk hasil yang solutif, perlu dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara terus menerus. Selanjutnya, temuan riset ini dapat direkomendasikan bagi para pengambil kebijakan.

Sedangkan menurut Bourdieu, relasi antara aktor dan struktur terjalin secara dialektik, saling bertaut dalam suatu praktik sosial. Demikian juga dengan arena yang merupakan jaringan hubungan antar posisi/pendirian objektif yang ada di dalamnya. Keberadaan hubungan ini terlepas dari kesadaran dan kemauan individu. Arena bukanlah interaksi atau ikatan arena bukanlah intersubjektif antara individu. Penghuni posisi mungkin agen individual atau lembaga, dan penghuni posisi ini dikendalikan oleh struktur arena. Dalam kehidupan sosial, terdapat sejumlah arena yang semi otonomi, dan semuanya dengan logika khususnya sendiri-sendiri, dan semuanya membangkitkan keyakinan di kalangan aktor mengenai sesuatu yang dipertaruhkan dalam arena (Ritzer, 2004:524-525).

Bourdieu melihat arena sebagai sebuah arena pertarungan. Arena adalah juga merupakan arena perjuangan kelas. Struktur arenalah yang menyiapkan dan membimbing strategi yang digunakan oleh penghuni posisi tertentu, baik secara individual maupun kolektif, yang mencoba melindungi atau meningkatkan posisi

mereka untuk memaksakan prinsip penjenjangan sosial yang paling menguntungkan bagi produk mereka sendiri. Arena adalah sejenis pasar kompetisi di mana berbagai jenis modal (ekonomi, kultur, sosial, dan simbolik) digunakan dan disebarluaskan. Arena juga merupakan arena politik (kekuasaan) yang sangat penting; hierarkhi hubungan kekuasaan di dalam arena politik membantu menata semua arena yang lain (Ritzer, 2004: 525).

Menurut Pierre Bourdieu, sekolah merupakan tempat yang paling tepat untuk menyuburkan terjadinya praktik-praktik kekerasan simbolik (Nanang Martono, 2012). Kekerasan simbolik sulit dikenali, namun seringkali terjadi. Keberadaan kekerasan bahkan dianggap sebagai gejala yang wajar, sehingga sebagian besar orang menerima begitu saja, sebagai korban kekerasan yang secara suka rela menjadi objek dan korban kekerasan. Kekerasan simbolik yang terjadi di sekolah memiliki mekanisme tertentu. Itulah mengapa, kekerasan pelajar perlu dibaca tidak hanya dari satu dimensi, karena kekerasan simbolik dapat menjadi pintu masuk bagi kekerasan-kekerasan dalam bentuk yang lain.

Bourdieu juga meyakini bahwa sekolah merupakan tempat yang paling tepat untuk menyuburkan terjadinya praktik-praktik kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik bukanlah kekerasan fisik maupun psikologis. Jika kekerasan fisik dan psikologis ini wujudnya dapat dengan mudah dikenali, maka kekerasan simbolik sangat sulit dikenali. Namun kekerasan ini akan terjadi setiap saat, tanpa disadari bahkan seringkali dianggap sebagai gejala yang sangat wajar, sehingga mereka rela menjadi objek dan korban kekerasan (Nanang Martono, 2012). Bagi Bourdieu, kekerasan simbolis merupakan pintu masuk bagi kekerasan psikologis dan fisik secara lebih mudah.

Bourdieu (Ritzer, 2004: 525) menyusun tiga langkah proses untuk menganalisis arena:

- Langkah pertama, menggambarkan keutamaan arena kekuasaan (politik) untuk menemukan hubungan setiap arena khusus dengan arena politik.
- Langkah kedua, menggambarkan struktur objektif hubungan antar berbagai posisi di dalam arena tertentu.

- Langkah ketiga, analis harus mencoba menentukan ciri-ciri kebiasaan agen yang menempati berbagai tipe posisi di dalam arena.

Posisi berbagai agen dalam arena ditentukan oleh jumlah dan bobot relatif dari modal yang mereka miliki. Bourdieu bahkan menggunakan perbandingan kekuatan militer untuk melukiskan arena. Arena dikatakan sebagai benteng strategis untuk dipertahankan dan direbut dalam arena perjuangan. Kapital-lah yang memungkinkan orang untuk mengendalikan nasibnya sendiri maupun nasib orang lain (Bourdieu, 2004: 525).

Bourdieu (Ritzer, 2004:525-526) membahas empat tipe kapital, yaitu:

- Modal ekonomi
- Modal kultural, meliputi berbagai pengetahuan yang sah
- Modal sosial, terdiri dari hubungan sosial yang bernilai antara individu
- Modal simbolik, berasal dari kehormatan dan prestise seseorang

Penghuni posisi dalam arena menggunakan berbagai strategi. Gagasan ini sekali lagi menunjukkan bahwa menurut Bourdieu, aktor memiliki derajat kebebasan tertentu. Habitus tidak meniadakan peluang untuk membuat perhitungan strategis di pihak agen. Strategi tidak mengacu pada tujuan dan rencana untuk mengejar tujuan yang sudah diperhitungkan, tetapi mengacu pada perkembangan aktif garis tindakan yang diarahkan secara objektif yang menaati aturan dan membentuk pola yang koheren dan secara sosial dapat dipahami, meskipun tidak mengikuti aturan yang ditetapkan secara sadar atau tertuju pada tujuan yang diterapkan sebelumnya oleh seorang penyusun strategi. Melalui strategi itulah, penghuni posisi itu berupaya secara individual atau kolektif melindungi atau meningkatkan posisi mereka dan berupaya memaksakan prinsip perjenjang yang paling menguntungkan terhadap produk mereka sendiri. Strategi agen tergantung pada posisi mereka dalam arena (Ritzer, 2004:256).

Dalam menekankan pentingnya habitus dan arena, Bourdieu menolak untuk memisahkan antara metodologi individualis dan metodologi menyeluruh, dan menerima pendirian yang akhir-akhir ini disebut sebagai relasionisme metodologis. Bourdieu memusatkan perhatian pada hubungan antara habitus dan arena. Hubungan ini berperan dalam dua cara. Di satu sisi, arena mengkondisikan habitus; di sisi lain, habitus

menyusun arena, sebagai sesuatu yang bermakna, yang memiliki arti dan nilai (Ritzer, 2004:526-527).

Bourdieu tidak hanya berusaha membangun sistem teori abstrak. Ia pun menghubungkannya dengan serentetan pemikiran empiris dan dengan cara demikian terhindar dari perangkap intelektualisme murni. Penerapan pendekatan teoretisnya dapat ditemukan dalam studi empiris tentang distingsi (*distinction*) yang meneliti preferensi estetis antara kelompok berlainan dalam suatu masyarakat secara menyeluruh (Ritzer, 2004:527). Kekerasan dalam konteks ini berarti perjuangan agen dalam memperebutkan sumber pertaruhan atau modal dalam arena sosial sekolah.

Skema teoretik Bourdieu (Jenkins, 2010:98-102) menunjukkan bahwa praksis berada dalam ruang dan waktu. Waktu dan logika atasnya, dikonstruksi secara sosial pada suatu waktu dan terjadi dalam ruang tertentu. Realitas kekerasan pelajar perlu dipahami dari perspektif *space* (ruang), karena dapat memberikan penjelasan tentang negosiasi pemuda dengan lingkungan kitarannya. Penjelasan tentang *space* dan *place* dalam memahami pemuda diperlukan untuk melihat proses negosiasi pemuda dengan kebijakan publik, misalnya di sekolah, di tempat publik, dan lain-lain. Dalam konteks pelajar, fenomena maraknya perkelahian pelajar, geng motor, tawuran antar kampung, patut diduga bermuara pada *setting* kebijakan publik yang gagal menegosiasikan keagensian pemuda sehingga membuka kontestasi ruang (*space*) yang keras antara pemuda versus pemerintah maupun antarpemuda sendiri (Subando Agus Margono, 2012).

Perkelahian pelajar yang marak di kota besar dapat dijelaskan melalui adanya beberapa ruang yang perlu dicermati. Misalnya dalam ruang kelas para pelajar seringkali ditempatkan sebagai objek pendisiplinan oleh guru. Hal tersebut berimplikasi pada relasi yang konflikual, mengingat semangat *peer group* dari pelajar tidak selamanya seirama. Ketika ruang relasi horizontal dan vertikal terganggu, pelajar mencoba mencari ruang lain dalam rangka mengkonstruksi diri mereka dengan spirit kemudaannya. Ruang di luar sekolah menjadi zona untuk mengamanakan eksistensi tersebut. Kekerasan sangat mungkin menjadi cara konstruksi yang baru ketika di luar sekolah mereka kerap berhadapan dengan zona ketertiban. Analisis spasial diperlukan

untuk memahami konstruksi tentang relasi kuasa, *place*, identitas, dan kontestasi yang perlu dimaknai (Subando Agus Margono, 2012).

Habitus dengan demikian beroperasi berdasarkan logika praktik (*logic of practice*) yang diatur oleh sistem klasifikasi. Praksis, sebagai fenomena sosial yang tampak dan objektif, tidak dapat dipahami di luar konteks ruang dan waktu. Segala analisis praksis yang memadai harus memperlakukan temporalitas sebagai karakteristik sentral di dalam inti analisisnya. Praksis terjadi karena terdapat nalar praksis/logika praksis. Dalam analisis etnografisnya, Bourdieu mendeskripsikan keterkaitan antara disposisi, kepentingan, dan cara menjalankan yang diciptakan secara kultural, pada satu sisi, dan pada sisi lain, keterampilan individu dan kompetensi sosial, kendala keterbatasan sumber daya dan modal, konsekuensi yang tidak disengaja yang mengganggu berlangsungnya serangkaian transaksi, idiosinkrasi, dan kegagalan personal, dan beban sejarah hubungan antara individu yang bersangkutan dengan kelompok, di mana mereka menganggapnya sebagai anggota (Jenkins, 2010:103).

$$\text{Praktik} = (\text{Habitus} \times \text{Modal}) + \text{Ranah}$$

Menurut Bourdieu, kekerasan berada dalam lingkup kekuasaan. Dengan demikian, kekerasan merupakan hasil dari sebuah praktik kekuasaan. Kekerasan simbolik adalah salah satu konsep penting dalam ide teoretis Bourdieu. Makna konsep ini terletak pada upaya aktor-aktor sosial dominan menerapkan suatu makna sosial dan representasi realitas yang diinternalisasikan kepada aktor lain sebagai sesuatu yang alami dan absah. Kekerasan ini bahkan tidak dirasakan sebagai sebuah bentuk kekerasan, sehingga dapat berjalan efektif dalam praktik dominasi sosial. Kekerasan simbolik dilakukan dengan mekanisme penyembunyian kekerasan yang dimiliki menjadi sesuatu yang diterima sebagai sesuatu yang seharusnya memang demikian (Nanang, 2012). Proses kekerasan simbolik salah satunya dapat berlangsung melalui proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah.

Bourdieu (Nanang, 2012) mengkaji dinamika pendidikan dengan mulai mengenalkan konsep *cultural reproduction*. Analisis Bourdieu tersebut melihat praktik pendidikan dalam masyarakat modern. Pendidikan merupakan sebuah alat untuk mempertahankan eksistensi kelas dominan. Sekolah pada dasarnya menjalankan proses

reproduksi budaya. Sebagai mekanisme sekolah dalam hubungannya dengan institusi yang lain, untuk membantu mengawetkan ketimpangan ekonomi antar generasi.

Di sekolah dapat terjadi berbagai bentuk kekerasan simbolik. Bourdieu meyakini bahwa sekolah merupakan tempat yang paling tepat untuk menyuburkan terjadinya praktik-praktik kekerasan simbolik ini. Kekerasan simbolik bukanlah kekerasan fisik maupun psikologis. Jika kekerasan fisik dan psikologis ini wujudnya dapat dengan mudah dikenali, maka kekerasan simbolik sangat sulit dikenali. Namun kekerasan ini akan terjadi setiap saat, tanpa disadari. Keberadaan kekerasan ini bahkan sering kali dianggap sebagai gejala yang sangat wajar, sehingga sebagian besar orang akan menerima begitu saja, mereka seolah-oleh bersedia menempatkan diri mereka sebagai korban kekerasan simbolik dengan lapang dada, mereka rela menjadi objek dan korban kekerasan (Nanang Martono, 2012). Pelajar mendapati pengalaman kekerasan simbolis di sekolah. Kekerasan simbolis merupakan pintu masuk bagi kekerasan psikologis dan fisik secara lebih mudah.

Dalam karyanya, Bourdieu mencoba menunjukkan bahwa kultur dapat menjadi sasaran studi ilmiah yang masuk akal. Ia mencoba menyatukan kembali antara pengertian kultur tinggi (*high-culture*) dan pengertian kultur menurut antropologi yang memperhatikan seluruh bentuknya, baik yang tinggi maupun yang rendah (*folk-culture*). Lebih khusus lagi, Bourdieu mengembangkan antara selera kesopanan dan selera makan paling mendasar dalam karyanya (Ritzer, 2004:527).

Karena arena dan habitus khususnya secara struktural tidak berbeda, preferensi kultur berbagai kelompok dalam masyarakat (terutama kelas dan fraksi kelas) merupakan sistem yang saling berkaitan. Bourdieu memusatkan perhatian pada perbedaan dalam selera keindahan antara berbagai kelas sosial terhadap bermacam-macam objek kultural yang mengandung nilai keindahan. Temuannya menunjukkan bahwa selera keindahan berbagai kelas sosial cenderung berbeda-beda secara signifikan. Selera ternyata adalah juga praktik yang antara lain membantu memberikan seorang individu maupun orang lain, pemahaman mengenai posisinya dalam tatanan sosial. Selera membantu menyatakan orang lain yang memiliki preferensi serupa dan membantu membedakan mereka dari orang lain yang mempunyai selera berlainan. Melalui penerapan habitus dan selera, orang menggolong-golongkan objek dan

sekaligus mereka berada dalam proses menggolong-golongkan diri mereka sendiri (Ritzer, 2004:527).

Ada dua arena yang saling berkaitan yang terlibat dalam situasi Bourdieu tentang selera, yaitu: hubungan kelas (terutama dalam fraksi-fraksi kelas dominan) dan hubungan kultur. Ia melihat arena sebagai serangkaian posisi di mana berbagai permainan dilakukan. Tindakan yang dilakukan oleh agen (individu atau kolektif) yang menduduki posisi khusus ditentukan oleh struktur arena, ciri-ciri posisi, dan kepentingan yang berkaitan dengan posisi itu. Arena juga merupakan permainan yang melibatkan posisi diri sendiri dan penggunaan berbagai strategi yang memungkinkan orang untuk memenangkan permainan. Selera adalah sebuah peluang, baik untuk mengalami maupun untuk menegaskan posisi seseorang di dalam arena. Namun, arena kelas sosial besar pengaruhnya terhadap kemampuan orang untuk memainkan permainan ini; mereka lebih besar kemampuannya untuk mempertahankan selera mereka sendiri dan menentang selera orang yang berada di kelas yang lebih rendah. Dengan demikian, peran kultural berkaitan dengan tindakan kelas sosial dan arena kultural itu sendiri bertingkat dan menciptakan tingkatan (Ritzer, 2004:528).

Bourdieu juga menghubungkan selera dengan habitus. Selera dibentuk oleh habitus yang berlangsung lama; bukan dibentuk oleh opini dangkal dan retorika. Preferensi orang terhadap aspek keduniawian kultur seperti pakaian, perabot rumah tangga, atau masakan pun dibentuk oleh habitus. Bahkan habitus ini cenderung: "menempa kesatuan kelas tanpa sengaja". Bourdieu selanjutnya menyatakan bahwa "selera adalah tukang pencari jodoh"... dengan selera, habitus tertentu memperkuat afinitasnya dengan habitus lain. Secara dialektika, jelas bahwa struktur kelaslah yang membentuk habitus (Ritzer, 2004:528).

Dalam konteks perkembangan media yang kian pesat, teori *Spectacle of the society* atau "masyarakat tontonan," yang dikemukakan oleh Guy Debord relevan untuk mengkaji realitas kekerasan pelajar. Pemikiran Guy Debord memiliki dampak yang cukup besar terhadap perkembangan teori sosial dan budaya kontemporer. Douglas Kellner, seorang kritikus media yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Guy Debord mengatakan bahwa konsep *spectacle of the society* ini relatif dapat diterima dan dikembangkan secara pesat, tidak hanya di kalangan akademis, namun menjadi

alternatif bacaan bagi kelompok subkultur dewasa ini. Guy Debord mendefinisikan masyarakat tontonan sebagai suatu bentuk tampilan yang berupaya melakukan identifikasi melalui relasi sosial dari seluruh aspek kehidupan manusia. Dengan demikian *tontonan (spectacle)* bukanlah koleksi citra (*image*), melainkan relasi sosial yang dimediasi melalui citra. Relasi sosial telah bergeser jauh menjadi komoditas dalam dunia tontonan.

“The spectacle is not a collection of images, but a social relation among people, mediated by images” (Debord, 2002).

Masyarakat tontonan (*spectacle society*) adalah masyarakat yang hampir segala aspek kehidupannya dipenuhi oleh berbagai bentuk tontonan, dan menjadikannya sebagai rujukan nilai dan tujuan kehidupan. Penampakan (*appearance*) adalah kualitas objek yang secara langsung dapat ditangkap oleh intuisi, untuk membedakannya dengan realitas yang sesungguhnya, yang berada di luar jangkauan intuisi.

Komoditas bergerak secara otonom untuk memperdaya dan mengambil-alih segala aspek kehidupan. Kehidupan yang ditandai dengan relasi komoditas juga telah menyihir penontonnya untuk menjiplak dan memproduksi ulang (mereproduksi) citra-citra yang dipertontonkan. Kekuatan citra dalam masyarakat tontonan mampu menggerakkan dan memotivasi individu, seolah bertindak seperti dihipnotis. Segala sesuatu yang dicitrakan (abstrak) dipandang paling rasional. Rutinitas kehidupan sehari-hari (*everyday life*) dikonstruksi dalam lingkup masyarakat konsumen, melipatgandakan citra ilusi, diproduksi sekaligus dikonsumsi oleh masyarakat (Debord, 2002).

Menurut Douglas Kellner, media sebagai industri hiburan, tak ubahnya adalah *spectacle* itu sendiri, yang melipatgandakan keuntungan melalui promosi (iklan). Maka mediapun layak disebut “pasar”, tidak hanya sebagai tempat menjual produk yang sifatnya material, namun bergeser menjadi arena produksi citra. Jika diamati argumentasi yang dibangun oleh Kellner di atas, sesungguhnya merupakan turunan langsung dari teori Guy Debord pada kajian *spectacle society*. Di sini Debord mencoba menjejaki aplikasi komoditas fetisisme dalam relasi-relasi sosial kehidupan, termasuk media massa kontemporer. Debord mengamati bahwa perkembangan kapitalisme semakin mendominasi masyarakat dalam wujud kolonisasi total aspek kehidupan sosial

yang menandai kehadiran masyarakat konsumsi. Sekaligus penanda dimulainya era kapitalisme lanjut.

The spectacle is the stage at which the commodity has succeeded in totally colonizing social life. Commodification is not only visible, we no longer see anything else; the world we see is the world of the commodity (Debord:2002).

Bagi Guy Debord, masyarakat modern merupakan akumulasi *tontonan* yang tak terhingga. Masyarakat tontonan merupakan masyarakat yang hampir segala aspek kehidupannya dipenuhi oleh berbagai bentuk tontonan dan menjadikannya sebagai rujukan nilai dan tujuan kehidupan. Apa yang pada awalnya dihidupi telah menjadi *representasi* semata. Otentisitas kehidupan sosial telah mengalami degradasi dari *Being* menjadi *Having*, selanjutnya menjadi *Appearance*. Totalitas dari ketiga aspek ini diperhitungkan dengan alat tukar, yaitu uang.

Dalam pandangan post strukturalis, realitas tidak semata-mata terjadi karena determinasi oleh struktur, melainkan selalu ada ruang bagi terjadinya intermediasi dan negosiasi. *Distinction* (membedakan diri) dari Bourdieu merupakan inti permainan sosial dalam rangka konstruksi penilaian. Selera kelas dominan menentukan budaya, sistem komunikasi, dan integrasi kelompok. Salah satu cara untuk membedakan diri antar kelompok salah satunya melalui struktur penampilan. Cara penampilan, cara memilih bahan yang dipakai, memberi ciri khas perilaku, rasa percaya diri, dan menentukan pergaulan.

Kekerasan pelajar merupakan strategi *distinction* dalam kehidupan pelajar. Upaya membedakan diri dari kelompok sosial yang lain merupakan bagian dari strategi kekuasaan. Tujuannya untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Pelajar dengan modal intelektual tinggi menunjukkan nilai akademik mereka. Pelajar dengan modal ekonomi, mencari perhatian dengan menunjukkan harta mereka. Sedangkan pelajar pelaku kekerasan menunjukkan keberanian (*image* berani, gaya, keren, maskulin, *tough guy*, hero, janggo) dan penampilan mereka dalam melakukan kekerasan, bahkan dalam penggunaan senjata tajam yang kian bervariasi. Senjata dengan demikian adalah modal. Tingkat keberanian menjadi tolok ukur yang penting dalam menentukan posisi anak dalam arena pergaulan sosialnya. Penggunaan senjata sebagai strategi *distinction* dan kontestasi kekuasaan. Pemujaan (fetisisme) dan penggunaan senjata merupakan

strategi distingsi melalui kekuatan fisik (*physical power*), ketika secara akademik, mereka termarjinalkan dalam relasi dengan pelajar lainnya, juga dalam relasinya dengan guru. Dengan demikian, sekolah sebagai arena pemupukan dan akumulasi modal. Dalam konteks ini, “pelajar” yang tidak mendapatkan tempat dalam arena sekolah memperjuangkannya dengan memperluas arena, keluar dari sekolah.

Sedangkan kekuasaan menurut Foucault, dikatakan tidak memusat, tetapi menyebar. Karena itu, kekuasaan bisa ditemukan dalam segala bidang interaksi manusia. Dalam konteks kekerasan pelajar, mereka berkontestasi dengan pelajar lain dan sekaligus dengan sekolah lain. Kekerasan pelajar sebagai bagian dari strategi kekuasaan dalam kehidupan pelajar. Upaya tersebut bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan di antara teman-temannya atau bentuk frustasi sosial dan perlawanan terhadap sekolah yang mereka anggap tidak memberikan apa-apa (*school and teacher can do nothing*).

Sementara itu, bagi Guy Debord, masyarakat modern merupakan akumulasi tontonan yang tak terhingga. Apa yang pada awalnya dihidupi telah menjadi representasi semata. Otentisitas kehidupan sosial telah mengalami degradasi dari ***Being*** menjadi ***Having***, selanjutnya menjadi ***Appearance***. Totalitas dari ketiga aspek ini diperhitungkan dengan alat tukar, yaitu ***uang***. Tontonan adalah momen dimana komoditas memenuhi ruang-ruang kehidupan masyarakat, tak terkecuali kekerasan pelajar dengan atribut berupa tindakan kekerasan dan beraneka macam senjata tajam. Dalam mencari perhatian di kalangan teman-temannya, anak dari kelas sosial bawah tidak mengungkapkan saya “punya” sesuatu (*having something*), melainkan saya “berani” (*being something*) melakukan sesuatu. *Appearance* yang nampak adalah tindakan kekerasan yang sarat dengan nilai dan artefak kekerasan. Kekerasan terjadi pada momen tertentu yang menuntut mereka melakukan selebrasi/perayaan atas pembebasan. Misalnya: setelah pertandingan oleh raga antar sekolah, setelah pengumuman kelulusan sekolah, dll.

6. Kerangka Berpikir

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kajian teori yang telah dipaparkan di atas, dapat diformulasikan kerangka berpikir untuk mengkerangkai pemahaman mengenai praktik sosial dan reproduksi kekerasan pelajar, serta sekolah sebagai arena reproduksi

kekerasan pelajar. Kekerasan pelajar tidak berlangsung dalam kevakuman konteks sosio-kultural. Kekerasan pelajar merupakan hasil konstruksi yang senantiasa direproduksi oleh pelajar yang merupakan aktor (agensi).

Isu kekerasan pelajar ini memungkinkan pelacakan dan telaahan dari pendekatan post strukturalis. Bahwa kekerasan tidak sekedar dibaca sebagai patologi sosial dan penyimpangan moral. Melainkan terjadi pergeseran makna bahwa kekerasan itu sebagai keniscayaan yang *built in* dalam dunia sosial pelajar yang dinamis. Tidak heran jika pelajar memaknai kekerasan sebagai tindakan yang keren, gaya, dan bahkan menyenangkan.

Dalam perspektif teoretik Bourdieu, kekerasan pelajar bukan sekedar merupakan sentimen kolektif semata, melainkan sebagai praktik sosial reproduktif yang perlu dipahami sebagai bekerjanya habitus aktor, habitat (arena) di mana aktor berada, modal (kapital) yang dimiliki karena menjadi strategi distingsi dan pemosision sosial. Dalam pandangan Foucault, sekolah bagikan penjara dengan mekanisme pendisiplinan dan efek panoptic di dalamnya. Kekerasan pelajar juga perlu dibaca sebagai tidak memusatnya kekuasaan, karena menyebar pada segenap warga sekolah. Sekolah merupakan arena kontestatif bagi berlangsungnya perjuangan sosial. Kekerasan pelajar juga merupakan strategi *appearance* dalam masyarakat tontonan yang haus akan selebrasi dan perayaan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif menggunakan cara berpikir reflektif, historis, biografis, dan interpretif karena selalu mempertanyakan tentang pengalaman manusia dan mengkaji kondisi manusia dalam kurun sejarah tertentu (Denzin). Penelitian kualitatif interpretif menggunakan pengalaman diri sebagai salah satu sumber data dan mengkaji bagaimana manusia membangun dan memberi makna atas tiap-tiap tindakan mereka dalam situasi sosial konkret.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif interpretif. Dalam paradigma kualitatif, realitas bersifat: subjektif, ganda, sebagai

dilihat oleh peneliti. Peneliti berinteraksi dengan yang diteliti. Bahasa penelitian bersifat informal, melibatkan keputusan-keputusan, suara bersifat personal, menggunakan kata-kata yang bersifat kualitatif. Proses penelitian bersifat induktif di mana faktor-faktor yang ada terbentuk secara simultan timbal balik. Rancangan berkembang di mana kategori-kategorinya diidentifikasi selama proses penelitian. Penelitian terikat dengan konteks. Pola-pola dan teori dikembangkan untuk pemahaman dan pemaknaan. Akurat dan reliabel berdasarkan pembuktian.

Pendekatan kualitatif mengakui adanya peran subjek saat mengamati fakta, saat menganalisis, dan saat memaknai fakta di luar diri maupun dalam diri subjek yang bersangkutan, dan juga saat berteori (Noeng Muhamad, 2011). Dalam pendekatan ini, fakta itu secara intensional telah dimaknai oleh subjek yang bersangkutan, juga saat menganalisis sudah masuk intersubjektivitas dan intuisi subjek. Fakta dalam pendekatan ini bukan merupakan fakta objektif, melainkan fakta intensional yang sudah masuk pada pemaknaan subjek. Tugas peneliti adalah merekam pemaknaan subjek atau masyarakat yang diteliti (menyangkut sehingga faktanya menjadi fakta interpretatif).

Analisis interpretatif merupakan pendekatan dalam penelitian ilmu sosial yang berada dalam cakupan filosofi pengetahuan. Pendekatan interpretatif bertujuan menemukan makna dan intensionalitas tindakan aktor, hermeneutik, dan ideografi. Pendekatan ini berusaha mencari esensi makna dari sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman hidup dan bagaimana mereka mengkonstruksi dan memahami dunia sosialnya. Prosedurnya yang terkenal adalah *epoché* (pengurungan), yaitu suatu proses di mana peneliti harus mengesampingkan seluruh pengalaman sebelumnya untuk memahami semaksimal mungkin pengalaman dari subjek penelitian. Analisisnya berpijak pada horizontalisasi, di mana peneliti berusaha memeriksa data dengan menyoroti pernyataan penting dari subjek penelitian untuk menyediakan pemahaman dasar tentang fenomena tersebut (Creswell, 2014).

Pandangan umum yang berlaku dengan sejumlah klaim dan stigmatisasi menyebabkan para peneliti gagal dalam melakukan empati (Griffin dalam Irwan, 2006). Dalam konteks penelitian tentang kekerasan, tindakan kaum pelajar perlu dipahami sebagai praktik otonom dari sisi subjek, karena ia memiliki keabsahannya sendiri demi suatu pemahaman (*verstehen*) dan pemaknaan atas dunia sosial mereka. Tentu bentuk

pilihan rasional mereka berada dalam suatu ruang sosial tertentu dan situasi yang mengkondisikan tindakan itu dilakukan.

Tabel 3

Young People in Research: Objects, Subjects or Participants?

Approach	Positivistic	Interpretive	Critical
<i>Perspective</i>	<i>Adult perspective</i>	<i>Their own perspective</i>	<i>Participatory</i>
<i>Youth as...</i>	<i>Objects of research</i>	<i>Subjects in our research</i>	<i>Participants in our research</i>
<i>The Role of Youth</i>	<i>Researcher do research “about” young people.</i>	<i>We do research “among and with” young people</i>	<i>Young people become active collaborators in the research process</i>
<i>Research Methods</i>	<i>Observe, measure, obtain information about youth, but we are not interested in their views and perceptions</i>	<i>Not only their behavior but also their views and perceptions are important</i>	<i>More than just a sources of information</i>

Dielaborasi dari Cresswell (1994), Neuman (2000), Babbie (2007), White (2013)

Metode riset perlu dirumuskan secara spesifik berdasarkan karakter kepemudaan pelajar yang khas. Sketsa teoretik yang variatif, berimplikasi pada polarisasi metodologi sekaligus metode riset yang variatif pula. Hal ini penting dipahami untuk menetapkan posisi informan dalam riset.

Penelitian ini akan memahami secara interpretif mengenai kehidupan sosial (*life course*) berdasarkan pengalaman para pelajar yang menyejarah, sebagai titik awal yang tepat untuk bertolak. Pendekatan ini mengakui peran subjek pada saat mengamati fakta, menganalisis, dan memaknai fakta di luar diri dan di dalam subjek yang bersangkutan, dan juga saat berteori. Dengan pendekatan ini, metode riset yang digunakan adalah dokumentasi, observasi, *life story*, dan *in-depth interview* (wawancara mendalam). Observasi berfokus pada penghimpunan data tentang apa yang benar-benar dilakukan para pelajar, bukan pada apa yang mereka katakan tentang yang mereka lakukan, guna menghindari bias kedua level data yang berbeda itu. Dapat dikatakan data yang diperoleh dari proses tersebut adalah data yang terfragmentasi, yang tidak mengatakan apa-apa kecuali peristiwa yang direkam itu sendiri. Mengingat proses dialektika terus

menerus antara manusia dan lingkungannya, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang tepat mengenai makna mengapa pelajar terlibat dan mengakrabi kekerasan.

Dalam riset ini dilakukan pengamatan langsung, wawancara semi terstruktur, dan wawancara mendalam dengan pelajar. Data juga dihimpun dari guru, pengelola sekolah, tokoh masyarakat, dan pengambil kebijakan pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Melakukan penelitian tentang dan dengan pelajar dalam konteks kekerasan yang merupakan isu sensitif secara sosial mempunyai banyak keterbatasan dan hambatan praktis serta etis.

2. Setting Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sekolah menjadi arena reproduksi kekerasan pelajar di Kota Yogyakarta, khususnya SMA/SMK. Oleh karena itu, yang menjadi setting penelitian ini adalah persekolahan di SMA/SMK Kota Yogyakarta, khususnya sekolah beresiko kekerasan. Berdasarkan pemetaan kasus kekerasan pelajar oleh Dinas Pendidikan, pelajar yang sering terlibat kekerasan berasal dari SMA maupun SMK. Adapun peta SMA/SMK beresiko yang siswanya berpotensi/rentan melakukan kekerasan pelajar antara lain:

Peta Sekolah (SMA/SMK) Beresiko Kekerasan di Yogyakarta

SMA		SMK	
NEGERI	SWASTA	NEGERI	SWASTA
SMAN 10	SMA MUH 1	SMKN 2	SMK MUH 3
	SMA MUH 2	SMKN 3	SMK PERINDUSTRIAN
	SMA MUH 3	SMKN 5	SMK PIRI 1
	SMA MUH 7		
	SMA BOPKRI 1		
	SMA BOPKRI 2		
	SMA GAJAHMADA		

Sumber: Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Adapun yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah fenomena kekerasan pelajar yang tergambaran dari peristiwa-peristiwa kekerasan pelajar

SMA/SMK yang terjadi di Yogyakarta selama penelitian ini berlangsung. Setting penelitian ini adalah 2 SMA beresiko di Kota Yogyakarta, yaitu SMAN 10 dan SMA Gajah Mada.

3. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pelajar, alumni, guru, pengelola sekolah, satpam sekolah, tokoh masyarakat, dan pengambil kebijakan pendidikan pada Dinas Pendidikan yang memiliki informasi dan pengalaman tentang realitas kekerasan pelajar dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kekerasan dalam konteks persekolahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui: observasi/pengamatan partisipatif untuk mengeksplorasi realitas kehidupan pelajar, *life story*, *stay in* (tinggal) di tempat aktivitas pelajar (sekolah dan tempat menghabiskan waktu) untuk menyelami *everyday life activity/life course* (kehidupan sehari-hari), wawancara mendalam, dan FGD dengan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang realitas kekerasan pelajar. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, media sosial juga menjadi salah satu sarana dalam menggali informasi tentang relasi sosial dan pengalaman pelajar.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Data penelitian yang telah diperoleh akan dianalisis secara deskriptif dan interpretatif. Analisis dilakukan oleh peneliti dengan mempertimbangkan informasi, sikap, dan pendapat dari informan melalui proses pemahaman makna intersubjektif (Burhan Bungin, 2007).

Ada sejumlah prosedur data analisis kualitatif menurut Cresswell (1994) yang meliputi:

1. *Suggest in the plan that analysis will be conducted as an active simultaneously with data collection, data interpretation, and narrative reporting writing.*
2. *Indicate how the process of qualitative analysis will be based on data reduction and interpretation.*

3. *Mention a plan for representing the information in matrices.*
4. *Identifying the coding procedure to be used to reduce the information to themes or categories.*
5. *Mention any specific data analysis procedures that are inherent in qualitative designs.*

Proses analisis dilakukan dengan tahap: seleksi, menyederhanakan, mengklasifikasi, memfokuskan, mengorganisasi (mengaitkan gejala) secara sistematis dan logis, serta membuat abstraksi atas kesimpulan makna hasil analisis.

BAB II

DINAMIKA PERSEKOLAHAN DI KOTA YOGYAKARTA

A. PERSEKOLAHAN DALAM KONTEKS TRANSFORMASI YOGYAKARTA

Yogyakarta memiliki predikat sebagai kota pelajar dan kota pendidikan. Yogyakarta merupakan Indonesia mini yang dapat menjadi model, rujukan, dan barometer pendidikan di Indonesia. Sebagai miniatur Indonesia, maka heterogenitas tingkat sosial dan karakter di Yogyakarta saat ini semakin bervariasi, sehingga diperlukan pendekatan-pendekatan khusus kepada pelajar. Heterogenitas tersebut juga tergambar dalam persekolahan yang sangat variatif. Di Yogyakarta terdapat banyak sekolah, mulai sekolah favorit berkualitas hingga sekolah bermutu kurang bagi siswa kurang beruntung. Pelajar sebagai bagian dari pemuda menyimpan dua potensi sekaligus, yaitu potensi positif (kreatif) dan potensi problematik. Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat (Bp. SF) diperoleh penjelasan:

“Pada dasarnya orang tua memiliki tugas untuk melaksanakan fungsi keutamaan manusia (ilmu dan akhlak). Namun ketika anak jauh dari orang tua, yang terjadi adalah kondisi yang di luar pengharapan orang tua. Harus jujur diakui bahwa heterogenitas di Yogyakarta tergelincir pada berbagai macam persoalan. Sebelum tahun 70-an, para pemilik kos-kosan itu memang berfungsi ganda mencari ma’isah (penghasilan) dan sekaligus sebagai pengganti orang tua. Namun kini, mereka tidak lagi memperhatikan hubungan sosial, sehingga anak kos cenderung bebas tanpa batas”.

Dalam kenyataan sekarang, bahkan muncul kos-kosan elit dengan fasilitas lengkap serba mewah, akan tetapi minim pengawasan. Kesungguhan aparatur pemerintah dalam rangka mengatasi masalah dan mengarahkan pemuda juga belum optimal. Dulu telah dirancang adanya Perda tentang Pondokan/Kos-kosan. Berdasarkan survei yang dilakukan, pada tahun 2001-2002, ternyata dari ribuan pondokan yang ada, kira-kira pondokan yang baik/ideal tidak lebih dari 25 %. Sekitar 75 % pondokan-pondokan tidak terarah dan tidak terkendali. Pondokan berkembang menjadi tempat kost bebas tanpa batas. Lebih lanjut menurut Bp. SF:

“Misalnya ada pondokan untuk wanita, tetapi teman-temannya (termasuk laki-laki) bebas keluar masuk kos-kosan. Pada saat sidak di wilayah perbatasan Yogyakarta-Sleman (termasuk di daerah Depok), ada pondokan untuk wanita, tetapi di depan kamar ada sepatu dan sandal laki-laki. Bahkan di sekitar kampus IAIN (sekarang UIN), ada pondokan

campur. Regulasi yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pejabat publik tidak dilakukan, sehingga peluang terjadinya kenakalan remaja semakin meningkat”.

Pada dasarnya Perda tentang pondokan mengatur tentang hal-hal berikut, misalnya: pondokan harus berizin, pondokan harus ada induk semang yang bertanggung jawab dan tinggal di situ, penyelenggara pondokan harus tidak boleh melakukan usaha pondokan campur (laki-laki dan wanita). Sarana dan prasarana pondokan harus dipenuhi, misalnya: kamar tamu. Perlu ada aturan-aturan pondokan. Sejumlah elemen tersebut mestinya sebagai kendali pemerintah dalam mengendalikan berkembangnya kenakalan-kenakalan remaja. Sebenarnya Perda itu masih ada, namun terkendala pada mekanisme penegakan dan tidak adanya anggaran untuk penegakan aturan tersebut. Apalagi sekarang kepedulian sosial semakin lemah, termasuk dari organisasi keagamaan. Persoalan-persoalan tersebut mendorong pada arah perkembangan anak dan remaja yang kurang bagus. Sekarang sudah jarang dilaksanakan program kebersamaan antara pelajar-mahasiswa Yogyakarta dari seluruh Indonesia. Dulu kegiatan seperti itu dilaksanakan secara rutin triwulan. Mereka saling berinteraksi dan unjuk keterampilan di bidang seni dan olah raga, sehingga muncul dampak-dampak positif yang luar biasa.

Terkait dengan predikat sebagai kota pelajar/pendidikan, barangkali sekarang ini Yogyakarta tidak lagi pantas menyandangnya, karena maraknya fenomena pergaulan bebas, miras, dan narkoba. Mestinya Pemda tingkat I dan II, bersama dengan lembaga sosial dan keagamaan merumuskan kembali predikat kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota pelajar. Masih menurut Bp. SF:

“Dulu di Jogja (di perbatasan Jogja-Sleman) yang notebene berada di dekat kampus malah marak terjadi perjudian Togel dan Totor berskala besar di Jalan C. Simanjuntak. Sekarang tempat hiburan malam juga kian banyak, seperti Boshe dan Liquid. Mestinya pemerintah nahi munkar terhadap masalah perjudian. Tanpa kerjasama antara pejabat publik dan masyarakat, masalah itu sulit diatasi”.

Dulu PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) pernah mengeluhkan, bahwa situs Plengkung Gading sering digunakan sebagai tempat pacaran anak-anak muda. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat menjadi resah. Dulu pernah ada *pressure* melalui remaja masjid, tetapi memang ada bau/unsur kekerasan jadinya. Kalau polisi tidak serius menegakkan aturan hukum, terutama terkait persoalan perjudian dan hiburan malam, maka nantinya akan lahir polisi-polisi sipil. Dalam kelompok-kelompok yang fanatik, kekerasan

muncul karena ketidaksungguhan aparat hukum. Apalagi jika aparat justru terlibat dan melindungi pelaku pelanggaran.

Dulu semua pimpinan sekolah dan tenaga pendidik melakukan segala sesuatu secara tulus ikhlas. Mereka mencerahkan tenaga pikiran semata-mata untuk mengabdi pada pendidikan. Namun realitas sekarang sudah berbeda, ada kecenderungan obah-polah-mamah (orientasi materialistik tinggi). Dulu SMA Muhi mendapat bermacam-macam penghargaan. Pada waktu itu (87-89) juga banyak lulusan SMA Muhi yang diterima di PTN. Bp. SF menyampaikan keprihatinannya terhadap perubahan dalam realitas pendidikan di sekolah:

“Setelah gedung menjadi baik, nilai-nilai pengabdian justru mulai luntur. Hal ini juga berlaku dalam diri aparatur pejabat pemerintah. Hakikat pejabat mestinya sayidul qaumi, bahwa seorang pemimpin/pejabat itu hakikatnya adalah abdi dan pelayan masyarakat untuk mengabdikan diri pada keumatan, bukan sebagai pendulang materi. Jika kembali pada hakikat hidup manusia: kehidupan manusia jika diposisikan pada hidup untuk mengabdikan diri, menyangkut nilai ilahiah dan nilai keumatan, maka orang akan tenang dan tidak nggrangsang”.

Kini nilai keikhlasan sudah semakin luntur. Akibatnya, anak-anak menjadi kehilangan figur teladan, karena orang tua cenderung materi *oriented*. Apalagi jika orang tua justru melakukan tindak korupsi atau perselingkuhan, maka anak meyakini bahwa hal itu bukanlah masalah. Saat ini, sebagaimana tergambaran di media, konflik rumah tangga dan perselingkuhan semakin terbuka.

Secara umum, transformasi kota Yogyakarta membingkai dinamika masyarakat dan juga persekolahan. Dinamika kehidupan pelajarpun tidak terlepas dari konteks dinamis pertumbuhan kota Yogyakarta. Dalam perkembangannya, banyak aktivitas yang hidup 24 jam, seperti minimarket, café, angkringan, dan lain-lain sehingga memungkinkan kaum mudanya untuk keluar malam hari. Misalnya di tepi sungai Code, maraknya angkringan di malam hari, malah disalahgunakan untuk ajang pacaran. Selain itu, orientasi pembangunan kota telah bergeser ke arah yang lebih materialis. Banyak hotel baru dibangun. Dulu hotel berbintang hanya boleh dibangun di pinggiran kota. Sekarang banyak hotel dan apartemen didirikan di kota, sehingga menyebabkan kemacetan yang luar biasa. Kondisi demikian sungguh dilematis, Syafii Ma’arif mengibaratkannya seperti seorang wanita yang tangan kanannya menenun kain, tetapi tangan kirinya melepaskan tenunan itu. Perlu kebijakan

revolusioner, jika ingin generasi bangsa ini tumbuh menjadi lebih baik supaya kekerasan dan ketidakjujuran tidak semakin merajalela.

Dalam *focus group discussion*, Kabid Pendidikan Menengah Dinas Kota Yogyakarta mengungkapkan bahwa semua pihak perlu mengkondisikan suasana Yogyakarta sebagai atmosfer pendidikan. Untuk kegiatan yang positif, sudah ada wadah untuk menyalurkan energi dan mengembangkan potensi/talenta, misalnya dalam bidang olah raga, seni, sains, dan lain-lain. Namun memang ada sebagian dari para pelajar dengan energi berlebih tersebut yang belum jelas wadahnya. Pelajar seperti itu justru perlu dieksplor dan digali potensinya dalam rangka menunjukkan eksistensi di dunia luar.

Yang menjadi keprihatinan saat ini adalah kekerasan dan vandalisme. Rasanya tidak mungkin mengawal mereka sejak pagi sampai dengan malam. Karena tanggung jawab guru pembimbing secara wajib dalam sekolah yaitu mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 2 siang. Pembimbing tidak mungkin mengawal sepenuhnya, sehingga di luar jam wajib, pelajar berada di dalam tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Pelaku vandalism tidak hanya pelajar SMA dan SMK, tetapi pelajar SMP dan SD juga ada. Vandalisme biasa dilakukan malam hingga dini hari. Padahal pada jam-jam tersebut, mestinya mereka berada di rumah dan di bawah bimbingan orang tua.

Sementara itu, Kasie Manajemen Sekolah, Bidang Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta Bp. Rmd menyebutkan bahwa Kota Yogyakarta memang memiliki keunikan dengan kehidupan malamnya yang juga marak:

“Bayangkan, jika jam 2 dini hari, aktivitas di Jl. Mangkubumi (tugu ke selatan) masih ada dan hidup. Biasanya untuk melakukan hobby tertentu. Aktivitas pada jam tersebut seharusnya mendapat peringatan atau teguran dari pihak-pihak yang terkait. Jika ada pelajar yang memblayer knalpot, mestinya polisi yang bertindak dan menegurnya. Selama ini jika ada yang melanggar, yang lebih dikedepankan adalah *punishment* berupa tilang, bukannya memberikan bimbingan tentang bagaimana seharusnya mereka berkendara dengan baik.

Menjawab pertanyaan tentang faktor penyebab terjadinya kekerasan pelajar, berikut pernyataan dari Bp. WS:

“Ketika kejadian tawuran pelajar berlangsung pada dini hari, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pengawasan orang tua terhadap anak pada jam tersebut?. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka yang terlibat kekerasan pelajar tinggal bersama orang tua, namun dalam kondisi keluarga yang kurang kondusif/harmonis. Kemungkinan lain, mereka yang terlibat adalah anak kost, yang jauh

dari pengawasan orang tua. Kemungkinan mereka yang kost juga memiliki teman atau kakak (mahasiswa) yang terbiasa melakukan aktivitas di luar rumah pada malam hari". (wawancara tanggal 27 Juli 2013)

Peristiwa kekerasan pelajar sesungguhnya menunjukkan bahwa fungsi kontrol orang tua atau sekolah tidak berjalan dengan baik. Jika tidak dilakukan pencegahan, kondisi tersebut sangat mengganggu aktivitas pembelajaran di sekolah. Semua pihak, khususnya orang tua dan sekolah sesungguhnya memiliki peran dalam memberikan pengawasan kepada siswa. Jika menilik kejadiannya malam hari, tentunya pengawasan pihak keluarga yang tidak berfungsi. Keluarga mestinya melakukan pengawasan terhadap pergaulan anak ketika sudah tidak berada di lingkungan sekolah.

Jika aktivitas sekolah telah usai, pelajar biasanya masuk dan berinteraksi dengan kelompok dalam rangka mempertahankan identitas sekolah. Mereka memiliki sarana, ruang, dan waktu. Inilah yang perlu diurai satu persatu. Poltabes lebih sering melakukan pembubaran yang artinya lebih bersifat reaktif jika suatu kejadian telah terjadi, daripada mencegah maupun mengantisipasinya. Jika ada inviasi olah raga, polisi hanya bertanggung jawab di arena pertandingan. Padahal konflik justru sering terjadi pasca inviasi. Pendekatan yang dilakukan oleh sekolah perlu menyentuh individu maupun kelompok.

Menghadapi realitas kekerasan dan vandalisme, seolah-olah terjadi pemberian dari sejumlah pihak. Dalam hal ini ada kelemahan dari penegak hukum, karena seringkali tidak ada penahanan. Tayangan TV juga kian massif memberitakan tentang kekerasan. Di Yogyakarta, kasus kekerasan masih bersifat sporadik, tidak terus-terusan seperti di Jakarta misalnya. Namun begitu, selama ini Dinas Pendidikan, Sekolah, Dinas Ketertiban sudah bergerak. Kiranya Perguruan Tinggi juga perlu mengambil bagian yang lebih besar untuk memberikan solusi yang dapat diambil oleh pemerintah.

B. STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MASALAH PELAJAR

Pada periode kepemimpinan Walikota Yogyakarta sebelumnya, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan kebijakan untuk membentuk Tim Penanggulangan Penyakit Masyarakat termasuk kenakalan remaja/pelajar dengan kepengurusan Ketua: Wakil Walikota dan Wakil Ketua berasal dari: Kapoltabes, Dandim, dan Kejaksaan (periode 2001-2006). Gerakan yang dilakukan pada waktu itu adalah membentuk tim yang

terdiri dari segenap elemen aparatur masyarakat di tingkat kota. Di tingkat kecamatan juga ada, dan bahkan gerakannya secara integral sampai dengan tingkat kelurahan untuk melawan penyakit masyarakat.

Pada waktu itu dibentuk juga gugus anti narkoba. Secara periodik, dilakukan evaluasi per kecamatan, misalnya yang terkait dengan persoalan miras. Hasil evaluasi disampaikan dan diumumkan. Biasanya kepolisian malu di hadapan publik jika kinerjanya kurang memuaskan. Namun dalam perkembangannya, masih terdapat kendala. Misalnya dalam forum Muspida tingkat I (DIY) terungkap jika tim ini dilaksanakan terus, maka tidak selalu ada anggaran. Selain itu, tak bisa dipungkiri, terdapat upeti-upeti dari tempat hiburan malam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam bisnis hiburan malam dan perjudian memang ada juga keterkaitan dengan aparatur. Potret semacam itu tentunya mempengaruhi dinamika kepemudaan di Yogyakarta. Setting makro berupa konteks global juga mempengaruhi dinamika pemuda dan pelajar, karena lingkungan sangat mempengaruhi mereka.

Salah satu upaya mengatasi masalah pelajar di Yogyakarta, sejak tahun 2009, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menggagas penyelenggaraan program Jembatan Persahabatan (angkatan 1). Pada awalnya, tujuan dari program tersebut adalah untuk mengatasi kenakalan siswa. Program tersebut melibatkan siswa, TNI/POLRI, Dinas Kesehatan, dan guru. Program Jembatan Persahabatan melibatkan siswa di Yogyakarta, terutama yang terlibat kasus kenakalan siswa. Melalui program tersebut, siswa yang sering terlibat dalam kenakalan siswa dipertemukan dalam suatu aktivitas bersama dengan sebelumnya disediakan ruang untuk mendapatkan pembinaan. Namun, selama beberapa tahun, program tersebut tidak berlanjut.

Setelah 3 tahun vakum, Program Jembatan Persahabatan sebagai upaya pencegahan dan penanganan permasalahan pelajar ini dilaksanakan kembali pada bulan November 2013. Peserta kegiatan diklat khusus tersebut adalah pelajar yang merupakan perwakilan dari sekolah (SMA) yang ditunjuk. Pihak sekolah menentukan sejumlah peserta untuk dikirimkan mengikuti kegiatan tersebut. Adapun kriteria pemilihan siswa peserta kegiatan Jembatan Persahabatan adalah siswa yang memiliki pengaruh di sekolah, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Pelajar yang memiliki pengaruh negatif antara lain yang menjadi provokator (menghasut), *trouble maker*, dan sumber masalah. Pelatihan

dilaksanakan selama 5 hari di Kaliurang. Kegiatan pelatihan dikemas dalam bentuk pendidikan karakter untuk menyentuh hatinya. Pada dasarnya mereka adalah pelajar yang cerdas, memiliki energi berlebih, namun tidak mempunyai wadah/panggung untuk berekspresi dalam rangka mendapat pengakuan tentang keakuan diri.

Selama pelatihan, disampaikan materi pelatihan dari tim psikologi UGM dan dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Metode pelatihan melalui pengosongan, pengisian, dan pemaknaan. 1 bulan setelah kegiatan pelatihan berakhir, dilakukan evaluasi. Hasil menunjukkan bahwa 70 % pelajar mengalami perubahan diri dan mampu mengendalikan teman, selebihnya 30 % tidak berubah. Namun demikian, hasilnya cukup efektif, daripada hanya diceramahi. Selama 6 bulan, para peserta didampingi oleh konselor. Selama 2 minggu sekali dipantau perkembangan dan kemajuannya. Tahun ini, kegiatan direncanakan akan melibatkan siswa lebih banyak. Endingnya, diharapkan tumbuh kesadaran diri, bahwa mereka sesungguhnya berguna dan memiliki pengaruh positif. Bahkan peserta pelatihan berjanji akan menjadi komando supporter pada DBL dan menjamin tidak ada nada kekerasan.

“*Goal* dari kegiatan ini adalah mencari *network* untuk mendapatkan *contact person* supaya pihak dinas pendidikan dapat berkomunikasi dengan jaringan pelajar yang berpengaruh dari tiap-tiap sekolah”.

(wawancara tanggal 27 Juli 2013)

Hal tersebut dalam rangka melaksanakan peran kontrol sosial. Berdasarkan pengalaman Bp. WS yang akrab dipanggil *Babe* oleh para pelajar di Yogyakarta, pernah terjadi, seorang siswa menyampaikan informasi melalui sms bahwa akan terjadi tawuran pelajar yang direncanakan oleh siswa dari sekolah tertentu. Karena mendapat informasi tersebut, maka Dinas Pendidikan segera berkoordinasi dengan pihak sekolah yang bersangkutan untuk memulangkan siswa lebih awal dan bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menjaga keamanan sekolah yang bersangkutan.

Berdasarkan studi dokumentasi terhadap pemberitaan di Koran (KR, 25 November 2013), diperoleh informasi bahwa Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta serius membuat wadah yang mampu mempertemukan para pelajar dari berbagai sekolah. Terutama pelajar tingkat SMA/SMK untuk meminimalisasi terjadinya berbagai gesekan yang akhir-akhir ini kerap terjadi. Salah satu bentuknya dengan mengadakan kegiatan Jembatan Persahabatan yang diikuti oleh 124 pelajar SMA/SMK yang berasal dari 35 sekolah. Selama tiga hari

sejak Jumat-Minggu, 22 -24 November 2013, ratusan pelajar tersebut digembleng agar tertanam rasa persahabatan antar sesama pelajar.

“Ini baru langkah awal untuk mempertemukan para pelajar di Kota Yogyakarta. Intinya agar mereka (pelajar dari berbagai sekolah) akrab dulu. Nanti akan kami jaring sebagai relawan pelajar” ungkap Kepala Seksi Pembinaan Kesiswaan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Bp. Wisnu Sanjaya.

Dalam wawancara tanggal 26 November 2013, hal yang sama juga dikemukakan oleh Bp. WS bahwa:

“Dalam pelaksanaan kegiatan Jembatan Persahabatan ini, Seksi Pengembangan Kependidikan sebagai penanggungjawab. Ada sejumlah instansi yang digandeng, yaitu: SARDA DIY, POLRESTA Yogyakarta, DPRD DIY, BPBD DIY, dan BNK Yogyakarta. Jadi, selain dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, materi disampaikan oleh pemateri dari lembaga-lembaga tersebut. Jembatan Persahabatan tahun 2013 ini merupakan kegiatan yang ke 2. Pertama kali dilaksanakan pada tahun 2009. Waktu itu belum terbentuk kepengurusan. Setelah beberapa tahun vakum, tahun ini dihidupkan kembali. Untuk tahun 2013 ini, para peserta antusias menginisiasi kepengurusan. Sekitar 40 siswa bersedia menjadi pengurus, ke depan mereka berperan sebagai relawan pelajar. Bahkan ke depan, mereka akan menyampaikan Deklarasi”.

Para peserta yang dikirimkan untuk mengikuti kegiatan Jembatan Persahabatan merupakan siswa berpengaruh di sekolah masing-masing, baik yang memiliki pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Seluruhnya dikumpulkan dalam satu forum dengan beragam kegiatan. Adapun kegiatannya mulai dari sarasehan, *outbond*, hingga refleksi. Seluruh rangkaian kegiatan itu dikemas dalam suasana yang menyenangkan bagi siswa. Usai kegiatan selesai, Dinas Pendidikan memfasilitasi terbentuknya kepengurusan Jembatan Persahabatan Angkatan I. Harapannya, ke depan para pengurus tersebut mampu secara aktif mengadakan kegiatan agar rasa persahabatan pelajar antar sekolah dapat terus dipupuk.

“Selain 124 siswa, ada 8 guru pendamping yang diundang dalam kegiatan Jembatan Persahabatan. Mereka adalah guru BK atau guru pendamping OSIS dari SMA Muhammadiyah 1, SMA Muhammadiyah 2, SMA Muhammadiyah 3, SMA Muhammadiyah 7, SMK Muhammadiyah 3, SMA Bopkri 1, dan SMA Bopkri 2. Selain bertugas untuk mendampingi siswa, mereka juga menjadi moderator dalam setiap sesi materi”.

Peserta dari setiap sekolah berjumlah sekitar 4 orang. Untuk menuju tempat kegiatan di Kaliurang, para siswa diantarkan dengan kendaraan sekolah masing-masing. Yang

menarik, dalam kegiatan selama tiga hari itu, pada hari pertama, para pelajar masih tampak malu-malu dan berkelompok berdasarkan sekolahnya. Namun pada hari berikutnya, merasa sudah berbaur dengan pelajar dari sekolah lain. Hal ini menunjukkan bahwa dalam suasana demikian, perbedaan sekolah tidak menjadi masalah, karena mereka bisa mencair dalam kebersamaan penuh persahabatan. Di balik kegiatan tersebut, sesungguhnya ingin melihat jaringan pelajar antar sekolah seperti apa. Selain itu, tukar menukar nomor hp juga memungkinkan Bp. WS selaku Kasie Bangdik untuk berkomunikasi dengan para pelajar dari berbagai sekolah.

Sampai dengan wawancara ini dilakukan, pihak Dinas Pendidikan belum melaksanakan evaluasi program Jembatan Persahabatan. Harapannya, kegiatan tersebut dapat mencegah terjadinya gesekan antar pelajar dari sekolah yang berbeda. Kegiatan tersebut dapat menjadi wahana pengembangan nilai-nilai kebersamaan dan keakraban antar pelajar. Namun demikian, bukan berarti setelah kegiatan Jembatan Persahabatan ini dilakukan, kasus perkelahian pelajar hilang dengan sendirinya. Karena perang antar siswa di dunia maya melalui *facebook* dan *twitter* juga seringkali berpotensi memicu permusuhan antar pelajar. Oleh karena itu, masing-masing sekolah harus senantiasa memantau dan melakukan kontrol terhadap *facebook/twitter* di sekolah masing-masing.

Melalui kegiatan pelatihan tersebut, Dinas Pendidikan maupun Sekolah memiliki kesempatan mengembangkan wawasan dalam menangani dan mengelola siswa bermasalah. Barangkali memang perlu diklat secara kontinyu bagi pelajar bermasalah. Mata rantai yang perlu diputus adalah alumni bermasalah, mereka mempunyai waktu luang untuk berinteraksi dengan adik kelas. Alumni yang dimaksud tidak seluruhnya preman, bahkan banyak di antaranya adalah mahasiswa (seringkali mahasiswa “kurang sregep” atau malas), dan menjadi provokator serta memberikan indoctrinasi secara non formal di kawasan sekitar sekolah, di tempat kos, dan di tempat nongkrong lainnya.

Yang menarik, letak/posisi sekolah berdekatan, tetapi memiliki status berbeda, biasanya berpotensi terjadi gesekan antar sekolah. Anak-anak bermasalah merasakan ketegangan-ketegangan dalam konteks *school competitiveness*. Untuk itu, perlu dilakukan komunikasi efektif antar pengelola sekolah. Selama ini, sekolah-sekolah sudah merasa berupaya maksimal, namun belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan.

Untuk meminimalisir kekerasan pelajar, ada sekolah yang berupaya secara simultan melalui bermacam-macam strategi:

- Mengurangi jumlah siswa putra hingga 30 %
- Menghapuskan kegiatan MOS dan Tonti
- Melalui alumni senior untuk mengendalikan alumni bermasalah
- Mengembangkan budaya riset di kalangan pelajar melalui kegiatan penelitian di berbagai bidang

Namun demikian, perlu dipahami bahwa personil di sekolah bermacam-macam karakternya. Untuk menjadi Wakasiswa, perlu memiliki kompetensi menghadapi siswa potensial bermasalah. Namun selama ini pemilihan Wakasiswa seringkali hanya berdasarkan voting saja. Hal ini menunjukkan bahwa popularitas lebih utama dibandingkan kompetensinya.

Pelaku kekerasan dan vandalisme bahkan disinyalir mulai siswa SMP. Namun demikian, melihat realitas kekerasan dan vandalisme di Yogyakarta tidak dapat mengabaikan realitas serupa yang terjadi di daerah sekitarnya (Sleman dan Bantul). Kekerasan pelajar merupakan fenomena yang senantiasa terulang ibarat benang kusut yang perlu diurai. Kasusnya senantiasa sama, dengan pelaku yang berbeda karena setiap tahun siswa baru selalu berganti. Guru pembimbing mestinya tidak bosan menghadapi para pelajar, karena selama mereka masih remaja, permasalahan akan selalu muncul.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Bapak WS, dapat dideskripsikan sejumlah data yang terkait dengan strategi pencegahan kekerasan pelajar di Yogyakarta:

“Sebenarnya untuk mencegah kekerasan pelajar telah dibentuk Forum Komunikasi Pengurus OSIS (FKPO) dan Musyawarah Guru Pembina OSIS (MGPO). Namun sempat tidak terfasilitasi.”

(wawancara tanggal 27 Juli 2013)

Salah satu penyebab macetnya forum MGPO karena MGPO berbeda dengan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). MGMP terkait dan berhubungan langsung dengan kurikulum dan proses belajar mengajar, sehingga segala kegiatannya dapat difasilitasi karena ada dana hibah dari APBD. Sedangkan untuk MGPO belum pernah ada hibah. Pengurusnya sejak pertama kali dibentuk belum pernah berganti, yaitu Ketua Bp. Sgh dari

SMA 1 dan Sekretaris Bp. Skm dari SMA 6 (bahkan saat ini sudah pensiun). Rencana ke depan mau diaktifkan lagi.

Event/pertandingan olah raga seringkali juga menjadi pemicu terjadinya perkelahian pelajar antar sekolah. Terkait dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan pernah memberikan surat edaran ke sekolah. Surat edaran tersebut berisi: jika sekolah akan menyelenggarakan *event* olah raga, maka harus memberi tahu Dinas Pendidikan. Dengan demikian, dinas pendidikan dapat terlibat dalam proses persiapannya. Pada setiap *technical meeting*, Dinas Pendidikan menyarankan kepada panitia supaya mempertimbangkan sejumlah aspek, seperti peta peserta dari sekolah mana saja, berapa perkiraan jumlah supporternya, bagaimana penempatan supporter dalam stadion, dan bagaimana konsep pengamanannya. Jika Dinas Pendidikan mendapat informasi, maka akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Ketertiban untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain Jembatan Persahabatan, Dinas Pendidikan juga menyelenggarakan Pendidikan dan latihan (Diklat) bagi pengurus OSIS dengan materi pelatihan: *leadership/kepemimpinan* dan *outbond* (misalnya di Kaliurang). Pemateri berasal dari Dinas Pendidikan. Selain itu juga mengaktifkan kegiatan kunjungan antar sekolah, menggiatkan pertemuan siswa melalui Forum Komunikasi Pengurus OSIS (FKPO), dan menggiatkan musyawarah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan.

Dinas Pendidikan juga menyelenggarakan kegiatan Pertukaran Pelajar Antar Daerah. Kegiatan yang dimulai sejak tahun 2004 ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan kenusantaraan siswa Kota Yogyakarta melalui implementasi langsung ke daerah atau Propinsi lain di NKRI. Pesertanya adalah perwakilan siswa SMA Kota Yogyakarta, khususnya kelas XI. Setiap tahun, sekitar 40 siswa mengikuti kegiatan ini. Pelajar yang terpilih telah melalui tahap seleksi antara lain tes administrasi, tes akademik, pengetahuan budaya, dan tes wawancara. Mereka dikirim ke sekolah di luar daerah selama 2 minggu (14 hari), untuk menjadi duta pendidikan dan duta budaya dalam rangka memperkokoh NKRI. Sebelum berangkat, kepada mereka diberikan pembekalan berupa pengayaan materi berupa wawasan budaya dan pariwisata Yogyakarta. Mereka memiliki tugas sebagai duta pendidikan, untuk mensosialisasikan potensi pendidikan (dalam berbagai tingkatan, termasuk Perguruan Tinggi) dan duta budaya/pariwisata di Kota Yogyakarta. Bahwa Yogyakarta masih layak sebagai kota tujuan pendidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk

melatih dan membiasakan siswa beradaptasi dan berinteraksi dengan pelajar yang berasal dari daerah lain. Dengan demikian, mereka memiliki sikap toleran dalam masyarakat multikultural, sehingga mendukung terwujudnya persatuan dan kesatuan.

Tujuan program ini antara lain:

- Memupuk rasa persatuan dan kesatuan, cinta tanah air di kalangan pelajar
- Menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental di kalangan pelajar
- Saling memperkenalkan budaya daerah masing-masing
- Mengenal lebih dekat budaya, adat istiadat di daerah tujuan
- Memperluas cakrawala pandang melalui wawasan nusantara

Dampak kegiatan Pertukaran Pelajar Antar Daerah seperti diungkapkan oleh Bp. WS adalah:

“Beberapa tahun yang lalu pernah mengirimkan 20 siswa untuk pertukaran pelajar ke Makassar dan 20 siswa ke Takalar. Dampaknya, mulai tahun ini, Dinas Pendidikan Takalar (Sulawesi) memberikan beasiswa dan mengirimkan 5 putra terbaik yang berminat melanjutkan studi di sekolah Di Yogyakarta. Acara penyambutan dilaksanakan di Add Hotel. Acara penyambutan dihadiri oleh Bupati Takalar, Kepala Dinas Pendidikan, Orang tua siswa, dan orang tua asuh”.

Kegiatan Pertukaran Pelajar Antar Daerah membawa manfaat yang besar, karena para siswa dapat melihat secara langsung budaya dan adat istiadat daerah lain, dapat beradaptasi dengan siswa dari sekolah di daerah lain dalam kegiatan belajar bersama, dan dapat bertukar informasi, sehingga menjadi bekal untuk hidup rukun dan damai di tengah-tengah masyarakat. Mereka juga belajar hidup mandiri karena tinggal jauh dari keluarganya.

Strategi membuka layanan telpon/sms untuk mengantisipasi tindak tawuran pelajar, juga telah diinisiasi oleh Dinas Pendidikan, khususnya oleh Kasie Pengembangan Pendidikan, khususnya bagian Kesiswaan. Melalui layanan telpon/sms 24 jam tersebut, pihak Dinas Pendidikan dapat senantiasa menjalin komunikasi dengan pelajar untuk memantau dinamika kehidupan pelajar di Yogyakarta.

Terkait dengan kasus pelajar yang kedapatan membawa senjata tajam dan terlibat tawuran pelajar biasanya diproses oleh kepolisian, sesuai hukum yang berlaku (KR, 3 Desember 2013). Meskipun tidak ditahan, namun pelajar yang kedapatan membawa senjata tajam akan diproses secara hukum dan berkasnya dilimpahkan ke kejaksaaan. Polisi

bertindak tegas terhadap pelanggar hukum, siapapun itu, termasuk pelajar. Jika perbuatan pelajar telah mengarah pada perbuatan yang meresahkan dan mengarah pada tindak kriminal, mestinya tidak perlu diberi toleransi. Pengawasan orang tua terhadap anak harus ditingkatkan agar mudah dalam melakukan pemantauan.

Predikat Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata juga menimbulkan dilema tersendiri. Seringkali kebijakan pemerintah berseberangan, sehingga berdampak pada kehidupan masyarakat, termasuk para pelajar. Banyak fasilitas seperti cafe, mall, dan rumah musik yang akhirnya dapat dengan mudah diakses oleh pelajar yang notabene masih berusia remaja. Dalam fase usia yang masih remaja, para pelajar memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Strategi untuk mengatasi dan mencegah kasus kekerasan pelajar tentunya tidak berlaku sama di semua sekolah, dan tidak dapat dilakukan seorang diri. Untuk mengatasinya, perlu dipayakan sejumlah strategi dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Kerjasama yang telah dilakukan oleh pihak dinas pendidikan untuk mencegah kekerasan pelajar antara lain berkoordinasi dengan pihak sekolah. Khususnya pada setiap pengumuman kelulusan, Dinas Pendidikan mencari data dan informasi tentang agenda kegiatan sekolah dan jam pulang di setiap sekolah. Pada saat pengumuman kelulusan bekerjasama dengan kepolisian disiagakan Satu Sekolah Dua Polisi (SSDP) untuk mencegah terjadinya konvoi pelajar yang seringkali memicu tawuran di jalan. Pihak sekolah juga bekerjasama dengan Orang Tua melalui himbauan supaya tidak mengijinkan siswa berkonvoi ketika merayakan kelulusan. Sedangkan terkait dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang dapat dialami oleh pengguna jalan raya termasuk para pelajar, telah tersedia line telpon nomor 118 untuk pertolongan pada kecelakaan. Tindakan yang dilakukan meliputi Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), hingga tindakan operasi. Bagi semua masyarakat yang mengalami, pada 24 jam pertama tidak perlu membayar.

Dalam kegiatan operasi/razia pelajar, Dinas Ketertiban menjadi *leader*, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Humas Pemerintah Kota, dan Kepolisian untuk melakukan operasi/razia pelajar pada jam kerja. Operasi biasa dilakukan di titik-titik pembolosan dan tempat-tempat mangkal seperti: mall, warnet, warung burjo, warung tegal, kawasan sekitar stadion, dan lain-lain. Jika dalam operasi pelajar terjaring pelaku vandalisme, maka disampaikan kepada Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan (Wakasiswa) sekolah yang

bersangkutan. Selanjutnya, dilakukan pembinaan yang bersifat persuasif, kemudian dilaporkan kepada orang tua, dan diterapkan sanksi berupa pemberian poin.

Terkait dengan vandalisme, sebenarnya telah ada Peraturan Walikota yang mengatur, namun perlu dikawal oleh pihak Dinas Ketertiban karena peristiwa corat-coret dilakukan di luar jam sekolah, yaitu pada malam dan dini hari.

“Kalau kejadiannya malam atau dini hari, mestinya statusnya bukan lagi pelajar, dan oleh karenanya orang tua merupakan pihak yang paling bertanggung jawab. Pada jam tersebut, Dinas Pendidikan sudah tidak menjangkau. Mengapa mereka dibiarkan melakukan aktivitas pada malam dan dini hari? Bagaimana pengawasan orang tua. Jika mereka kost, bagaimana pengawasan Bapak/Ibu kostnya? ”.

Walikota (periode kepemimpinan Bp. Herry Zudianto) pernah memfasilitasi pelajar untuk mural, sebagai wahana mengekspresikan potensi pelajar. Sedangkan terkait dengan kasus fenomenal kecelakaan anak di bawah umur, sesungguhnya sejumlah sekolah telah melarang para siswanya mengendarai sepeda motor ke sekolah. Salah satu contoh, peraturan yang pernah diterapkan di SMA N 7, bahwa pelajar yang belum memiliki SIM tidak diperkenankan mengendarai sepeda motor dan disarankan untuk diantar-dijemput oleh orang tua atau menggunakan sarana transportasi umum. Kebijakan di SMA N 7 tersebut belum diterapkan di sekolah yang lain. Salah satu pertimbangannya bahwa pada umumnya masih ada kendala, yaitu orang tua sendiri memfasilitasi kendaraan bermotor bagi anaknya, karena alasan kesibukan dan belum terjaminnya layanan moda transportasi umum.

Pencegahan kekerasan juga dilakukan melalui kerjasama dengan masyarakat diimbau melalui Pak Camat. Untuk kerjasama dengan institusi swasta seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) belum ada. Dengan demikian, sesungguhnya sudah banyak upaya pencegahan kekerasan pelajar, namun hasilnya belum maksimal. Meski demikian, jika dilihat dari persentase, masih dikategorikan rendah dibandingkan kota lain seperti Jakarta dan Bandung. Salah satu sekolah dapat dijadikan model di kota Yogyakarta, yaitu SMA N 6 yang telah berhasil mengidentifikasi bahwa akar kekerasan pelajar adalah doktrin-doktrin yang ditanamkan pada saat MOS dan latbasis (latihan baris-berbaris siswa). Sebagaimana secara umum diketahui, pada masa orientasi awal, di sejumlah sekolah diselenggarakan MOS dan Latbasis. Kalau di sekolah Muhammadiyah biasa menyelenggarakan FORTASI. Pada awalnya, MOS hanya berlangsung selama 3 hari

dengan materi ruang (*indoor*). Sedangkan pada akhir kelulusan siswa, seringkali juga terjadi momentum meluapkan kegembiraan karena lulus, dengan cara melakukan corat-coret pada baju seragam dan berkonvoi dengan kendaraan bermotor. Momentum ini seringkali berpotensi menimbulkan gesekan antar sekolah. Pernah terjadi di SMA Muhammadiyah 7, pada pengumuman kelulusan siswa tidak dilarang untuk hadir ke sekolah. Karena mereka bertemu dengan teman-teman di sekolah, untuk meluapkan kegembiraan dengan cara berkonvoi menggunakan sepeda motor, maka akhirnya memerlukan pengawalan polisi untuk menghindari kemungkinan gesekan dengan pelajar dari sekolah lain.

Yang menggembirakan, dalam perkembangannya, sejumlah sekolah telah mengganti format pengumuman kelulusannya, misalnya di:

- SMA Muhammadiyah 2 (Muha)

Pengumuman dilakukan bersamaan dengan kegiatan Bakti Sosial (Baksos) di daerah kritis (Tepus Gunungkidul). Para pelajar secara berombongan berangkat dan pulang menggunakan bus.

- SMA Muhammadiyah 1 (Muhi)

Mengadakan pengajian di sekolah pada saat pengumuman kelulusan.

- SMA Muhammadiyah 3 (Muga)

Mengumumkan kelulusan melalui internet.

Selain itu, menyangkut kebijakan tata kota dan tata ruang daerah, juga perlu dipertimbangkan. Kasus tawuran pelajar seringkali terjadi di sekitar stadion yang areanya luas, namun dari aspek penerangan jalan umum tidak memadai alias redup. Selain itu, Yogyakarta memiliki predikat ganda, sebagai kota pendidikan, sekaligus kota wisata. Hal tersebut berimplikasi pada tersedianya tempat-tempat hiburan yang ada di pusat kota maupun di kuar kota yang dapat dengan mudah diakses oleh para pelajar yang masih berusia remaja. Hal tersebut berimplikasi pada fenomena penyalahgunaan miras, narkoba, dan sex bebas. Kiranya perlu regulasi berupa kebijakan strategis yang sinergis, sehingga kondusif bagi para pelajar untuk bersekolah. Seperti telah diterapkan di sejumlah daerah seperti: di Yogyakarta telah ada Peraturan yang mengatur bahwa pengunjung warnet tidak boleh memakai seragam.

“ Di Makassar terdapat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pakaian seragam bagi siswa putri (siswi) adalah rok panjang. Selain itu, ada aturan yang mengatur bagaimana posisi siswa putri ketika membonceng sepeda motor. Siswi tidak boleh membonceng dengan cara mengangkang.”.

(wawancara, 27 Juli 2013)

Ke depan perlu dipikirkan regulasi melalui kebijakan dalam konteks otonomi daerah, perlu kebijakan yang tidak saling berbenturan antar instansi, untuk menyelamatkan generasi muda dari kekerasan. Mekanisme regulasi selama ini melalui Peraturan Walikota dan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan. Untuk peraturan dan tata tertib sekolah, pada dasarnya terdapat acuan yang sama bagi SMA Negeri maupun Swasta. Namun demikian, dalam praktik di masing-masing sekolah, dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap sekolah.

Berdasarkan paparan di atas, maka strategi yang dilakukan untuk mencegah kekerasan antara lain:

- *Line service* (layanan telpon dan sms 24 jam)
- Patroli dan operasi ketertiban
- Satu Sekolah Dua Polisi (SSDP)
- Pengefektifan Forum MGPO (Musyawarah Guru Pembina OSIS) dan FKPO (Forum Komunikasi Pengurus OSIS)
- Pelatihan untuk Pengurus OSIS: *Leadership/Kepemimpinan, Motivasi*
- Jembatan Persahabatan
- Pertukaran Pelajar antar Daerah
- Pendekatan Persuasif
- Pengembangan Karakter dan Budi Pekerti melalui kegiatan Bakti Sosial, Pengajian, Pembiasaan Ibadah

Kerjasama dalam pencegahan kekerasan pelajar telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan bekerjasama dengan instansi lain, seperti: Pemerintah Kota Yogyakarta, Kepolisian, Dinas Ketertiban, dan kerjasama dengan Masyarakat sekitar sekolah.

Selanjutnya berdasarkan levelnya, strategi pencegahan kekerasan pelajar dapat dibedakan sebagai beikut:

- Level Individual
- Patroli di kawasan beresiko kekerasan

- Level Institusional

FKPO, Jembatan Persahabatan, dan Pertukaran Pelajar Antar Daerah

Sementara itu berdasarkan studi dokumen, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Bp. EHS (KR, 23 Mei 2013) menambahkan bahwa instansinya sudah cukup ketat dalam menindak perkelahian pelajar. Melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41/2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Sekolah, pelajar yang terbukti berkelahi (terlibat tawuran) mendapat poin 100. Padahal jika poin siswa sudah mencapai 100 atau lebih, maka sanksinya dikeluarkan dari sekolah (dikembalikan kepada orang tua). Meskipun banyak siswa yang telah dikeluarkan, ternyata perkelahian pelajar masih juga terjadi. Selain itu, pihak sekolah hanya memiliki wewenang melakukan pembinaan saat jam pelajaran. Sementara perkelahian justru seringkali terjadi di luar jam pelajaran. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mendukung upaya kepolisian untuk memasukkan pada tindakan kriminal dan memproses secara hukum.

Berdasarkan studi dokumentasi terhadap pemberitaan Koran (KR, 25 Agustus 2013) aksi vandalism atau tindakan corat-coret di berbagai ruang public di Kota Yogyakarta semakin meresahkan. Bahkan tidak terkendali. Jika tidak segera diambil tindakan, maka hal itu dikhawatirkan akan mencoreng citra Yogyakarta sebagai kota wisata. Ruang publik yang kerap menjadi korban vandalism ialah pada bagian dinding atau tembok bangunan, jalan raya, jembatan, maupun trotoar. Bahkan papan penunjuk arah di setiap persimpangan juga tak luput menjadi sasaran oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ketua Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta, Bp. DPE (KR, 25 Agustus 2013) mengaku, sejumlah wisatawan sudah mulai mengeluhkan vandalism tersebut. Sehingga instansi terkait di Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta seharusnya responsive terkait dengan keluhan itu. Sebelum ada keluhan, sebaiknya sudah ditertibkan, karena terkait dengan estetika kota yang wajib dijaga. Aksi vandalism sudah masuk pada kategori sangat meresahkan. Bahkan beberapa kawasan cagar budaya seperti di Kotabaru maupun Pojok Beteng juga banyak ditemui corat-coret.

Selain melakukan penertiban, Bp. DPE mengusulkan agar Pemkot memberikan ruang bagi seniman *wall painting* untuk berekspresi. Terutama pembuatan seni mural di tempat-tempat terbuka yang menjadi potensi aksi vandalism. Mural yang menggambarkan sejarah

Kota Yogyakarta justru akan memberikan nilai lebih bagi wisatawan. Tinggal bagaimana pemerintah bisa mewadahi seniman mural agar menggeser kegiatan vandalistik.

Sementara itu, Kepala Seksi Operasi Dinas Ketertiban kota Yogyakarta, Bp. BL (KR, 25 Agustus 2013) mengaku, pihaknya sudah menjaring belasan orang yang terbukti melakukan vandalisme. Namun demikian, sebagian besar pelaku ialah pelajar yang berusia di bawah 17 tahun, sehingga tindakan yang diberikan masih sebatas pembinaan dengan menghadirkan pihak sekolah dan orang tua. Tindakan corat-coret selalu dilakukan pada malam hari. Petugas yang diterjunkan seringkali juga kewalahan mengangkap tangan pelaku. Biasanya mereka bergerombol tengah malam. Setelah melakukan corat-coret, mereka langsung pergi. Makanya operasi yang dilakukan secara tertutup dan terus *mobile*.

Di lain pihak, Dinas Ketertiban juga mulai rutin menggelar operasi senjata tajam para pelajar. Meski sudah menjaring beberapa orang dan melakukan pembinaan, angka kekerasan belum bisa dibendung. Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Bp. CW mendukung penuh program bersama antara Pemkot dan Polresta Yogyakarta. Instansi-instansi tersebut akan menindaklanjuti dengan merumuskan berbagai opsi program yang bisa dilakukan untuk penanggulangan bersama (KR, 23 Mei 2013).

Berdasarkan studi dokumen, dapat dideskripsikan bahwa Pemerintah Kota dan Polresta Yogyakarta membuat kesepakatan untuk melaksanakan program bersama dalam menanggulangi tindakan perkelahian pelajar. Meskipun masing-masing instansi telah memiliki program rutin, namun ternyata masih belum mampu meredan aksi anarkis pelajar tersebut. Beberapa program yang sudah digulirkan oleh Polresta Yogyakarta antara lain:

- a. Satu sekolah dua polisi (SSDP)
- b. Peningkatan kontinyuitas patroli ketertiban
- c. Proses hukum bagi pelajar yang melakukan tindak kriminalitas
- d. Jembatan Persahabatan

Polresta Yogyakarta menerjunkan 354 personel untuk mengamankan pengumuman kelulusan SMA/SMK. Selain itu, di setiap sekolah juga ditempatkan 2 anggota polisi. Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol MM (KR, 24 Mei 2013) mengungkapkan bahwa personel tersebut diterjunkan ke sejumlah titik, yang terdiri dari 190 personel tim gabungan. Pengamanan itu bersifat terbuka dan tertutup. Di Yogyakarta terdapat 82

sekolah dan setiap sekolah disediakan 2 petugas untuk mengawasi pelaksanaan pengumuman hasil Ujian Nasional (UN).

C. PROFIL SEKOLAH

1. SMA 10 YOGYAKARTA: SEKOLAH DI KAWASAN BERESIKO

a. Visi

Terwujudnya generasi yang beriman, berilmu, berilmu, terampil, dan berakhhlak mulia (Gema Mulia)

b. Indikator Pencapaian Misi

- i. Taat menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya yang ditunjukkan dengan nilai mata pelajaran pendidikan agama 85% di atas 80.
- ii. 100 % siswa lulus UN dengan rata-rata nilai akhir untuk setiap mata pelajaran yang diujikan lebih atau sama dengan 8.00 dan nilai terendahnya 7.00.
- iii. 65 % lulusan diterima di Perguruan Tinggi dengan program studi terakreditasi minimal Baik.
- iv. Dalam satu tahun mampu menjuarai minimal 3 lomba bidang akademik dan/atau non akademik pada tingkat provinsi.
- v. Memiliki karakter yang baik (religius, jujur, toleran, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menggapai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab), yang dibuktikan dengan nilai kepribadian minimal Baik.

c. Misi

- i. Mewujudkan lulusan yang beriman dan bertakwa melalui penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang dianutnya.
- ii. Mewujudkan lulusan yang berilmu melalui pelaksanaan pembelajaran dan bimbingan yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan.
- iii. Mewujudkan lulusan yang memiliki keterampilan atau smkill yang mantap melalui pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler bidang akademik dan non akademik yang berkualitas.

iv. Mewujudkan lulusan yang berakhhlak mulia melalui penanaman nilai-nilai karakter bangsa (religius, jujur, toleran, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menggapai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab) dalam setiap proses pembelajaran dan bimbingan.

SMA Negeri 10 Yogyakarta merupakan salah satu sekolah yang secara fisik memiliki keterbatasan dalam aspek keruangan. Luas lahan sekolah yang tidak terlalu luas dan lokasinya yang berdekatan dengan kawasan pemukiman padat membuat pengelola sekolah mengembangkan dan merenovasi sekolah menjadi 3 lantai. Gerbang sekolah SMA Negeri 10 Yogyakarta nampak kokoh dan kuat, namun terlihat kurang proposisional jika dibandingkan dengan luas sekolah. Ketika jam pelajaran berlangsung, pintu gerbang utama ditutup, dan hanya dibuka pintu kecil di sebelahnya yang berdekatan dengan pos satpam. Pintu masuk maupun keluar melalui satu pintu gerbang. Fungsi gerbang ini adalah untuk memudahkan petugas keamanan dalam menjaga keamanan sekolah dan memantau lalu lalang para tamu, sehingga keadaan sekolah menjadi kondusif.

Pos satpam di SMA Negeri 10 Yogyakarta memiliki ukuran bangunan yang cukup luas dan lebar. Setiap harinya ada 4 petugas jaga yang terbagi menjadi 2 shift. Fasilitas di dalam pos satpam ini cukup lengkap, karena terdapat televisi sebagai sarana hiburan dalam mengatasi kejemuhan pada saat melakukan penjagaan. Setiap tamu yang datang harus melapor dulu dengan mengisi buku tamu dan menuliskan maksud/tujuan datang ke sekolah tersebut.

Lobi di sekolah ini ukurannya terbilang sangat kecil, cukup bersih, namun pencahayaannya kurang. Di lobi ini terdapat sebuah meja yang dijaga oleh guru piket untuk mencatat siswa yang terlambat datang ke sekolah. Terdapat juga papan pengumuman dan papan visi misi sekolah. Namun karena keterbatasan area olah raga, lobi ini sering juga digunakan oleh siswa untuk olahraga, misalnya bulu tangkis.

Halaman sekolah SMA N 10 Yogyakarta sebenarnya luas, namun karena sekolah sedang direnovasi, sekarang halaman atau lapangan ini beralih fungsi sebagai tempat parkir sepeda motor. Berdasarkan observasi pada tanggal 22 Juni 2015, pada

hari-hari biasa, halaman sekolah dipenuhi oleh kendaraan bermotor, karena halaman sekolah merangkap sebagai tempat parkir. Halaman ini juga digunakan untuk melaksanakan upacara bendera serta kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah maupun oleh instansi terkait lainnya. Keterbatasan ruang menyebabkan banyak aktivitas siswa yang seharusnya dapat dilakukan di lapangan atau halaman ini menjadi terganggu. Mereka memanfaatkan halaman kosong untuk berolahraga dan melakukan aktivitas di luar kelas.

Berdasarkan pengamatan pada tanggal 27 Juli 2015, pembangunan dan renovasi gedung sekolah menyebabkan jalanan di depan sekolah menjadi macet karena ada alat-alat berat. Halaman sekolah menjadi kurang kondusif dan terasa menyempit, karena halaman sekolah juga difungsikan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor, apalagi bersamaan dengan dimulainya kegiatan sekolah seperti MOPD/MOS. Karena lapangan olah raga di SMA 10 juga sangat terbatas, maka siswa berolah raga di alun-alun utara.

Bangunan SMA Negeri 10 Yogyakarta merupakan bangunan dengan arsitektur lama. Pada saat penelitian ini berlangsung, pihak pengelola sekolah sedang melakukan renovasi bangunan sekolah. Bangunan tersebut terkesan kurang terawat dan jarang dilakukan pengecatan secara berkala hal ini terlihat dengan banyaknya cat tembok yang terkelupas. Ruang kepala sekolah di SMA N 10 Yogyakarta terletak di sebelah gedung yang sedang dalam proses pembangunan. Sehingga di depan ruangan ini terlihat kotor, berantakan, dan banyak sekali bahan bangunan yang terbengkelai. Ruang ini kurang mendapat pencahayaan matahari. Di dalam ruangan ini terdapat meja kepala sekolah, beserta wakil-wakilnya. Di dalam ruang ini terdapat beberapa monitor komputer yang dilengkapi dengan *printer* dan *scanner*.

Selain itu terdapat beberapa lemari yang kurang tertata dengan rapi dan berdebu. Di atas lemari terdapat piala-piala yang berjajar, beberapa barang dan dokumen yang kurang memperhatikan komposisi dan tata letak, sehingga terlihat berantakan, dan memberikan kesan kurang nyaman dengan kondisi tersebut. Meja ruang kepala sekolah berukuran 2 x 2 meter terpisah dengan meja yang lain dibatasi dengan lemari yang berisi plakat dan beberapa piala. Di meja kepala sekolah terdapat

dokumen yang bertumpuk di meja yang kurang tersusun rapi. Sebagian besar perabotan yang ada nampak berdebu.

Ruang guru di SMA N 10 Yogyakarta berukuran cukup besar, namun karena penataan ruang yang kurang baik, ruangan ini terasa sempit, pengap dan kotor. Meja guru memang ditata dengan rapi, namun banyaknya tumpukan berkas-berkas milik guru dan terlalu banyaknya meja guru memberikan kesan sempit. Ada beberapa meja yang sudah dialihfungsikan untuk menempatkan barang. Ruangan ini memiliki dua pintu. Penerangan dalam ruangan ini kurang memadai, karena hanya ada fentilasi dan beberapa jendela yang sudah jarang difungsikan. Ruang guru di sekolah ini dilengkapi dengan lemari es yang terletak di bagian depan berdekatan dengan pintu masuk, sehingga dirasa kurang efektif. Dalam ruang ini terdapat dua kipas angin gantung yang besar dan dapat membantu sirkulasi udara menjadi lebih baik.

Interaksi guru dengan guru dan guru dengan siswa terjalin dengan baik. Guru yang berpapasan saling sapa dan senyum. Ruang TU terletak di samping ruang guru. Ukuran ruangan ini hampir sama dengan ruang kepala sekolah. Di dalamnya terdapat beberapa meja petugas TU, beberapa unit komputer dan dua kursi yang berjajar di depan pintu yang difungsikan untuk menerima tamu. Selain itu ada lemari yang berada di pojok dan berisi dokumen yang agak kurang terawat karena jarang dipakai atau bahkan tidak dipakai dan tidak pernah dibersihkan. Meja-meja tidak ditata dengan baik, ada meja yang berjajar, saling berhadapan, maupun saling membelaangi.

Ruang wakil kepala sekolah di SMA N 10 Yogyakarta letaknya berdampingan atau satu ruangan dengan ruang kepala sekolahnya. Kondisi ruangan kurang rapi, banyak buku berserakan di atas meja dan banyak kabel-kabel yang bergantung di dinding. Secara umum ruang kelas di SMA N 10 Yogyakarta memiliki fasilitas LCD, proyektor, papan tulis, kipas angin, dan perlengkapan umum di dalam kelas seperti bendera, gambar pahlawan, jadwal piket, dan lain-lain. Semua lantai kelas di sekolah ini sudah dikeramik. Seperti pada umumnya, meja kursi yang dipakai di sekolah ini juga terbuat dari kayu. Pada saat melakukan observasi, pembelajaran di kelas berlangsung dengan kondusif. Tidak ada siswa yang berkeliaran di luar kelas selain kelas pendidikan jasmani. Lapangan yang dimiliki sekolah ini terbilang sempit, dan dipakai untuk parkir kendaraan bermotor, sehingga pada saat pembelajaran pendidikan

jasmani berlangsung siswa melakukan olahraga bulu tangkis di lobi sekolah, olahraga ping pong di ruang laboratorium biologi yang biasanya juga difungsikan untuk ruang aula.

Salah satu kebiasaan yang ditonjolkan di sekolah ini adalah adanya pendalaman materi yang diadakan setiap hari dan dimulai pukul setengah 7 sampai pukul setengah delapan. Setelah itu dikumandangkan lagu wajib Indonesia Raya, dan para siswa, guru, karyawan, satpam dan semua warga sekolah lainnya menyanyikan lagu di ruang kelas atau ruangan masing masing dengan sikap sempurna. Kebiasaan ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan merupakan salah satu alternatif untuk pengembangan pendidikan karakter.

Ruangan ini terletak di sebelah ruang kelas dan tangga ke lantai dua. Ada dua lemari piala yang berjajar. Pialanya tidak disusun dengan rapi letaknya dan terlihat kotor karena jarang dibersihkan. Di dalam ruangan ini terdapat bilik-bilik yang dindingnya terbuat dari kayu dan pintunya terbuat dari kain. Terdapat kursi dan meja tamu, kondisinya memang masih layak pakai, namun perawatan yang kurang baik membuat kursinya agak terlihat lusuh. Selain itu, juga terdapat lima meja guru BK yang di atas beberapa meja banyak dokumen yang tertumpuk berantakan.

Ruang perpustakaan SMA Negeri 10 Yogyakarta terlihat cukup luas dengan kursi-kursi dan meja-meja serta rak-rak buku yang tertata dengan rapih. Tidak semua siswa SMA Negeri 10 Yogyakarta terdaftar menjadi anggota perpustakaan di perpustakaan SMA Negeri 10 Yogyakarta. Terdapat 5 laboratorium di SMAN 10 Yogyakarta, yaitu laboratorium fisika, kimia, biologi, komputer, bahasa serta multimedia. Peralatan dan fasilitas yang ada dalam masing-masing laboratorium cukup lengkap. Tetapi pencahayaan dan udara didalam laboratorium kimia dan fisika kurang. Keadaan di dalam laboratorium bahasa sangat panas karena fasilitas yang disediakan hanya kipas angin saja. Laboratorium komputer ada di sekolah ini tetapi sedang dalam proses pembaharuan. Sedangkan di laboratorium biologi jika sedang tidak ada praktik dirangkap menjadi tempat kegiatan olahraga seperti tenis meja dan senam lantai karena keterbatasan ruangan di sekolah ini.

Sebagai sarana peribadatan, di sekolah ini tersedia:

- a) Mushola

Masjid di SMA Negeri 10 Yogyakarta ini berada di lantai 2 sekolah. Ada 2 tangga untuk menuju ke masjid, yaitu tangga yang berada di lapangan dan tangga yang berada di dekat ruang BK. Masjid tersebut nyaman, bersih, dan terbilang cukup luas. Tetapi keberadaan masjid ini kurang diketahui oleh tamu dari luar yang datang ke sekolah karena tidak ada nama masjid dan posisi masjid yang berada di pojok lantai 2. Karena letaknya di sudut sekolah maka bangunan masjid ini berbentuk miring. Terdapat *wallpaper* bertuliskan kaligrafi yang besar di masjid ini. Pencahayaan dan udara sangat baik karena terdapat banyak sekali jendela dan ventilasi. Terdapat fasilitas kipas angin sehingga hawa di dalam masjid ini sangat teduh. Masjid yang seharusnya nyaman untuk beribadah seringkali ramai oleh siswi yang baru saja selesai olahraga, sekedar digunakan untuk beristirahat, membersihkan diri, dan berganti pakaian.

Fasilitas yang disediakan masjid ini cukup lengkap, semua perlengkapan ibadah seperti mukena, sarung, dan Al-Quran tidak tertata dengan rapi pada tempatnya masih banyak mukena yang berserakan di lantai. Mukena dan sarung yang disediakan banyak yang kotor dan bau. Tempat wudhu yang disediakan ada yang dibawah depan ruang BK dan ada yang di sekitar masjid. Tempat wudhu yang di depan ruang BK atau ruang kelas ini agak kotor. Tetapi tempat wudhu yang berada di sekitar masjid cukup bersih dan nyaman. Tempat wudhu pria ada di sebelah kanan masjid dan tempat wudhu wanita ada di sebelah kiri masjid dan tempat wudhu wanita dilengkapi dengan tirai agar tidak terlihat dari luar.

b) Ruang Keagamaan

Dua ruangan ini disediakan untuk siswa SMA Negeri 10 Yogyakarta yang beragama Katolik, Kristen, Budha, dan Hindu. Ruangan ini hampir sama seperti ruang kelas karena fungsi ruangan ini untuk memberi materi keagamaan. Di saat siswa yang beragama muslim mendapatkan materi pendidikan agama Islam maka siswa yang beragama lain diberikan materi di ruangan ini oleh guru keagamaan masing-masing. Ruangan ini digunakan secara bergantian, maka dibuat jadwal agar tidak bentrok.

Ruang OSIS di SMA Negeri 10 Yogyakarta berada di sebelah ruang BK. Ruangannya yang tidak terlalu luas membuat terlihat tidak terawat. Fasilitas yang ada di dalam ruang OSIS pun kurang mencukupi. Tidak terdapat komputer di dalamnya, bahkan ruang OSIS juga difungsikan sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang. Keadaan ruang OSIS tidak mencerminkan banyaknya kegiatan siswa disana, bahkan di depan pintu ruang OSIS digunakan untuk memarkir kendaraan.

UKS SMA Negeri 10 Yogyakarta terletak di samping ruang kepala sekolah. UKS ini mempunyai dua ruangan yang terpisah, yaitu ruangan putri dan ruangan putra. Terdapat dua tempat tidur di setiap ruangannya yang terpisah oleh tirai. Perlengkapan yang dibutuhkan di UKS sangat kurang. Lemari penyimpanan obat dan kotak P3K pun kosong sama sekali. Tak terjumpai banyak obat di dalam UKS, hanya ada beberapa obat yang terdapat di dalam lemari. Ruangannya pun sangat sempit dan supek dan juga gelap. Banyak debu serta sangat sedikit cahaya matahari yang dapat masuk ruangan karena posisi jendela yang berada di ujung ruangan. Meskipun tersedia bantal di tempat tidur UKS namun tidak terlihat ada selimut di UKS.

Hanya ada 1 lapangan di SMA Negeri 10 Yogyakarta yaitu lapangan basket yang merangkap menjadi lapangan futsal, upacara bendera, dan kegiatan lainnya. Bahkan lapangan tersebut dijadikan sebagai tempat parkir kendaraan oleh warga sekolah. Minimnya fasilitas lapangan dan halaman sekolah yang luas menghambat siswa yang ingin melakukan praktik olahraga. Siswa memanfaatkan *lobby* sekolah untuk bermain badminton dan laboratorium biologi untuk bermain tenis meja dan senam lantai.

SMA Negeri 10 Yogyakarta mempunyai 2 kantin di dalam sekolah. Yang pertama berada di bagian samping sekolah dan yang kedua berada di depan ruang guru. Kantin-kantin ini menyediakan beragam makanan berat dan makanan ringan juga berbagai macam minuman. Pada kantin yang berada di bagian samping sekolah sudah cukup bagus dalam hal penataan tempat ruangan, terdapat beberapa bangku panjang disertai dengan mejanya, pengurus kantin cukup ramah. Namun yang disayangkan, penempatan kantin kedua yang berada di depan kantor guru

dirasa kurang tepat, selain itu masih terdapat sampah kertas dan bekas-bekas kardus di depan kantin yang membuat kantin terkesan kurang bersih. Petugas kantin pun tidak ramah sama sekali.

Selain dua kantin yang ada, di SMA Negeri 10 Yogyakarta juga terdapat sebuah koperasi yang berada bersebelahan dengan kantin di depan kantor guru. Di koperasi ini menyediakan sebuah mesin fotocopy dan berbagai macam alat tulis, selain itu juga terdapat beberapa macam makanan ringan. Ruangan kantin ini terbilang cukup sempit dengan barang-barang yang banyak terdapat di dalamnya.

Aula di sekolah ini terletak di lantai dua. Ruangan ini berfungsi untuk tempat pertemuan guru dengan wali murid, rapat guru, maupun penataran guru. Ruangan ini luas, dan merupakan ruangan yang fleksibel. Pada saat aula tidak dipakai, biasanya ruangan ini digunakan untuk siswa yang sedang mengikuti pelajaran olahraga untuk melakukan tenis meja/ping-pong, atau digunakan untuk kegiatan laboratorium biologi. Jadi disana terdapat banyak sekali perabotan lab. Biologi seperti alat peraga, lemari yang berisi awetan hewan maupun tumbuhan dan lain-lain. Ruangan ini memiliki penerangan yang cukup namun agak sedikit kotor dan berantakan. Ruangan ini juga terasa pengap, karena hanya dilengkapi dengan dua kipas angin yang kecil.

Toilet yang ada di SMA Negeri 10 Yogyakarta terdiri dari 11 toilet. 3 toilet guru dan karyawan dan 8 toilet siswa-siswi. Letak toilet kurang strategis karena berada di belakang sekolah dan ada juga yang berada di balik tembok. Hampir semua toilet kurang terawat kebersihannya. Padahal sudah ada himbauan untuk menjaga kebersihan toilet dan mematikan kran serta memakai air seperlunya. Tetapi masih terlihat kran yang tidak ditutup dengan rapat sehingga air terus mengalir. Tempat sampah yang disediakan di toilet pun sangat kotor dan kurang enak dipandang mata.

Peletakan tempat sampah di SMA Negeri 10 Yogyakarta sudah sesuai. Tempat sampah berada di depan ruangan kelas dan di dalam kelas. Ada 3 macam jenis tempat sampah yang disediakan, yaitu sampah plastik, kaca, dan kertas. Tetapi masih terlihat tempat sampah yang tidak terawat dan meninggalkan bau yang tak sedap. Siswa sudah tertib membuang sampah pada tempatnya. Hal ini diperjelas

karena sudah tidak banyak sampah yang berserakan di sekitar sekolah. Taman di SMA Negeri 10 Yogyakarta sangatlah kurang. Di sana hanya ada beberapa pot tanaman yang menghiasi depan kelas. Tidak semua kelas terdapat pot-pot bunga di depannya, sehingga terkesan suasana sekolah gersang. Pepohonanpun jarang ditemui disana. Itu mungkin karena bentuk dan letak sekolah yang sangat sempit.

Ketika memasuki SMA Negeri 10 Yogyakarta kita langsung disuguhi area parker yang memenuhi halaman sekolah dan kurang tertata. Tempat parkir di sini dibedakan menjadi 2 yaitu tempat parkir beratap bagi guru karyawan dan tempat parkir siswa yang tidak ada atapnya. Tempat parkir siswa di SMA Negeri 10 Yogyakarta menggunakan lapangan basket, sehingga jika ada pembelajaran olah raga menjadi terganggu. Di SMA Negeri 10 Yogyakarta terdapat beberapa papan pengumuman di beberapa tempat. Papan pengumuman ini berisi pengumuman-pengumuman tentang kegiatan siswa dan juga pengumuman universitas-universitas.

Di SMA Negeri 10 Yogyakarta sangat sulit ditemukan papan slogan. Papan slogan hanya ditemui di beberapa tempat saja, itupun tidak terawat dan hanya sedikit jumlahnya. Papan slogan yang ditemui pun tidak ada yang berisi tentang motivasi siswa, hanya berisi tentang himbauan-himbauan saja. Di SMA Negeri 10 Yogyakarta banyak terdapat gudang di beberapa sudut ruangannya. Karena disana banyak ruangan yang tidak terawat dan kotor yang difungsikan sebagai tempat menyimpan barang-barang yang sudah tak terpakai. Letaknya pun tak beraturan, ada yang terletak di sebelah kamar mandi siswa, ada yang terletak di samping perpustakaan bahkan di sebelah kantor guru. Penataan barang yang ada didalamnya pun kurang rapi dan sembarangan. Cara berpakaian siswa SMA Negeri 10 Yogyakarta secara umum belum dapat dikatakan rapi karena masih banyak siswa yang menggunakan baju tetapi tidak dimasukkan padahal peraturan di sekolah harus memasukkan pakaian mereka. Bentuk rok setiap siswa juga berbeda-beda walaupun tidak ada siswa yang melanggar dalam menggunakan seragam.

Tempat cuci tangan di sekolah ini tidak dirawat dengan baik. Ada tempat cuci tangan yang posisi kerannya dalam keadaan menyala namun tidak ada satupun yang mempedulikan hal tersebut. Siswa maupun guru bersikap acuh tak acuh. Tempat cuci tangan ini berada disetiap pojok bangunan, yang jumlahnya ada 4

buah. Kondisinya ada yang bersih, ada juga yang kotor dan penempatannya tidak strategis. Hal tersebut menunjukan rasa memiliki siswa dan guru sangat kurang.

Di SMA N 10 Yogyakarta terdapat empat tangga naik, yaitu tangga ke lantai 2 menuju ruang kelas, tangga ke lantai dua menuju ke mushola mushola, tangga ke lantai dua menuju ke laboratorium biologi, dan satu tangga menuju ke gudang. Tangga ke kelas dan ke laboratorium memiliki lebar yang hampir sama dan memiliki sirkulasi udara serta penerangan yang cukup. Namun pada tangga gudang dan tangga mushola kurang pantas disebut sebagai sebuah tangga, karena ukurannya yang kecil yang gelap karena tertutup oleh tembok. Terlebih pada tangga yang menuju gudang, banyak sekali barang inventaris yang tidak terpakai dibiarkan begitu saja. Secara umum lorong yang berada di sekolah ini cukup terang, namun ada satu lorong yang sangat gelap meskipun itu pada siang hari. Lorong ini merupakan lorong toilet karena toiletnya itu berjajar dan berada di dekat dapur. Di sana ada kursi yang tidak pada tempat semestinya.

Pada pengamatan tanggal 17 Agustus 2015, sekolah menyelenggarakan upacara peringatan kemerdekaan RI ke 70 pukul 7.15 WIB, namun baru dimulai pukul 7.30 WIB. Karena sekolah gedung sedang dalam perbaikan (renovasi), peserta upacara adalah guru, karyawan, dan siswa kelas X dan XI saja. Pada saat upacara akan dimulai, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan (Ibu Purwantini), mengumumkan bahwa siswa yang tidak mengenakan topi dan sepatu hitam, diminta menempati barisan tersendiri.

Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan kota Yogyakarta, SMA 10 Yogyakarta dapat dikatakan sebagai sekolah negeri yang beresiko, karena dari aspek akademik merupakan sekolah negeri yang berada di ranking bawah DALAM RTO, kondisi sekolah kurang kondusif dari aspek keruangan, juga berada di kawasan padat penduduk dan aktivitas, serta terdapat geng pelajar Smuten. Untuk kasus kekerasan pelajar di sekolah ini, dua tahun terakhir sudah mulai menurun. Pada tahun 2012/2013 pernah terjadi tawuran antara siswa SMA 10 dengan siswa SMA 3 Muhammadiyah. Berdasarkan pengamatan guru BK, pelaku tawuran memiliki karakteristik tertentu, yaitu memiliki kebiasaan membuat ulah pada proses pembelajaran, mengintimidasi teman-teman di sekolah, dan di luar sering nglithih.

Anak-anak seperti itu biasanya nilainya rendah di bawah KKM, bukan karena bodoh, namun karena semangat belajarnya rendah dan waktu terbuang percuma sehingga kurang belajar.

Selain tawuran pelajar antar sekolah, di SMA 10 pernah terjadi beberapa kasus seperti: pengrusakan motor, ejek-ejekan supporter yang berujung pada benturan fisik setelah pertandingan olah raga dan coret-coret baju masih ada. Belakangan ini konvoi sudah tidak begitu memancing emosi. Vandalism atau coret-coret tembok sudah berkurang dan anak yang masuk geng sudah menurun.

Proses reproduksi geng Smuten biasanya berawal sejak kegiatan MOS berlangsung. Pada saat itu, alumni datang ke sekolah, di tempat parkir atau warung tempat nongkrong di depan sekolah pada siang/sore hari. Aktivitasnya antara lain makan dan minum bersama, kadangkala mabuk pada hari Sabtu sore. Ada semacam aturan tak tertulis di kalangan siswa, jika kakak-kakak belum pulang, adik-adik kelas belum boleh pulang. Siswa yang potensial menjadi sasaran perluasan geng adalah siswa yang memiliki rekam jejak istimewa sejak SMP, siswa yang tidak pendiam (resek), nggeleng, dan siswa yang ke sekolah naik sepeda motor menjadi prioritas. Siswa dari luar daerah yang kost dan belum memiliki banyak teman juga sering didekati, dibuat tergantung pada geng, sehingga mudah dipengaruhi. Biasanya siswa dari luar daerah yang menjadi sasaran adalah manutan, pah-poh, atau ngah-ngoh. Seiring dengan kemajuan teknologi, media sosial juga berfungsi dan mengambil peran dalam perluasan jaringan dan reproduksi geng. Strategi tersebut dilakukan dengan tujuan supaya spirit geng Smuten tetap hidup. Mereka ingin mempertahankan eksistensi dan tidak rela nama geng Smuten hilang. Ada konformitas di dalam kelompok yang membedakannya dengan siswa lain pada umumnya. Strategi distingsi tersebut berimplikasi pada kekompakan dan keinginan sama dalam kelompok. Distingsi tersebut nampak dari penampilan, seperti pakaian, nggeleleng, gaya preman yang membuat siswa lain segan atau bahkan takut. Dengan keberanian dan banyaknya massa, eksistensi geng semakin diakui dan disegani.

Masalah-masalah kesiswaan yang ditangani BK antara lain: siswa menyimpan video porno, *bullying*, dan intimidasi. Di dalam sekolah, intimidasi dan pemaksaan masuk anggota geng biasanya dilakukan di depan kelas X. Kasus yang

menarik di SMA 10, ada siswa anggota geng Smuten yang berani keluar, tentunya siap dengan segala resiko dan konsekuensi.

Kekerasan yang sering terjadi di sekolah antara lain kekerasan fisik dan psikhis. Biasanya berawal dari ketidakcocokan antara siswa lokal dengan siswa luar, menyangkut permasalahan dialek dan nada bicara sehingga timbul hal-hal yang kurang harmoni. Kelas XII juga sering melakukan intimidasi (senioritas) kepada adik kelas. Untuk menghindari intimidasi dan memutus rantai kekerasan dari alumni, mulai tahun 2010/2011 pihak sekolah membatasi alumni yang masuk melalui kegiatan ekstrakurikuler, tonti, dan keagamaan karena melalui kegiatan tersebut selalu ada celah dan peluang. Untuk tonti, supaya alumni yang berkumpul tidak mengintimidasi siswa junior, pelatih didatangkan dari Polisi Sektor dan Koramil.

Fenomena kekerasan terjadi pada hari Selasa (19/2/2013), dimana dua kelompok pelajar dari SMA 10 Yogyakarta dan SMA Muhamadiyah 3 Yogyakarta, pada pukul 16.00 WIB terlibat tawuran dengan saling melempar batu serta baku hantam dengan tangan menggenggam batu. Tidak ada korban jiwa dalam tawuran tersebut. Namun, beberapa siswa mengalami luka akibat lemparan batu serta pot tanaman. Tiga sepeda motor yang diduga milik siswa SMA 10 Yogyakarta, rusak parah dan langsung dibawa kabur pemiliknya. Di depan SMA Muhamadiyah 3, rombongan dengan sekitar 12 sepeda motor itu bertemu. Dua kubu terlibat pembicaraan dan saling bersitegang. Dua pelajar yang mengaku dari SMA 10 Yogyakarta HM (18) dan AN (18) diamankan di Mapolsekta Wirobrajan. Keduanya mengalami luka lecet pada lengan akibat lemparan batu (<http://jogja.tribunnews.com/2013/02/19/pelajar-terlibat-tawuran-di-depan-smamuhamadiyah-3-yogya/>)

Pihak sekolah telah menerapkan mekanisme pendisiplinan mengacu pada ketentuan Dinas Pendidikan dengan sistem point reward dan punishment. Jika tahapan pelanggaran telah terakumulasi point tertentu, siswa bermasalah diberi teguran, dibina, diskors beberapa hari, dan jika point telah terakumulasi maksimal, siswa dikembalikan kepada orang tua. Pihak sekolah juga bekerjasama dan menjalin komunikasi dengan sekolah lain yang pernah bermasalah melalui Wakil Kepala

Sekolah Bidang Kesiswaan. Selain itu, sekolah menerapkan kebijakan pelarangan bagi siswa klas X membawa sepeda motor ke sekolah. Jika kebijakan tersebut dikawal dengan baik, sesungguhnya dapat meminimalisasi siswa menghabiskan waktu luang dengan kendaraannya.

2. SMA GADJAH MADA YOGYAKARTA

a. Sejarah Sekolah

Nama Gadjah Mada dijadikan nama Sekolah Menengah Atas (SMA) mengambil nama Patih Majapahit yang terkenal pada masanya. Dengan demikian diharapkan SMA yang kedepannya dapat tumbuh besar, sebesar nama Patih Gadjah Mada. SMA Gadjah Mada Yogyakarta didirikan pada tanggal 28 Februari 1982 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pioner Yogyakarta. Pada saat pertama kali berdiri SMA Gadjah Mada Yogyakarta menempati gedung sekolah SDN Gedong Kuning, Banguntapan Yogyakarta. Satu tahun kemudian yaitu tahun pelajaran 1983/1984 berpindah tempat ke jalan Langenastran Lor No. 12 Langenastran Yogyakarta, sampai tahun pelajaran 1989/1990.

Tahun pelajaran 1990/1991 SMA Gadjah Mada Yogyakarta mendapatkan tempat baru yaitu di Jl. Ibu Ruswo, Yudonegaran GM II/208 Yogyakarta dimana wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah milik Kraton Yogyakarta yang dipinjamkan untuk membangun sebuah lembaga pendidikan formal. Bersamaan dengan perpindahan tempat tersebut SMA Gadjah Mada Yogyakarta berpindah tangan di bawah naungan Yayasan Lingkungan Hidup karena para pendiri dari yayasan yang sebelumnya sudah memasuki usia lanjut dan tidak ada penerus untuk melanjutkan yayasan tersebut. Setelah itu karena alasan yang serupa pada tahun ajaran 2014/2015 SMA Gadjah Mada Yogyakarta memutuskan untuk membuat Yayasan Wahana Lingkungan Hidup sebagai syarat untuk berdirinya sekolah dan sekaligus sebagai payung untuk berdirinya sekolah.

Pada saat sekolah ini berlokasi di Jl. Langenastran jumlah siswa yang mendaftar lebih banyak dibandingkan dengan saat ini dimana SMA Gadjah

Mada Yogyakarta sekarang berdiri. Minat siswa menjadi sedikit namun tidak mengalami jumlah penurunan yang drastis.

SMA Gadjah Mada Yogyakarta merupakan lembaga formal yang didirikan untuk membantu mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa memandang status ataupun latar belakang para peserta didik. Pada saat pertama kali sekolah ini berdiri dibawah naungan Yayasan Pendidikan Pioner dengan para pendiri yang rata-rata lulusan dari Universitas Gadjah Mada, dengan hal tersebut pula kemungkinan alasan nama “Gadjah Mada” digunakan sebagai nama sekolah.

Berikut ini merupakan tabel profil sekolah dari SMA Gadjah Mada Yogyakarta sebagai berikut:

Nama Sekolah	SMA Gadjah Mada Yogyakarta
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	304046010056
Alamat Sekolah	Jl. Ibu Ruswo, Yudonegaran GM II/208
Kecamatan	Gondomanan
Kab/Kota	Yogyakarta
Provinsi	Daerah istimewa Yogyakarta
Kode Pos	55121
Telp/Faks	(0274) 370305, (0274) 370386
Status Sekolah	Swasta
Nama Yayasan	Yayasan Lingkungan Hidup
No. Akte Pendirian Terakhir	0542/H/1986
Tahun Berdiri Sekolah	1982
Status Akreditasi/Tahun	B/2010

Tabel 1. Profil sekolah SMA Gadjah Mada Yogyakarta

Ir. Cokro Kusumo Purwanto dan Drs. Wilther Tamara merupakan beberapa pendiri SMA Gadjah Mada Yogyakarta yang berasal dari Universitas Gadjah Mada. Drs. Wilther Tamara menjabat sebagai kepala sekolah pada tahun ajaran 1982/1983. Lalu pada tahun ajaran 1983/1984 digantikan oleh Ahmadi Supomo, S.Ag yang hingga saat ini masih mengabdi di SMA Gadjah Mada Yogyakarta sebagai guru agama. Drs. Suwantono

menggantikan posisi beliau sejak tahun ajaran 1984 hingga 1986, lalu berganti di bawah kepemimpinan Drs. Edi Suhartoyo pada tahun ajaran 1986/1989. Kemudian Ir. Petrus L. Rigo, MM. mengabdikan dirinya sebagai kepala sekolah pada tahun ajaran 1989 hingga saat ini yang berarti beliau telah memimpin SMA Gadjah Mada selama 26 tahun (Sumber: Wawancara dengan mantan kepala sekolah Bapak AS 27 Maret 2015).

Sekolah Menengah Atas ini dibangun atas dasar kekhawatiran para perintis SMA Gadjah Mada Yogyakarta terhadap anak-anak yang kurang beruntung terutama dalam hal perekonomian, untuk itu sebagian besar siswa merupakan anak-anak jalanan karena hal tersebut SMA ini menerapkan sistem subsidi silang bagi siswa yang kurang mampu. Namun, seiring berkembangnya jaman dimana kenakalan remaja sudah semakin meningkat SMA Gadjah Mada Yogyakarta juga menerapkan untuk menerima siswa yang bermasalah dengan berbagai macam latar belakang. Kebijakan sekolah tersebut semakin dikembangkan sejak kepemimpinan kepala sekolah yang hingga saat ini masih menduduki jabatannya. Beliau meyakini pendidikan merupakan hak setiap peserta didik tanpa memandang status dan latar belakang siswa tersebut. Lembaga formal pada umumnya hanya menerima siswa yang dapat mematuhi tata tertib dan sesuai dengan kriteria peserta didik yang dibutuhkan oleh sekolah sedangkan anak-anak yang kurang beruntung hingga mengalami permasalahan sosial yang dapat dipicu dari berbagai aspek baik lingkungan keluarga maupun sosial kurang memiliki haknya sebagai peserta didik. Beberapa hal tersebut merupakan alasan serta acuan bagi seluruh warga sekolah untuk menyediakan wadah bagi peserta didik yang kurang beruntung tanpa memandang status dan latar belakang siswa tersebut.

b. Visi Sekolah dan Misi Sekolah

1) Visi Sekolah SMA Gadjah Mada

Dengan semangat UUD 1945 pasal 31 tentang pendidikan, butir pertama; tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, dengan semangat serta kesabaran yang tinggi, SMA Gadjah Mada bertekad untuk mendidik semua anak bangsa tanpa pengecualian.

2) Misi Sekolah SMA Gadjah Mada

Meningkatkan motivasi belajar para siswa untuk mencapai standar mutu pendidikan yang ideal, membentuk watak dan budi pekerti siswa untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya, serta meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia baik tenaga edukatif maupun administrasi, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

c. Tujuan Sekolah

Berdasarkan visi dan misi di atas, pendidikan di SMA Gadjah Mada bertujuan untuk membantu proses pembentukan siswa menjadi insan beriman dan bertaqwa dalam kepribadian yang utuh, seimbang, jujur, disiplin, mandiri, kreatif, bekerja keras mau melayani sesama untuk kepentingan bangsa, negara, dan agama.

d. Pedoman Sekolah (Peraturan Akademik, Kode Etik, Tata Tertib, dsb)

Agar proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan nyaman, SMA Gadjah Mada Yogyakarta memiliki beberapa peraturan akademik, kode etik, serta tata tertib bagi seluruh warga sekolah. Berikut merupakan beberapa pedoman sekolah baik untuk guru, karyawan sekolah, dan siswa;

1) Guru

Diberitahukan kepada segenap guru dan karyawan bahwa jam kerja efektif SMA Gadjah Mada dimulai pukul 07.15 WIB s.d 13.00 WIB. Untuk hari jumat pukul 07.15 s.d. 11.30 WIB, selanjutnya beberapa point berikut perlu diperhatikan untuk anda, saya dan kita bersama.

- a) Guru mohon hadir di sekolah minimal 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai dan wajib mengisi daftar hadir.
- b) Saat lonceng tanda masuk dibunyikan, guru harus segera meninggalkan ruang guru menuju kelas sesuai dengan bidang studi masing-masing di kelas masing-masing.
- c) Semua guru mohon membuat administrasi guru yang lengkap dan diketahui kepala sekolah.

- d) Guru wajib mempersiapkan materi ajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran (RP) dari pokok bahasan yang sedang berjalan dan pada akhir pokok bahasan sebaiknya diadakan ulangan harian dengan membuat soal dan kisi-kisi serta dianalisa hasil ulangan tersebut.
- e) Pada saat mengajar guru sebaiknya berfungsi sebagai BK pada awal dan akhir pelajaran.
- f) Pada saat guru mengajar tata tertib kelas menjadi tanggungjawab guru bidang studi.
- g) Bila dengan terpaksa harus meninggalkan kelas, guru wajib memberi tahu/ijin kepala sekolah dan atau guru piket.
- h) Bila ada siswa yang karena perbuatannya dan harus keluar dari kelas, guru wajib memberitahukan kepada kepala sekolah atau guru piket atau BK.
- i) Tidak diperkenankan memakai sandal, kaos atau sepatu tanpa kaos kaki, dan berpakaian rapi tidak diperkenankan memakai celana jeans dan lain-lain yang kurang pantas serta merokok bila sedang mengajar.
- j) Tidak diperkenankan guru mencukur rambut sampai botak/ plontos.
- k) Guru yang mendapat tugas tambahan Wakasek, BK, wali kelas, harus melaksanakan tugas tambahannya tanpa melupakan tugas utama mengajar sesuai dengan peraturan yang ada.
- l) Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas wajib hadir setiap hari Senin dan Jumat, untuk mendampingi kegiatan siswa dan memberi motivasi belajar.

2) Karyawan

- a) Karyawan harus masuk setiap hari dan harus sudah hadir di sekolah 15 menit sebelum jam kerja dimulai.
- b) Mengisi daftar hadir pada saat masuk dan hendak pulang.
- c) Tidak diperkenankan memakai kaos pada jam kerja.
- d) Bila terpaksa meninggalkan kerja wajib memberi tahu kepala sekolah.

e) Setiap karyawan diharapkan memiliki sikap suka menolong dan setia kawan untuk kebersamaan dan keharmonisan komunitas.

3) Siswa (Tata tertib sekolah dalam mengikuti pelajaran)

- a) Mengawali/mengakhiri waktu belajar dibuka/ditutup dengan doa secara nasional.
- b) Siswa wajib mengikuti semua pelajaran dari awal hingga akhir.
- c) Siswa terlambat, wajib lapor guru piket/BK.
- d) Siswa yang perlu meninggalkan sekolah sebelum pelajaran berakhir harus mendapatkan ijin dari kepala sekolah atau yang mewakili.
- e) Siswa yang tidak dapat masuk sekolah karena sakit atau sebab lain wajib menyerahkan surat keterangan dokter atau orang tua wali.
- f) Siswa absen 3 kali tanpa keterangan diskors atau dihukum dalam bentuk lain yang sesuai.

4) Pakaian dan rambut (untuk siswa)

Setiap datang ke sekolah baik mengikuti pelajaran maupun untuk urusan lain harus berpakaian seragam sekolah lengkap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Hari Senin, Rabu, dan Sabtu memakai seragam putih abu abu dengan atributnya.
- b) Hari Selasa dan Kamis, siswa memakai baju batik, celana bebas tetapi bukan jeans.
- c) Hari Jumat, siswa memakai kaos olahraga SMA Gadjah Mada dan celana bebas tetapi bukan jeans

Tata rambut siswa harus rapi, tidak menutupi dahi, telinga, dan tengukuk.

5) Ketertiban dan keamanan

Kendaraan siswa wajib ditempatkan dilokasi yang tersedia, diatur dan dikunci

- a) Siswa dilarang menimbulkan gangguan suara kendaraan bermotor pada saat KBM berlangsung.

- b) Siswa dilarang meminjamkan kendaraan baik kepada sesama siswa maupun kepada guru.
- c) Kendaraan yang hilang bukan tanggungjawab sekolah
- d) Tamu yang ingin menemui siswa, harus sepengetahuan sekolah/guru piket.
- e) Di lingkungan sekolah siswa tidak boleh merokok, minum, membawa/mengedarkan minuman keras, obat-obatan terlarang atau sejenisnya.
- f) Di lingkungan sekolah siswa dilarang membawa/mengedarkan gambar/bacaan yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan.
- g) Di lingkungan sekolah siswa dilarang membawa/menyimpan senjata tajam dan atau senjata lain yang dapat membahayakan jiwa orang lain.
- h) Dilarang memindahkan perabotan tanpa ijin dari pimpinan sekolah.
- i) Dilarang merusak perabotan yang ada baik disengaja atau tidak disengaja.
- j) Dilarang mengotori/mencorat-coret dinding, meja, kursi ataupun yang lainnya dalam bentuk apapun.
- k) Dilarang membawa/menghidupkan HP selama pelajaran berlangsung.

6) Sanksi pelanggaran

Siswa yang ternyata melakukan pelanggaran terhadap tata tertib siswa SMA Gadjah Mada Yogyakarta, dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a) Mengganti perabotan, seharga perabotan yang dirusak, dikotori atau dicoret coret.
- b) Peringatan pertama, kedua, ketiga.
- c) Skorsing untuk jangka waktu tertentu.
- d) Dikeluarkan dari sekolah.
- e) Struktur Organisasi sekolah dan job deskripsinya.

e. Keadaan Sumber Daya

SMA Gadjah Mada Yogyakarta telah berdiri selama 33 tahun, agar SMA Gadjah Mada Yogyakarta mampu menjalankan tujuan sekolah sesuai dengan visi serta misi sekolah tentunya seluruh komponen sekolah harus saling bekerja sama agar dapat tercapainya tujuan dari adanya lembaga formal tersebut. Berikut merupakan keadaan sumber daya SMA Gadjah Mada Yogyakarta;

No	Tugas	Jumlah
1.	Kepala Sekolah	1
2.	Wakil Kepala Sekolah	3
3.	Tata Usaha	2
4.	Guru Mata Pelajaran	27
5.	Guru Bimbingan Konseling	2
6.	Pustakawan	1
7.	Petugas Keamanan	1
8.	Peserta didik	140
Jumlah		177

Tabel 2. Keadaan sumber daya SMA Gadjah Mada Yogyakarta

1) Keadaan Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu lembaga formal. Berikut ini merupakan sumber daya tenaga pendidik dengan mata pelajaran yang diajarkan tahun pelajaran 2014/2015, sebagai berikut:

No	Mata Pelajaran	Jumlah Guru
1.	Pendidikan Agama Islam	2
2.	Pendidikan Agama Katolik	1
3.	Pendidikan Agama Kristen	1
4.	Pendidikan Seni	2
5.	Ekonomi/Akuntansi	2

6.	Matematika	4
7.	TIK	1
8.	Penjasorkes	1
9.	Sosiologi	1
10.	Sejarah	2
11.	Geografi	1
12.	Fisika	1
13.	Kimia	1
14.	Biologi	1
15.	Bahasa Indonesia	2
16.	Bahasa Inggris	1
17.	Bahasa Jerman	1
18	Bahasa Jawa	1
19	Kewarganegaraan/Pkn	2
20.	Bimbingan Konseling	2
Jumlah		30

Tabel 3. Data jumlah tenaga pendidik menurut mata pelajaran

Tabel di atas menunjukkan jika jumlah tenaga pendidik menurut mata pelajaran yang diampu sebanyak 30 orang akan tetapi, tenaga pengajar yang terdapat di SMA Gadjah Mada Yogyakarta adalah 29 orang guru. Beberapa tenaga pendidik memiliki tugas lain atau mengajar 2 mata pelajaran, seperti 2 guru dalam mata pelajaran ekonomi merangkap sebagai guru TIK dan satu guru lainnya merangkap sebagai guru penjasorkes. Dengan hal tersebut dapat membuat guru menjadi tidak fokus karena harus mengajar beberapa mata pelajaran lainnya. Selain itu, tidak sedikit tenaga pendidik yang kurang sesuai antara lulusan jurusan tenaga pendidik tersebut dengan mata pelajaran yang diajarkan.

Dalam ruang lingkup SMA Gadjah Mada Yogyakarta tugas tenaga pendidik bukan hanya sebagai pengajar, akan tetapi juga sebagai

pembimbing yang diharapkan dapat membimbing akademik siswa agar memahami setiap pelajaran yang telah diajarkan maupun membimbing non akademik untuk mengembangkan posensi siswa maupun mendampingi siswa bermasalah.

2) Keadaan Peserta Didik

Peserta didik di SMA Gadjah Mada yogyakarta tidak terlalu banyak jumlahnya. Berikut ini merupakan jumlah sumber daya peserta didik pada tahun ajaran 2014/2015;

No.	Program Pengajaram	Kelas X		Kelas XI		Kelas XII	
		L	P	L	P	L	P
1.	MIA/IPA	9	1	15	5	30	5
2.	IIS/IPS	8	2	20	5	34	6
Jumlah		17	3	35	10	64	11
		20		45		75	
		140					

Tabel 4. Data siswa menurut tingkat dan jenis kelamin tahun ajaran 2014/2015.

Dari data tabel di atas dapat dilihat jika siswa laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah siswa perempuan. Karena sebagian besar siswa merupakan siswa pindahan dari sekolah sebelumnya dapat dilihat jika semakin tinggi tingkatan kelasnya semakin banyak siswa yang terdaftar, rata-rata siswa pindahan paling banyak di kelas XII. SMA Gadjah Mada Yogyakarta memang tidak memiliki peraturan mengenai siswa pindahan secara terperinci asalkan siswa tersebut bersedia untuk mengikuti pelajaran agar dapat mengikuti ujian dan masih dalam usia Sekolah Menengah Atas pada umumnya. Sementara itu, untuk kelas X atau tingkat 1 sebagian besar peserta didik merupakan siswa pindahan dari sekolah lainnya.

Meskipun secara tertulis siswa yang mendaftar di SMA Gadjah Mada sebanyak 140 orang siswa, namun dalam kedatangan siswa setiap harinya di sekolah tidak sesuai dengan jumlah yang tertulis. Dalam kelas X dan kelas XI atau

tingkat 1 dan tingkat 2 paling banyak siswa yang hadir dalam pembelajaran di kelas adalah 10 orang dari masing masing kelas, sedangkan untuk siswa kelas XII atau tingkat 3 paling banyak siswa yang hadir adalah 20 orang siswa.

D. HASIL PENELITIAN DI 2 SEKOLAH

1. SMA N 10 YOGYAKARTA

Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan kota Yogyakarta, SMA 10 Yogyakarta merupakan salah satu sekolah negeri yang beresiko, karena dari aspek akademik merupakan sekolah negeri yang berada di ranking bawah dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem *Real Time Online* (RTO). Kondisi sekolah kurang kondusif dari aspek keruangan, ditambah dengan keberadaannya di kawasan padat penduduk dan aktivitas, serta terdapat geng pelajar Smuten.

Untuk kasus kekerasan pelajar di sekolah, dua tahun terakhir sudah mulai menurun. Pada tahun 2012/2013 pernah terjadi tawuran antara siswa SMA 10 dengan siswa SMA 3 Muhammadiyah. Selain tawuran pelajar antar sekolah, di SMA 10 pernah terjadi beberapa kasus seperti: pengrusakan motor, ejek-ejekan supporter yang berujung pada benturan fisik setelah pertandingan olah raga, dan coret-coret baju masih ada.

Belakangan ini konvoi sudah tidak begitu memancing emosi. Vandalisme /coret-coret tembok sudah berkurang dan anak yang masuk geng sudah menurun. Proses reproduksi geng Smuten biasanya berawal sejak kegiatan MOS berlangsung. Pada saat itu, alumni datang ke sekolah, di tempat parkir atau warung tempat nongkrong di depan sekolah pada siang/sore hari. Aktivitasnya antara lain makan dan minum bersama, kadangkala mabuk pada hari Sabtu sore. Ada semacam aturan tak tertulis di kalangan siswa, jika kakak-kakak senior belum pulang, adik-adik kelas belum boleh pulang.

Tidak semua siswa menjadi sasaran rekrutmen dan perluasan geng, namun hanya siswa dengan karakteristik tertentu (“siswa potensial”).

1. Memiliki rekam jejak sebagai siswa “istimewa” sejak SMP. Spiral kekerasan pelajar dimulai melalui siswa kelas X yang asal SMP-nya sama dengan kakak kelasnya.
2. Siswa yang tidak pendiam (resek).
3. Bocah nggleleng, cah rusuh.
4. Siswa yang ke sekolah naik sepeda motor, seringkali menjadi prioritas.
5. Anak luar daerah yang kos, karena belum memiliki banyak teman. Pada awalnya diajak nongkrong Mereka dibuat tergantung sehingga mudah dipengaruhi.

Seiring dengan kemajuan teknologi, media sosial juga berfungsi dan mengambil peran dalam perluasan jaringan dan reproduksi geng. Strategi tersebut dilakukan dengan tujuan supaya spirit geng Smuten tetap hidup. Mereka ingin mempertahankan eksistensi dan tidak rela nama geng Smuten hilang begitu saja. Terdapat konformitas di dalam kelompok yang membedakannya dengan siswa lain pada umumnya. Strategi distingsi (membedakan diri) tersebut berimplikasi pada kekompakan dan keinginan sama dalam kelompok. Distingsi nampak dari penampilan, seperti pakaian, nggleleng, kendel, gaya preman yang membuat siswa lain segan atau bahkan takut. Dengan keberanian dan banyaknya massa, eksistensi dan reputasi geng semakin diakui dan disegani.

Masalah-masalah kesiswaan yang ditangani BK antara lain: siswa menyimpan video porno, *bullying*, dan intimidasi senior kepada adik kelas. Di dalam sekolah, intimidasi dan pemaksaan masuk anggota geng biasanya dilakukan di depan kelas X. Kekerasan yang sering terjadi di sekolah antara lain kekerasan fisik dan *bullying*. Biasanya berawal dari ketidakcocokan antara siswa lokal dengan siswa luar, menyangkut permasalahan dialek dan nada bicara sehingga timbul hal-hal yang kurang harmoni. Di SMA 10 ada kasus, siswa yang berani keluar dari geng Smuten, namun menghadapi resiko dan konsekuensi.

Dalam *gang membership*, terdapat kesepakatan-kesepakatan yang dibuat bersama oleh *leader* dan *member*. Pelajar keluar dari geng karena merasa tidak nyaman, walaupun dengan resiko dipukuli oleh anggota geng Smuten. Mereka

berani karena memiliki *backing* (pendukung), yaitu teman-teman di luar sekolah yang kompak dan tidak semena-mena.

2. SMA GADJAH MADA YOGYAKARTA

SMA Gadjah mada selama ini telah memperoleh stigma dan *labelling* negatif karena dikenal sebagai sekolah tempat berkumpulnya siswa-siswi yang terbuang dan terpinggirkan. Sebagian besar siswa SMA Gadjah Mada adalah siswa-siswi pindahan dari sekolah lain. Alasan kepindahan biasanya karena dikembalikan kepada orang tua oleh sekolah lamanya. Kasus-kasus yang menyebabkan siswa dikembalikan kepada orang tua antara lain karena melakukan pelanggaran dengan point terakumulasi mencapai 100. Mekanisme pendisiplinan dan proses pembelajaran bagi siswa-siswi bermasalah tersebut berbeda dibandingkan dengan proses di sekolah lain. Kebanyakan siswa pindahan yang merasa “dibuang” terus pindah ke sini jadi yang membuat solidaritas mereka sangat tinggi. Apalagi tergabung dengan sekolah yang memiliki nama kebesaran Hooligans tersebut.

Mekanisme pendisiplinan dan proses pembelajaran bagi siswa-siswi SMA Gadjah Mada berbeda dibandingkan dengan proses di sekolah lain. Tata tertib sekolah ada, namun tidak diterapkan sepenuhnya, dengan alasan siswa istimewa tidak mudah diatur. Kebanyakan siswa yang merasa “dibuang” dan pindah ke sini menjadikan solidaritas mereka sangat tinggi. Apalagi dengan nama kebesaran Hooligans di sekolah tersebut. Nama kebesaran sekolah penting untuk menjaga eksistensi dan penanda identitas siswa maupun sekolah.

Di sekolah ini tidak ada OSIS, karena tidak ada siswa yang mau terlibat atau melibatkan diri. Di sekolah ini tidak diterapkan sistem poin, karena jika diterapkan murid bisa habis. Waktu kepala Sekolah masih sehat (sekarang sudah meninggal) sering memberikan hukuman kepada siswa, sebagai *shock therapy*:

- dijemur di panas matahari
- lari keliling lapangan
- dipukul

Anak-anak GAMA memiliki kebiasaan kumpul bareng, kadang-kadang dengan alumni juga. Berdasarkan penuturan R:

“Nek malem minggu cah-cah GAMA dho thethek ning BI, sedhak Titik Nol. Nek anak cewek, sing melu kumpul biasane Sn, Dl, Ev, Sl. Kumpul dari jam 9 malam sak jelehe.”.

Kekerasan yang menonjol di SMA Gama adalah kekerasan verbal dan fisik. Dalam kesehariannya, banyak siswa yang sering berteriak dan *misuh-misuh*. Menurut siswa maupun guru, hal itu sudah biasa hanya sebagai guyongan atau bercanda, sebagai simbol keakraban dan kekompakan. Hal tersebut terjadi antara siswa dengan siswa maupun antara siswa dengan guru. Bahkan ada guru yang dipanggil dengan nama saja, tanpa menyebut Pak/Bapak.

Sejumlah kasus kekerasan pelajar terjadi di SMA GAMA yang sampai ditangani Polsek Umbulharjo antara lain: tahun lalu berawal dari pandang, siswa SMA GAMA mencegat siswa dari sekolah lain, memukulnya dengan helm, dan mencabut kunci sepeda motor. Kasus sampai di Polsek, siswa tersebut dikenai pasal perampasan. Siswa SMA GAMA juga pernah terlibat kasus pengrusakan fasilitas di sekolah lain. Menurut sejumlah guru, kekerasan seksual juga terjadi di antara sesama siswa sendiri.

Lebih lanjut R menuturkan sebagai berikut:

“Ya kita anak GAMA kebanyakan dari anak keluarga broken home. Aku muales sekolah. Lagi ada masalah Bu di rumahku. Om ku mukul tanteku. Ketanggor pil koplo. Om ku pemakai mayak’e. Tanteku mono alim, mesakne anake. Aku yo eneng konflik sama ibu. Goro-goro aku dituduh ambil uang ibu. Wis seminggu iki aku didiemin ibuku. Ortuku mah dho kerah e Bu. Budrek aku, ra iso nyaman ning omah”.

Setiap harinya, tidak semua siswa datang ke sekolah. Di beberapa kelas, seringkali hanya ada 2 orang pelajar yang masuk dan mengikuti pelajaran. Guru kerap menunggu siswa datang. Pembelajaran tidak selalu *full*, karena kadang-kadang siswa curhat kepada guru tentang masalah yang dialaminya. Guru lebih sering memberikan materi untuk difotocopy sebagai bahan belajar di rumah.

Siswa SMA GAMA setiap awal ajaran baru selalu mengadakan konvoi “taruh tanda” dengan melewati sekolah-sekolah tertentu yang sudah direncanakan sebagai tanda bahwa mereka menguasai wilayah tersebut, dengan kata lain siswa SMA GAMA menunjukkan eksistensi SMA GAMA didepan siswa SMA lain.

Pernah juga terjadi kerusuhan sporter SMA GAMA dengan SMA 11 . Siswa SMA GAMA setiap konvoi selalu menyiapkan alat seperti kayu dengan diberi paku, namun digunakan tidaknya alat tersebut tergantung situasi.

Di SMA GAMA ada OSIS namun tidak berjalan karena siswa tidak ada yang ikut berpatisipasi, jika ada acara sekolah guru selalu melibatkan siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di SMA GAMA tidak ada karena jika kegiatan ekstrakurikuler diadakan sore hari siswa tidak ada yang berangkat, sebagai gantinya setiap hari Jumat pagi hari setelah pelajaran agama siswa dibebaskan melakukan kegiatan yang mereka minati seperti bermain futsal.

Dinas Pendidikan menyarankan setelah ulangan semester selesai siswa diliburkan dengan tujuan untuk meminimalisir kenakalan antar pelajar, SMA GAMA mengumumkan kelulusan dengan mengundang orang tua dan siswa kesekolah sekaligus perpisahan. Siswa mengenakan pakaian adat untuk meminimalisir corat-coret sragam, namun setelah selesai acara perpisahan siswa tetap melakukan corat-coret sragam yang telah mereka siapkan. Kepala sekolah sejak awal dikenal tegas dan disiplin. Saat masa orientasi siswa atau MOS siswa yang melanggar peraturan dihukum langsung oleh kepala sekolah seperti dijemur di lapangan atau lari berkeliling lapangan. Di sekolah sesekali guru melakukan kekerasan namun sudah dengan persetujuan dari orang tua siswa agar siswa tidak melakukan kesalahan lagi. Sesekali kekerasan dalam mendidik itu penting tapi bukan pengariaayaan. Dan siswa tidak ada dedam kepada guru setelah itu.

Prinsip guru SMA GAMA adalah berapapun siswa yang hadir tetap diberikan pelajaran karena semua siswa memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang sama, guru SMA GAMA mengajar dengan cinta kasih dengan harapan siswa yang bermasalah menjadi pribadi yang lebih baik.

BAB III

PRAKTIK SOSIAL KEKERASAN DALAM KONTEKS PERSEKOLAHAN

DI YOGYAKARTA

Praktik kekerasan pelajar senantiasa terjadi karena selalu ada aktor-aktor baru yang potensial dan siap direkrut oleh geng pelajar. Karakteristik pelajar pelaku tawuran antara lain: memiliki kebiasaan membuat ulah pada proses pembelajaran, mengintimidasi teman-teman di sekolah, dan sering nglithih dengan sepeda motor di luar sekolah. Anak-anak seperti itu biasanya memiliki nilai rendah di bawah KKM, bukan karena bodoh, namun karena semangat belajarnya rendah dan waktu terbuang percuma sehingga kurang belajar.

Praktik kekerasan pelajar SMA merupakan amatan panjang yang memiliki keterkaitan dengan habitus pelajar pada jenjang sekolah sebelumnya (SMP), sekolah lama (jika pelajar pindahan), dan habitus yang dibawa dari lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulannya. Praktik kekerasan pelajar hadir dalam arena persekolahan merupakan ekspresi kepemilikan modal kultural berupa nilai-nilai kekerasan yang dihayati dan terinternalisasi dalam diri pelajar. Dalam konteks ini, pelajar sesungguhnya tidak hanya sedang berelasi dengan pihak sekolah, melainkan juga berhadapan dan bernegosiasi dengan sesama pelajar.

A. Realitas Kekerasan Pelajar

Secara umum, intensitas kekerasan pelajar SMA di Yogyakarta yang berupa tawuran pelajar cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kenyataan tersebut sangat berbeda dari lima tahun yang lalu. Terkait dengan intensitas kekerasan pelajar di Yogyakarta, dikemukakan bahwa:

“Angka tawuran pelajar relatif sudah menurun apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Demikian juga jika dibandingkan dengan intensitas kekerasan pelajar di kota lain, seperti Jakarta dan Bandung, maka intensitas kekerasan pelajar di kota Yogyakarta masih relatif rendah. Walaupun demikian, seberapapun kasusnya, persoalan kekerasan pelajar memerlukan perhatian berbagai pihak.” (wawancara dengan Kasie Bangdik Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Bp. WS, 27 Juli 2013)

Sedangkan menurut Kasie Manajemen Sekolah, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Bp. Rmd, kasus kekerasan di Yogyakarta bersifat sporadik, tidak terus-terusan

seperti di Jakarta misalnya. Pendapat tersebut sesuai dengan kajian Hatib (2010) yang menyebutkan bahwa tawuran pelajar tidak terjadi setiap saat, tetapi berlangsung secara sporadis dan musiman. Ada masa-masa di mana terjadi puncak tawuran pelajar, namun ada juga masa tawuran jarang terjadi bahkan berhenti. Puncak tawuran pelajar biasanya terjadi ketika siswa baru telah mengetahui identitas kelompok sendiri dan dengan kelompok mana (kelompok lain) mereka bermusuhan. Sosialisasi dan reproduksi mengenai musuh ini umumnya dilakukan oleh para siswa senior kepada siswa baru pada saat inisiasi atau Masa Orientasi Siswa (MOS). Kemudian, peralihan kepemimpinan geng dari siswa kelas 3 kepada siswa kelas 2 terjadi setelah ujian akhir (sekitar bulan Juni).

Lebih lanjut menurut Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan kota Yogyakarta, Ibu Htt bahwa kekerasan pelajar seringkali terjadi di luar area sekolah. Rasanya tidak mungkin mengawal mereka dari pagi hingga malam, karena tanggung jawab pihak sekolah dan Dinas Pendidikan hanya pada jam wajib sekolah, yaitu mulai jam 7 pagi hingga jam 2 siang. Di luar jam sekolah, mereka menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat.

Sedangkan terkait dengan kekerasan pelajar, Bp. WS membuat kategorisasi mengenai jenis kekerasan yang biasa terjadi di kalangan pelajar di kota Yogyakarta, yaitu:

- Penganiayaan yang bersifat individual, yaitu penganiayaan oleh pelajar terhadap pelajar lain
- Perkelahian kelompok pelajar, yang melibatkan sekelompok kecil pelajar
- Tawuran pelajar, yang melibatkan sekelompok besar pelajar, yang biasanya berasal dari sekolah yang berbeda

Ketika ditanyakan tentang intensitas kekerasan pelajar di Yogyakarta, disampaikan bahwa tingkat kekerasan pelajar relatif sudah menurun apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Demikian juga jika dibandingkan dengan intensitas kekerasan pelajar di kota lain, seperti Jakarta dan Bandung, maka intensitas kekerasan pelajar di kota Yogyakarta masih relatif dikategorikan rendah. Walaupun demikian, seberapapun kasusnya, persoalan kekerasan pelajar memerlukan perhatian berbagai pihak. Yang menarik, mengapa di media jarang sekali ada berita tentang tawuran pelajar di kota Surabaya?.

Pendapat tersebut juga diperkuat dengan pernyataan para pimpinan SMA/SMK di Yogyakarta dalam diskusi kelompok terarah (FGD), bahwa intensitas tawuran pelajar mulai berkurang dan menurun jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa tidak begitu parah, karena kejadian-kejadiannya mulai jarang terjadi. Berdasarkan data tersebut, secara umum angka tawuran pelajar mengalami penurunan. Namun, bukan berarti kekerasan pelajar sudah tidak terjadi, karena masih ada saja kejadian kekerasan pelajar antar sekolah. Bahkan, sejumlah media tetap saja mengendus adanya kejadian kekerasan pelajar.

Namun semenjak peraturan sekolah semakin diperketat, para pelajar mulai berpikir ulang karena melakukan pelanggaran berupa tawuran mendapatkan nilai poin yang cukup besar, dan jika sudah terakumulasi, mereka bisa mendapatkan sanksi terberat dikembalikan kepada orang tua/dikeluarkan dari sekolah. Sejumlah sekolah tetap mewaspadai potensi munculnya tawuran pelajar antar sekolah, karena genk-genk yang melekat di sekolah belum benar-benar bubar, melainkan masih aktif dan bergerak hingga sekarang.

Seperti diungkapkan oleh Wakapolresta AKBP AS (KR, 23 Mei 2013) seluruh kasus tersebut dilakukan oleh sekelompok pelajar di satu sekolah yang berkelahi dengan kelompok pelajar sekolah lain. Geng pelajar sesungguhnya tidak hanya terjadi di Yogyakarta. Di daerah lain juga marak terjadi, tetapi kasus di Yogyakarta sudah mengkhawatirkan karena cenderung anarkis. Tanpa ada gerakan bersama, dikhawatirkan hingga akhir tahun mendatang tingkat perkelahian bisa meningkat 200 % dari tahun lalu.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa personil di sekolah bermacam-macam karakternya. Untuk menjadi Wakasiswa, perlu memiliki kompetensi menghadapi siswa potensial bermasalah. Namun selama ini pemilihan Wakasiswa seringkali hanya berdasarkan voting saja. Hal ini menunjukkan bahwa popularitas lebih utama dibandingkan kompetensinya. Pelaku kekerasan dan vandalisme bahkan disinyalir mulai siswa SMP. Namun demikian, melihat realitas kekerasan dan vandalisme di Yogyakarta tidak dapat mengabaikan realitas serupa yang terjadi di daerah sekitarnya (Sleman dan Bantul).

Kekerasan pelajar merupakan fenomena yang senantiasa terulang ibarat benang kusut yang perlu diurai. Kasusnya senantiasa sama, dengan pelaku yang berbeda. Guru pembimbing mestinya tidak bosan menghadapi para pelajar, karena selama mereka masih remaja, masalah akan selalu muncul.

B. Kekerasan di Sekolah: Melintas Aktor

Kekerasan dapat melibatkan aktor individual, kolektif, institusi, maupun sistem. Dalam realitasnya, tidak semua pelajar potensial melakukan kekerasan. Umumnya, pelaku kekerasan pelajar orangnya tertentu dan tidak selalu muncul sentimen koletif di dalam relasi sosial mereka. Namun demikian, kekerasan tetap perlu diurai, supaya tidak terjadi pemberian dan pembiaran terhadapnya.

Sebagaimana dalam kenyataannya, kekerasan potensial dilakukan oleh siapa saja, mulai dari siswa hingga guru. Kekerasan oleh guru seringkali terlegitimasi oleh posisinya sebagai pendidik dalam relasi pembelajaran maupun interaksi sosial di sekolah. Dalam relasi pembelajaran dengan pendekatan *teacher centered*, posisi guru dan siswa tidaklah setara. Guru mendominasi dalam relasi kuasa pada proses pembelajaran maupun proses pendisiplinan di sekolah.

Sementara itu, kekerasan tidak dilakukan oleh semua pelajar, melainkan hanya dilakukan dan diakrabi oleh sebagian pelajar. Pelajar yang dapat ditengarai berpotensi melakukan tawuran pelajar ini biasanya adalah pelajar yang memiliki riwayat pernah tidak naik kelas, kemudian dipindahkan ke sekolah lain yang justru beresiko. Sekolah beresiko yang dimaksud, biasanya memiliki jumlah siswa yang sangat besar, lingkungan sekolah yang kurang kondusif, dan bersedia menerima siswa pindahan dari sekolah lain.

Siswa yang berpotensi untuk melakukan perilaku kekerasan disebabkan juga oleh kurangnya perhatian dan lemahnya pengawasan orang tua, keluarga broken home, sehingga mereka mudah dipengaruhi oleh siswa lain maupun alumni yang tidak sukses.

“Beberapa kasus yang terjadi, bahwa pelajar merupakan anak kost, yang berada di luar pengawasan orang tua. Apalagi jika ia memiliki saudara yang sudah kuliah (mahasiswa), pelajar akan meniru aktivitas yang dilakukan pada malam hari seperti: keluar malam, nongkrong, ngangkring, merokok, dan lain-lain”. (wawancara tanggal 27 Juli 2013)

Berdasarkan FGD yang dilakukan, selain karakteristik di atas, siswa yang potensial melakukan kekerasan pelajar pada umumnya memiliki kebiasaan seperti: sering datang terlambat ke sekolah, ogah-ogahan (tidak serius) ketika menerima pelajaran, malas, tidur di kelas, sering berulah di kelas, suka membolos, tidak tertib, suka nongkrong di angkringan luar sekolah, dan jika sekolah berakhir, tidak langsung pulang ke rumah. Siswa tersebut barangkali mengalami kekecewaan dalam mencapai tujuan. Mereka biasanya juga terlibat

dalam pergaulan di luar sekolah yang kurang bermanfaat. Orang tua yang kurang perhatian karena sibuk bekerja juga turut mempengaruhi karakter anak. Pelajar potensial biasanya juga pernah mengalami dan menjadi korban kekerasan dan kurang eksis dalam kegiatan positif di sekolah.

Berdasarkan FGD dengan pengelola SMA beresiko, terungkap bahwa karakteristik yang potensial adalah anak-anak yang pada tahun sebelumnya sudah di sekolah lain, kemudian ikut RTO (PPDB Real Time Online) lagi dan nilai masih mencukupi. Selain itu ada andil dari alumni yang tidak sukses. Anak/siswa yang kecewa dalam mencapai tujuan atau kecewa dengan keluarga. Pelajar yang berpotensi menjadi aktor dalam kekerasan pelajar disebabkan kurangnya perhatian dari orang tua, menerima pelajaran ogah-ogahan, tidak serius, sering tidur di kelas, atau sering membuat ulah di kelas/di sekolah.

Untuk kasus di SMA GAMA, karena tidak membeda-bedakan siswa, maka di sekolah tersebut banyak terdapat siswa yang memakai tato, tindik, dan berambut gondrong bagi siswa laki-laki. Namun ini yang menjadi keunikan di SMA GAMA, siswa yang bermasalah atau tidak tetap diizinkan bersekolah di SMA GAMA dan di didik dengan cara yang sama tanpa membeda-bedakan siswa. Jumlah siswa SMA GAMA setiap tahun ajaran tidak selalu sama, misal yang mendaftar dari kelas X ada 15 siswa, setelah itu ada yang mendaftar karena pindahan dari sekolah lain sehingga jumlah siswa bertambah.

Kebanyakan siswa SMA GAMA merupakan siswa bermasalah baik masalah keluarga, masalah keuangan, atau masalah pribadi siswa. Tingkat kehadiran siswa dibawah 50% kebanyakan siswa berangkat dari rumah izin ke sekolah namun tidak sampai sekolah. Setiap hari selalu ada siswa yang tidak berangkat, misal si A hari ini berangkat besok tidak berangkat begitu juga dengan siswa yang lain sehingga membentuk seperti pola shif-shifan. Namun siswa SMA GAMA kreatif dengan memanfaatkan gadget yang dimiliki siswa yang tidak berangkat tetap mempunyai catatan dan tahu tugas rumah yang harus dikerjakan. Setiap ujian baik ulangan harian atau semesteran semua siswa beangkat kesekolah. Nilai kehadiran di SMA GAMA tidak berpengaruh, penilaian berdasarkan kecerdasan dan kemampuan siswa. Siswa SMA GAMA taat memakai sragam sesuai dengan ketentuan yaitu seragam OSIS, batik dan olahraga.

Sedangkan terkait dengan kekerasan pelajar, Bp. WS membuat kategorisasi mengenai jenis kekerasan yang biasa terjadi di kalangan pelajar di kota Yogyakarta, yaitu:

- Penganiayaan yang bersifat individual, yaitu penganiayaan oleh pelajar terhadap pelajar lain
- Perkelahian kelompok pelajar, yang melibatkan sekelompok kecil pelajar
- Tawuran pelajar, yang melibatkan sekelompok besar pelajar, yang biasanya berasal dari sekolah yang berbeda

Ketika ditanyakan tentang intensitas kekerasan pelajar di Yogyakarta, disampaikan bahwa tingkat kekerasan pelajar relatif sudah menurun apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Demikian juga jika dibandingkan dengan intensitas kekerasan pelajar di kota lain, seperti Jakarta dan Bandung, maka intensitas kekerasan pelajar di kota Yogyakarta masih relatif dikategorikan rendah. Walaupun demikian, seberapapun kasusnya, persoalan kekerasan pelajar memerlukan perhatian berbagai pihak. Yang menarik, mengapa di media jarang sekali ada berita tentang tawuran pelajar di kota Surabaya?.

Berdasarkan pantauan pihak Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dapat dibuat pemetaan tawuran pelajar berdasarkan wilayah geografis-administratif. Kasus tawuran pelajar di Kota Yogyakarta seringkali terjadi di sejumlah kecamatan berikut ini: Wirobrajan, Umbulharjo, dan Gondokusuman. Berdasarkan lokasi kejadiannya, tawuran pelajar seringkali terjadi di sekitar Stadion Mandhala Kridha. Sedangkan berdasarkan waktunya, tindak tawuran pelajar seringkali dilakukan di luar jam sekolah, khususnya terjadi pada malam hari, bahkan dini hari di akhir pekan (Jumat, Sabtu, Minggu). Malam-malam pada hari-hari tersebut sering dijuluki sebagai “malam jahat” oleh pelajar. Kiranya perlu dipertimbangkan tentang “Jam Malam untuk Pelajar”.

Berdasarkan studi dokumentasi atas pemberitaan di media (Koran KR, 23 Mei 2013), kasus perkelahian pelajar di Kota Yogyakarta masih terjadi dan menunjukkan angka seperti terungkap dalam data sebagai berikut:

Kasus Perkelahian Pelajar

Tahun	Kasus
2011	9
2012	5
s.d. Mei 2013	5

Kasus-kasus yang terjadi pada sampai dengan bulan Mei 2013 berlangsung di wilayah kecamatan: Gondokusuman, Umbulharjo, Jetis, Mantrijeron, dan Tegalrejo. Selain itu, pemetaan berdasarkan sekolah menurut Bapak WS, kasus kekerasan pelajar paling sering melibatkan pelajar dari SMK Muhammadiyah 7 dan SMA Muhammadiyah 3. Sedangkan pelajar yang jarang, bahkan tidak pernah terlibat dalam kasus kekerasan pelajar adalah mereka yang berasal dari SMAN 1 dan SMAN 3, sehingga untuk kegiatan Jembatan Persahabatan tahun 2009, siswa dari kedua sekolah tersebut tidak dilibatkan. Namun, untuk tahun 2013, semua sekolah diminta mengirimkan peserta mewakili sekolah.

Sebagaimana dalam kenyataannya, kekerasan tidak dilakukan oleh semua pelajar, melainkan hanya dilakukan dan diakrabi oleh sebagian pelajar. Pelajar yang dapat ditengarai berpotensi melakukan kekerasan pelajar ini biasanya adalah pelajar yang memiliki riwayat pernah tidak naik kelas, kemudian dipindahkan ke sekolah lain yang justru beresiko. Sekolah beresiko yang dimaksud, biasanya memiliki jumlah siswa yang sangat besar, dan bersedia menerima siswa pindahan dari sekolah lain.

Siswa yang berpotensi berperilaku menyimpang biasanya karena pengawasan orang tuanya lemah.

“Beberapa kasus yang terjadi, bahwa pelajar merupakan anak kost, yang berada di luar pengawasan orang tua. Apalagi jika ia memiliki saudara yang sudah kuliah (mahasiswa), pelajar akan meniru aktivitas yang dilakukan pada malam hari seperti: keluar malam, nongkrong, ngangkring, merokok, dan lain-lain”. (wawancara tanggal 27 Juli 2013)

Faktor penyebab timbulnya kekerasan pelajar adalah adanya persaingan antar sekolah, khususnya persaingan supporter olahraga (basket, sepakbola, futsal) dari masing-masing sekolah, maupun persaingan antar genk sekolah. Dalam kasus yang merupakan kejadian besar, pernah juga melibatkan pelajar Yogyakarta yang berasal dari luar daerah, karena kedapatan menggunakan senjata tradisional berupa paser (panah). Berdasarkan wawancara bada tanggal 27 Juli 2003, kejadian yang pernah terjadi adalah tawuran pelajar terjadi di sebelah utara Galeria Mall. Pelakunya siswa dari SMA Bopri 2, yang merupakan pindahan dari SMA 11. Korbannya berasal dari SMA Gama. Sedangkan kejadian terakhir adalah pelemparan bom molotov ke salah satu SMKN di Kota Yogyakarta. Pelakunya adalah siswa SMP yang sebelumnya nongkrong di sekitar Pakualaman.

C. Habitus Kekerasan: dari yang Halus hingga yang Agresif/ Brutal

Kekerasan di sekolah merupakan segala bentuk aktivitas kekerasan di lingkungan sekolah atau dalam konteks sekolah, termasuk di dalamnya kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikhis, hingga kekerasan seksual. Kekerasan fisik adalah bentuk paling umum dari kekerasan yang berhubungan dengan kekerasan di sekolah. Ada banyak alasan mengapa terjadi kekerasan di sekolah. Hal ini terutama karena adanya pelaku-pelaku (aktor) potensial dalam lingkungan (arena) sekolah. Siapapun warga sekolah berpotensi menjadi pelaku kekerasan, mulai dari guru hingga siswa di sekolah. Dalam relasi guru dengan siswa, kekerasan seringkali tak dapat dihindari karena alasan menegakkan peraturan dan kedisiplinan. Dalam relasi sesama siswa, pelaku tersebut mencoba untuk mendominasi dan “menjinakkan” siswa lain yang bisa berakhir dalam perkelahian. Orang tua, guru, pihak sekolah dan teman sebaya juga memiliki peran dalam mempengaruhi kekerasan di sekolah.

Sebagaimana tergambaran dalam wawancara dengan siswi R, bahwa habitus yang terekspresikan di sekolah telah diinternalisasi sejak dari lingkungan rumah/keluarga:

“Aku tuh anak bermasalah, aku kan masalahnya udah kenal sama narkoba sejak lulus SD. Tapi aku berhenti udah 5 bulanan ini. Aku berkutat masalah gituan karna Omku pemakai, sedangkan aku dari bayi udah nggak ikut ibu. Sejak kecil aku ikut Simbahku dan tinggal bareng Omku. Belum lama ini aku baru ikut Ibu, jadi aku nggak deket sama Ibu”. Bersekolah di sini siswa merasa enakan, karena berasal dari latar belakang yang sama. Paling kan masalahnya beda tipis”

Kekerasan yang menonjol di SMA Gama adalah kekerasan verbal dan fisik. Dalam kesehariannya, banyak siswa yang sering berteriak dan *misuh-misuh*. Menurut siswa maupun guru, hal itu sudah biasa hanya sebagai guyongan atau bercanda, sebagai simbol keakraban dan kekompakan. Hal tersebut terjadi antara siswa dengan siswa maupun antara siswa dengan guru. Bahkan ada guru yang dipanggil dengan nama saja, tanpa menyebut Pak/Bapak.

Sejumlah kasus kekerasan pelajar terjadi di SMA GAMA yang sampai ditangani Polsek Umbulharjo antara lain: tahun lalu berawal dari pandang, siswa SMA GAMA mencegat siswa dari sekolah lain, memukulnya dengan helm, dan mencabut kunci sepeda motor. Kasus sampai di Polsek, siswa tersebut dikenai pasal perampasan. Siswa SMA GAMA juga pernah terlibat kasus pengrusakan fasilitas di sekolah lain. Menurut sejumlah

guru, kekerasan seksual juga terjadi di antara sesama siswa sendiri. Namun berdasarkan pelacakan kepada guru dan pelajar perempuan, terjadi juga pelecehan seksual oleh guru laki-laki kepada guru perempuan dan pelajar perempuan.

Kekerasan yang seringkali terjadi, dapat berupa kekerasan fisik yang cenderung mudah terlihat, namun kadang-kadang hadir juga dalam bentuk non-fisik yang bersifat *sublime* sehingga nyaris tidak kentara. Bentuk-bentuk kekerasan yang beranekaragam penting untuk dipahami, karena tidak semua tindakan kekerasan dapat teramat secara langsung. Membincangkan kekerasan seringkali hanya dipahami sebagai kekerasan fisik yang mudah diamati. Kekerasan yang bersifat *sublime* misalnya kekerasan psikis, verbal, dan simbolis. Dampaknya tidak meninggalkan luka fisik pada korban, namun menimbulkan perasaan tidak nyaman secara psikis atau perasaan tertekan. Jenis kekerasan yang bersifat *sublime* inilah yang ditengarai paling banyak terjadi, dan berimplikasi pada terjadinya kekerasan dalam bentuk yang lain. Oleh Bourdieu (Haryatmoko, 2013), kekerasan simbolis adalah kekerasan yang tidak kasat mata. Dalam kekerasan simbolis semacam ini, bagi korbannya seringkali tidak dilihat atau tidak dirasakan sebagai suatu kekerasan, melainkan sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan sebagai sesuatu yang semestinya. Kekerasan di sekolah seringkali dilegitimasi dengan alasan untuk menegakkan disiplin, sebagai *corporal punishment* di kalangan pelajar (Nanang, 2012). Oleh karena itu, kekerasan dapat dikatakan telah menjadi sebuah budaya yang seolah-olah menjadi mekanisme yang dilegalkan. Selain alasan menegakkan disiplin, kekerasan dalam dunia pendidikan juga dapat terjadi karena motif menunjukkan solidaritas, proses pencarian identitas atau jati diri, serta kemungkinan ada gangguan psikologis dalam diri siswa maupun guru.

D. Kekerasan dalam Perspektif Kebijakan: Sebuah Mekanisme Kontrol dan Pendisiplinan

Hal menarik yang tidak dapat dihindari adalah persoalan siswa tidak naik kelas atau siswa pindahan. Ada sejumlah sekolah yang berpotensi siswanya rawan tidak naik kelas, kemudian dipindah ke sekolah lain. Ada sejumlah sekolah yang sering menjadi tempat tujuan memindahkan siswa yang tidak naik kelas. Biasanya siswa pindahan inilah yang berpotensi menjadi pelaku tawuran pelajar. Sesungguhnya dulu pernah ada kebijakan, bahwa siswa yang tidak naik kelas tidak boleh pindah ke sekolah lain di dalam kota yang sama. Namun, sejak tahun 2005, siswa dari sekolah dalam kota bisa pindah ke sekolah lain

dalam kota yang sama. Barangkali hal tersebut terkait dengan adanya kebijakan yang lebih makro, yaitu Wajib Belajar 12 tahun, maka dinas pendidikan tidak boleh membatasi akses pendidikan masyarakat usia sekolah. Lebih-lebih, jika sampai mengimbau memindahkan siswa ke sekolah lain di luar daerah, sama halnya dengan memindahkan kasus kekerasan pelajar ke daerah lain, sehingga malah memperluas area kekerasan itu sendiri. Jadi, sekarang sekolah boleh menerima siswa pindahan dari dalam kota, sepanjang telah memenuhi persyaratan:

- Ada formasi di sekolah yang dituju
- Sekolah yang dituju bersedia menerima
- Ada rekomendasi dari Dinas

Alasan kepindahan sekolah juga dikaji, apakah karena orang tua berpindah kerja, pindah tempat tinggal, atau karena siswanya berkasus di sekolah lama.

Sistem RTO dimaksudkan untuk menciptakan akuntabilitas dalam seleksi PPDB (KR, 3 Desember 2013). Sistem ini diberlakukan antara lain untuk mempermudah siswa dan wali dalam memilih sekolah secara praktis dan cepat, karena tidak harus datang ke lokasi. RTO juga dimaksudkan untuk pemerataan siswa di sekolah negeri. Berdasarkan pengalaman setiap tahunnya, beberapa sekolah negeri masih ada yang kekurangan siswa. Dalam sistem RTO, jika calon siswa dengan nilai tertentu dan masuk ke sekolah tertentu, dan nilainya tidak mencukupi, maka ia akan tergeser secara otomatis ke sekolah dengan *passing grade* di bawahnya (KR, 3 Desember 2013). Beberapa keuntungan dari PPDB RTO bagi dinas dan sekolah antara lain: mengurangi resiko KKN, efisien, memberikan akses luas bagi masyarakat, sinergitas data dinas dengan sekolah, tersedia basis data, meningkatkan reputasi sekolah, dan meningkatkan SDM dalam penguasaan IT.

Sementara itu berdasarkan studi dokumen, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Bp. EHS (KR, 23 Mei 2013) menambahkan bahwa instansinya sudah cukup ketat dalam menindak perkelahian pelajar. Melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41/2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Sekolah, pelajar yang terbukti berkelahi (terlibat tawuran) mendapat poin 100. Padahal jika poin siswa sudah mencapai 100 atau lebih, maka sanksinya dikeluarkan dari sekolah (dikembalikan kepada orang tua). Meskipun banyak siswa yang telah dikeluarkan, ternyata perkelahian pelajar masih juga terjadi. Selain itu, pihak sekolah hanya memiliki wewenang melakukan pembinaan saat jam

pelajaran. Sementara perkelahian justru seringkali terjadi di luar jam pelajaran. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mendukung upaya kepolisian untuk memasukkan pada tindakan kriminal dan memproses secara hukum.

Di lain pihak, Dinas Ketertiban juga mulai rutin menggelar operasi senjata tajam para pelajar. Meski sudah menjaring beberapa orang dan melakukan pembinaan, angka kekerasan belum bisa dibendung. Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Chang Wendryanto mendukung penuh program bersama antara Pemkot dan Polresta Yogyakarta. Instansi-instansi tersebut akan menindaklanjuti dengan merumuskan berbagai opsi program yang bisa dilakukan untuk penanggulangan bersama (KR, 23 Mei 2013).

Berdasarkan studi dokumen, dapat dideskripsikan bahwa Pemerintah Kota dan Polresta Yogyakarta membuat kesepakatan untuk melaksanakan program bersama dalam menanggulangi tindakan perkelahian pelajar. Meskipun masing-masing instansi telah memiliki program rutin, namun ternyata masih belum mampu meredam aksi anarkis pelajar tersebut.

Jika kejadian di luar jam sekolah, mestinya menjadi tanggung jawab orang tua. Sekolah dan Dinas Pendidikan hanya menjangkau aktivitas pelajar pada jam sekolah. Sedangkan jika tindak kenakalan pelajar telah melampaui, bahkan dapat dikategorikan sebagai tindak kriminalitas, mestinya langsung ditangani oleh kepolisian.

Terkait dengan Kebijakan Penyelenggaraan Event Olah Raga, Dinas Pendidikan membuat surat edaran ke sekolah. Surat edaran tersebut berisi: jika sekolah akan menyelenggarakan *event* olah raga, maka harus memberi tahu Dinas Pendidikan. Dengan demikian, dinas pendidikan dapat mengawal mulai proses persiapan hingga pelaksanaannya. Pada setiap *technical meeting*, Dinas Pendidikan terlibat dan menyarankan kepada panitia supaya mempertimbangkan sejumlah aspek, seperti peta peserta dari sekolah mana saja, berapa perkiraan jumlah supporternya, bagaimana penempatan supporter dalam stadion, dan bagaimana konsep pengamanannya. Jika Dinas Pendidikan diberitahu, maka akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Dinas Ketertiban untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Keterlibatan Dan Peran Lembaga Kepolisian terkait dengan tugas utama POLRI yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Keamanan dalam negeri,

khususnya dalam suatu daerah merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan sejahtera. Olehnya itu, Daerah Istimewa Yogyakarta juga sangat membutuhkan peran aktif kepolisian dalam menangani kasus kekerasan pemuda.

Kekerasan pemuda, dalam hal ini tawuran antar pelajar merupakan suatu kejadian yang sudah tidak asing lagi di mata kepolisian. Kejadian seperti ini menjadi musuh bersama di kalangan aparat kepolisian dan masyarakat sekitar. Biasanya Kepolisian bekerjasama dengan pihak sekolah, dinas pendidikan, orangtua/wali murid, serta masyarakat untuk bersama-sama mengontrol, membuat kebijakan agar kekerasan pelajar dapat dikurangi atau kalau bisa dihentikan. Namun ternyata, hal ini masih sulit dihentikan, bukan sekedar hanya membalikkan telapak tangan saja. Karena biasanya tawuran antar pelajar ini masih bisa dikatakan menjadi trend anak-anak muda, khususnya para pelajar dan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka yang terlibat.

Sara kerja polisi DIY menyikapi hal ini dalam mengurangi kekerasan antar pelajar yaitu dengan aktif melakukan patroli di setiap unit kapolsek, biasanya lebih intens di hari Jumat dan Sabtu, karena hari tersebut disinyalir sebagai hari yang rawan konflik antar sekolah. Kemudian, dengan mengadakan sosialisasi bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan pihak sekolah untuk mengundang siswa-siswi yang melakukan tindak kekerasan. Pada kesempatan itu, pihak kepolisian mensosialisasikan tentang bahaya melakukan kekerasan bahkan membawa senjata tajam (Satjam) karena dapat dikenai hukuman dan Pasal-pasal terkait tindak pidana hukum, bahkan bisa di penjara jika siswa yang bersangkutan terbukti bersalah. Alhasil, dari kegiatan sosialisasi tersebut dapat mengurangi siswa-siswi yang terlibat dalam tindak kekerasan antar pelajar. Dengan adanya sosialisasi tersebut siswa-siswi jadi mengerti dan paham dengan akibat yang dilakukan jika mereka terlibat dalam tawuran, membawa satjam, dan tindakan kriminal lainnya.

Seorang pelajar idealnya adalah aset suatu negara dan daerah untuk mendapatkan cikal bakal yang berkualitas, baik dari segi intelektual maupun moral. Namun ironisnya, yang menjadi kegalauan pihak kepolisian yaitu terkadang jika mereka berhasil menangkap pelajar yang terlibat dalam tawuran maupun melakukan tindak kriminal seperti merusak fasilitas sekolah, melukai pelajar lainnya (baik luka ringan, luka berat, bahkan meninggal dunia) adalah hukuman apa yang pantas dijatuhan kepada anak di usia dini yang

sebenarnya masih menjadi tanggungan orangtua. Buktinya, memang sudah ada kasus yang sudah di bawa perkaranya ke pengadilan, jika memang siswa tersebut terlibat dalam perkelahian antar pelajar, membawa senjata tajam, maka Polisi tidak segan-segan akan memasukkan ke dalam penjara.

BAB IV

REPRODUKSI KEKERASAN PELAJAR

Sebagaimana dalam kenyataannya, kekerasan tidak dilakukan oleh semua pelajar, melainkan hanya dilakukan dan diakrabi oleh sebagian pelajar. Pelajar yang dapat ditengarai berpotensi melakukan kekerasan pelajar ini biasanya adalah pelajar yang memiliki riwayat pernah tidak naik kelas, kemudian dipindahkan ke sekolah lain yang justru beresiko. Sekolah beresiko yang dimaksud, biasanya memiliki jumlah siswa yang sangat besar, dan bersedia menerima siswa pindahan dari sekolah lain.

Kekerasan pelajar terjadi antara lain karena adanya persaingan antar sekolah (*school competitiveness*), khususnya persaingan supporter olahraga (basket, sepakbola, futsal) dari masing-masing sekolah, maupun persaingan antar geng sekolah. Dalam kasus yang merupakan kejadian besar, pernah juga melibatkan pelajar Yogyakarta yang berasal dari luar daerah, karena kedapatan menggunakan senjata tradisional berupa paser (panah). Kejadian yang pernah terjadi adalah tawuran pelajar terjadi di sebelah utara Galeria Mall. Pelakunya siswa dari SMA Bopri 2 Yogyakarta, yang merupakan pindahan dari SMA 11 Yogyakarta. Korban berasal dari SMA Gama. Sedangkan kejadian yang belum lama terjadi adalah pelemparan bom molotov ke salah satu SMKN di Kota Yogyakarta. Pelakunya adalah siswa SMP yang sebelumnya nongkrong di sekitar Pakualaman.

A. Pola Reproduksi Kekerasan

Berdasarkan pantauan pihak Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dapat dibuat pemetaan tawuran pelajar berdasarkan wilayah geografis-administratif. Kasus tawuran pelajar di Kota Yogyakarta seringkali terjadi di sejumlah kecamatan berikut ini: Wirobrajan, Umbulharjo, dan Gondokusuman. Berdasarkan lokasi kejadiannya, tawuran pelajar seringkali terjadi di sekitar Stadion Mandhala Kridha. Sedangkan berdasarkan waktunya, tindak tawuran pelajar seringkali dilakukan di luar jam sekolah, khususnya terjadi pada malam hari, bahkan dini hari di akhir pekan (Jumat, Sabtu, Minggu). Malam-malam pada hari-hari tersebut sering dijuluki sebagai “malam jahat” oleh pelajar. Kiranya perlu dipertimbangkan tentang “Jam Malam untuk Pelajar”.

Selain itu, dapat dikembangkan pula pemetaan berdasarkan sekolah. Menurut Bapak WS, kasus kekerasan pelajar paling sering melibatkan pelajar dari SMK Muhammadiyah 7 dan SMA Muhammadiyah 3. Sedangkan pelajar yang jarang, bahkan tidak pernah terlibat dalam kasus kekerasan pelajar adalah mereka yang berasal dari SMAN 1 dan SMAN 3, sehingga untuk kegiatan Jembatan Persahabatan tahun 2009, siswa dari kedua sekolah tersebut tidak dilibatkan. Namun, untuk tahun 2013, semua sekolah diminta mengirimkan peserta mewakili sekolah.

Sebagaimana dalam kenyataannya, kekerasan tidak dilakukan oleh semua pelajar, melainkan hanya dilakukan dan diakrabi oleh sebagian pelajar. Pelajar yang dapat ditengarai berpotensi melakukan kekerasan pelajar ini biasanya adalah pelajar yang memiliki riwayat pernah tidak naik kelas, kemudian dipindahkan ke sekolah lain yang justru beresiko. Sekolah beresiko yang dimaksud, biasanya memiliki jumlah siswa yang sangat besar, dan bersedia menerima siswa pindahan dari sekolah lain.

Siswa yang berpotensi berperilaku menyimpang biasanya karena pengawasan orang tuanya lemah.

“Beberapa kasus yang terjadi, bahwa pelajar merupakan anak kost, yang berada di luar pengawasan orang tua. Apalagi jika ia memiliki saudara yang sudah kuliah (mahasiswa), pelajar akan meniru aktivitas yang dilakukan pada malam hari seperti: keluar malam, nongkrong, ngangkring, merokok, dan lain-lain”. (wawancara tanggal 27 Juli 2013)

Faktor penyebab timbulnya kekerasan pelajar adalah adanya persaingan antar sekolah, khususnya persaingan supporter olahraga (basket, sepakbola, futsal) dari masing-masing sekolah, maupun persaingan antar genk sekolah. Dalam kasus yang merupakan kejadian besar, pernah juga melibatkan pelajar Yogyakarta yang berasal dari luar daerah, karena kedapatan menggunakan senjata tradisional berupa paser (panah). Berdasarkan wawancara bada tanggal 27 Juli 2003, kejadian yang pernah terjadi adalah tawuran pelajar terjadi di sebelah utara Galeria Mall. Pelakunya siswa dari SMA Bopri 2, yang merupakan pindahan dari SMA 11. Korbananya berasal dari SMA Gama. Sedangkan kejadian terakhir adalah pelemparan bom molotov ke salah satu SMKN di Kota Yogyakarta. Pelakunya adalah siswa SMP yang sebelumnya nongkrong di sekitar Pakualaman.

Reproduksi kekerasan pelajar selalu terjadi karena faktor “alumni” yang tidak sukses, yang dulunya sudah dikeluarkan dari sekolah (dengan maksud yang sama, sering

diperhalus menjadi dikembalikan kepada orang tua). Kekerasan pelajar di Yogyakarta juga tidak dapat mengelak dari keterlibatan geng sekolah yang telah dibentuk oleh para “alumni” tersebut. Sekolah di Jogja, baik SMA maupun SMK, pasti punya gang. Nama-nama geng ini dapat dengan mudah ditemukan pada tulisan-tulisan di tembok seantero kota Yogyakarta. Walaupun secara resmi geng telah dibubarkan oleh sekolah (dalam hal ini, sekolah tidak mendirikan, namun membubarkan geng), namun dalam realitasnya, geng pelajar masih ada. “Alumni” yang pernah dikeluarkan dari sekolah selalu berusaha mendekati adik kelas di luar kegiatan belajar mengajar. Keterlibatan dan peran “alumni” besar dalam mempengaruhi siswa yang masih aktif.

Pola reproduksi genk pelajar bersifat turun temurun dari kakak kelas kepada adik kelas, kadang-kadang nama genk disertai dengan angka tahun kelulusan. Namun “alumni” tersebut selalu berusaha menjalin komunikasi untuk merekrut anggota baru, yaitu adik-adik kelasnya. Reproduksi tersebut bertujuan untuk meneruskan apa yang sudah dilakukan pada waktu-waktu sebelumnya dan menuntaskan apa yang belum terbalaskan. Mereka membangun jejaring dengan adik kelas dalam rangka menciptakan *the common enemy* (musuh bersama), walaupun sesungguhnya adik kelas tidak memiliki masalah langsung. Kondisi tersebut bergayung sambut dengan aneka problematika yang sering dihadapi oleh para pelajar yang masih aktif. Ketika mereka menghadapi masalah dengan pelajar dari sekolah lain, mereka tidak segan melakukan kontak sosial dengan genk sekolah dan melibatkan “alumni”. Bergabung ke dalam geng merupakan salah satu strategi mempertahankan diri dan menjaga eksistensi kelompok (pelajar maupun sekolah).

Itulah yang menyebabkan jejaring geng di dalam sekolah sulit untuk dibubarkan. Walaupun secara resmi telah dibubarkan, akan tetapi dalam prakteknya secara terselubung masih ada. Geng di sekolah sangat dipengaruhi oleh alumni. Jejaring dengan geng luar sekolah juga masih ada. Biasanya mereka bertemu dan nongkrong di angkringan atau warung-warung yang tersebar sekitar sekolah. Tempat nongkrong seperti ini dimanfaatkan sebagai arena untuk menyampaikan kisah-kisah lama perseteruan antar geng di masa lalu. Kondisi tersebut semakin memperkuat ingatan-ingatan permusuhan yang hadir sehingga menyejarah.

Kesulitan lain dalam mengatasi kekerasan pelajar antar geng sekolah antara lain: bahwa tidak ada struktur organisasi dalam geng. Mereka bergerak secara latent. Di semua

sekolah hampir pasti selalu dilakukan razia dan sidak senjata tajam secara periodik: di kelas, di tempat parkir, dan di tempat nongkrong. Sesungguhnya sekolah telah melarang keras siswa membawa senjata tajam. Dalam tata tertib sekolah, point larangan membawa senjata tajam juga sangat tinggi. Lemahnya pengawasan orang tua, baik karena keluarga broken home, orang tua bekerja di tempat lain (luar kota atau luar pula), ataupun orang tua tinggal terpisah dengan anak sehingga anak kos, menyebabkan mereka tidak ada yang mengawasi.

Seluk beluk reproduksi kekerasan pelajar yang melibatkan geng sekolah perlu diketahui oleh pihak sekolah. Terutama Dinas Pendidikan juga perlu memetakan kekerasan pelajar yang melibatkan sekolah-sekolah SMA/SMK di Yogyakarta. Tanpa mengurai dan memahami itu semua, kebijakan pada level mezo di era otonomi daerah ini tidak akan efektif.

Tawuran pelajar tidak selalu terjadi dengan sendirinya, melainkan ada kondisi-kondisi yang memicunya, antara lain yang berhasil diidentifikasi oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Kesalahpahaman antar kelompok pelajar sering muncul pasca *event/pertandingan* olah raga seringkali menjadi pemicu terjadinya perkelahian pelajar antar sekolah, khususnya persaingan supporter olahraga (basket, sepakbola, futsal) dari masing-masing sekolah. Selain karena adanya persaingan antar supoter, tawuran pelajar juga disebabkan karena adanya persaingan antar genk sekolah. Sesungguhnya setiap sekolah telah melarang siswanya untuk mengikuti genk, namun kenyataannya tidak demikian. Sejumlah sekolah bahkan mengakui tidak membubarkan gang sekolah, karena dengan membubarkan, berarti mengakui keberadaan geng. Di daerah lain juga marak terjadi, tetapi kasus di Yogyakarta sudah mengkhawatirkan karena cenderung anarkis.

Dalam konteks dinamis masyarakat saat ini, tawuran pelajar juga dapat dipicu dan diperantarai oleh media, misalnya perang antar siswa di dunia maya (*psy war*). Perang melalui *facebook* dan *twitter* seringkali berpotensi memicu permusuhan antar pelajar. Oleh karena itu, masing-masing sekolah harus senantiasa memantau dan melakukan kontrol terhadap *facebook/twitter* yang dimiliki dan diikuti siswa di sekolah masing-masing. Hal ini diakui oleh salah satu pimpinan SMK, bahwa pihaknya melakukan penyusupan ke dalam group FB siswa untuk memantau kegiatan siswa di luar sekolah.

Predikat Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kota pelajar, dan sekaligus sebagai kota pariwisata menimbulkan dilema tersendiri. Seringkali kebijakan pemerintah berseberangan, sehingga berdampak pada kehidupan masyarakat, termasuk para pelajar. Tersedianya fasilitas seperti mall, cafe, resto, dan rumah musik yang dapat dengan mudah diakses oleh pelajar yang notabene masih berusia remaja memiliki implikasi bagi aktivitas dalam kehidupan pelajar. Dalam fase usia yang masih remaja, para pelajar memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dan mencoba pengalaman baru.

Lemahnya pengawasan dan kontrol orang tua juga menyebabkan terjadinya kekerasan:

“Ketika kejadian tawuran pelajar dan vandalism berlangsung pada malam bahkan dini hari, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pengawasan orang tua terhadap anaknya pada jam tersebut?. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka yang terlibat kekerasan pelajar tinggal bersama orang tua, namun dalam kondisi keluarga yang kurang kondusif/harmonis. Kemungkinan lain, mereka yang terlibat adalah anak kost, yang jauh dari pengawasan orang tua. Kemungkinan mereka yang kost juga memiliki teman atau kakak (mahasiswa) yang terbiasa melakukan aktivitas di luar rumah pada malam hari. Hal itu kemudian ditiru”(wawancara tanggal 27 Juli 2013)

Kondisi yang tidak dapat dihindari adalah persoalan siswa tidak naik kelas atau siswa pindah ke sekolah lain. Ada sejumlah sekolah yang berpotensi siswanya rawan tidak naik kelas, kemudian dipindah ke sekolah lain. Ada sejumlah sekolah yang sering menjadi tempat tujuan memindahkan siswa yang tidak naik kelas. Biasanya siswa pindahan yang pernah tidak naik kelas atau siswa berkasus di sekolah lama inilah yang berpotensi menjadi pelaku tawuran pelajar di sekolah yang baru. Sesungguhnya dulu pernah ada kebijakan, bahwa siswa yang tidak naik kelas tidak boleh pindah ke sekolah lain di dalam kota yang sama. Namun, sejak tahun 2005, kebijakan tersebut berubah, dimana siswa dari sekolah dalam kota bisa pindah ke sekolah lain dalam kota yang sama. Hal tersebut terkait dengan adanya kebijakan yang lebih makro, yaitu Wajib Belajar 12 tahun, sehingga Dinas Pendidikan tidak boleh membatasi akses pendidikan masyarakat usia sekolah. Lebih-lebih, jika sampai mengimbau memindahkan siswa ke sekolah lain di luar daerah, sama halnya dengan memindahkan kasus kekerasan pelajar ke daerah lain, sehingga malah memperluas area kekerasan itu sendiri. Jadi, sekarang sekolah boleh menerima siswa pindahan dari dalam kota, sepanjang telah memenuhi persyaratan. Untuk sekolah negeri, karena telah ada sistem RTO (Real Time Online) pada saat PSB (Penerimaan Siswa Baru), maka, nilai UN merupakan salah satu persyaratan. Suatu sekolah tidak akan menerima siswa pindahan

yang nilai UN-nya lebih kurang dari nilai pada grade terendah di sekolah tersebut. Sedangkan di sekolah swasta, ada perbedaan persyaratan:

- Ada formasi di sekolah yang dituju
- Sekolah yang dituju bersedia menerima
- Ada rekomendasi dari Dinas

Alasan kepindahan sekolah juga dikaji, apakah karena orang tua berpindah kerja, pindah tempat tinggal, atau karena siswanya berkasus di sekolah lama. Pada kasus siswa bermasalah pindah ke sekolah lain, sesungguhnya secara tidak langsung terjadi perluasan pengaruh kekerasan.

Reproduksi kekerasan pelajar selalu terjadi karena faktor “alumni” yang tidak sukses, yang dulunya sudah dikeluarkan dari sekolah (dengan maksud yang sama, sering diperhalus menjadi dikembalikan kepada orang tua). Kekerasan pelajar di Yogyakarta juga tidak dapat mengelak dari keterlibatan geng sekolah yang telah dibentuk oleh para “alumni” tersebut. Sekolah di Jogja, baik SMA maupun SMK, selalu memiliki geng. Nama-nama geng ini dapat dengan mudah ditemukan pada tulisan-tulisan di tembok seantero kota Yogyakarta. Walaupun secara resmi geng telah dibubarkan oleh sekolah (dalam hal ini, sekolah tidak mendirikan, namun membubarkan geng), namun dalam realitasnya, geng pelajar masih ada yang selalu tumbuh. “Alumni” yang pernah dikeluarkan dari sekolah selalu berusaha mendekati adik kelas di luar kegiatan belajar mengajar. Keterlibatan dan peran “alumni” besar dalam mempengaruhi siswa yang masih aktif.

Pola reproduksi genk pelajar bersifat turun temurun dari kakak kelas kepada adik kelas, kadang-kadang nama geng disertai dengan angka tahun kelulusan. Namun “alumni” tersebut selalu berusaha menjalin komunikasi untuk merekrut anggota baru, yaitu adik-adik kelasnya. Reproduksi tersebut bertujuan untuk meneruskan apa yang sudah dilakukan pada waktu-waktu sebelumnya dan menuntaskan apa yang belum terbalaskan. Mereka membangun jejaring dengan adik kelas dalam rangka menciptakan *the common enemy* (musuh bersama), walaupun sesungguhnya adik kelas tidak memiliki masalah langsung. Kondisi tersebut bergayung sambut dengan aneka problematika yang sering dihadapi oleh para pelajar yang masih aktif. Ketika mereka menghadapi masalah dengan pelajar dari sekolah lain, mereka tidak segan melakukan kontak sosial dengan genk sekolah dan

melibatkan “alumni”. Bergabung ke dalam geng merupakan salah satu strategi mempertahankan diri dan menjaga eksistensi kelompok (pelajar maupun sekolah).

Itulah yang menyebabkan jejaring geng di dalam sekolah sulit untuk dibubarkan. Walaupun secara resmi telah dibubarkan, akan tetapi dalam praktiknya secara terselubung masih ada. Geng di sekolah sangat dipengaruhi oleh alumni. Jejaring dengan geng luar sekolah juga masih ada. Biasanya mereka bertemu dan nongkrong di angkringan atau warung-warung yang tersebar sekitar sekolah. Tempat nongkrong seperti ini dimanfaatkan sebagai arena untuk menyampaikan kisah-kisah lama perseteruan antar geng di masa lalu. Kondisi tersebut semakin memperkuat ingatan-ingatan permusuhan yang hadir sehingga menyejarah.

Kesulitan lain dalam mengatasi kekerasan pelajar antar geng sekolah antara lain: bahwa tidak ada struktur organisasi dalam geng. Mereka bergerak secara latent. Di semua sekolah hampir pasti selalu dilakukan razia dan sidak senjata tajam secara periodik: di kelas, di tempat parkir, dan di tempat nongkrong. Sesungguhnya sekolah telah melarang keras siswa membawa senjata tajam. Dalam tata tertib sekolah, point larangan membawa senjata tajam juga sangat tinggi. Lemahnya pengawasan orang tua, baik karena keluarga broken home, orang tua bekerja di tempat lain (luar kota atau luar pula), ataupun orang tua tinggal terpisah dengan anak sehingga anak kos, menyebabkan mereka tidak ada yang mengawasi. Predikat Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kota pelajar, dan sekaligus sebagai kota pariwisata menimbulkan dilema tersendiri. Seringkali kebijakan pemerintah berseberangan, sehingga berdampak pada kehidupan masyarakat, termasuk para pelajar. Tersedianya fasilitas seperti mall, cafe, resto, dan rumah musik yang dapat dengan mudah diakses oleh pelajar yang notabene masih berusia remaja memiliki implikasi bagi aktivitas dalam kehidupan pelajar. Dalam fase usia yang masih remaja, para pelajar memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dan mencoba pengalaman baru.

Kondisi yang tidak dapat dihindari adalah persoalan siswa tidak naik kelas di suatu sekolah atau siswa pindah ke sekolah lain. Ada sejumlah sekolah yang berpotensi siswanya rawan tidak naik kelas, kemudian dipindah ke sekolah lain. Ada sejumlah sekolah yang sering menjadi tempat tujuan memindahkan siswa yang tidak naik kelas. Biasanya siswa pindahan yang pernah tidak naik kelas atau siswa berkasus di sekolah lama inilah yang berpotensi menjadi pelaku tawuran pelajar di sekolah yang baru. Sesungguhnya dulu

pernah ada kebijakan, bahwa siswa yang tidak naik kelas tidak boleh pindah ke sekolah lain di dalam kota yang sama. Namun, sejak tahun 2005, kebijakan tersebut berubah, dimana siswa dari sekolah dalam kota bisa pindah ke sekolah lain dalam kota yang sama. Hal tersebut terkait dengan adanya kebijakan yang lebih makro, yaitu Wajib Belajar 12 tahun, sehingga Dinas Pendidikan tidak boleh membatasi akses pendidikan masyarakat usia sekolah. Lebih-lebih, jika sampai mengimbau memindahkan siswa ke sekolah lain di luar daerah, sama halnya dengan memindahkan kasus kekerasan pelajar ke daerah lain, sehingga malah memperluas area kekerasan itu sendiri. Jadi, sekarang sekolah boleh menerima siswa pindahan dari dalam kota, sepanjang telah memenuhi persyaratan.

Untuk sekolah negeri, karena telah ada sistem RTO (Real Time Online) pada saat PSB (Penerimaan Siswa Baru), maka, nilai UN merupakan salah satu persyaratan. Suatu sekolah tidak akan menerima siswa pindahan yang nilai UN-nya lebih kurang dari nilai pada grade terendah di sekolah tersebut. Sedangkan di sekolah swasta, ada perbedaan persyaratan:

- Ada formasi di sekolah yang dituju
- Sekolah yang dituju bersedia menerima
- Ada rekomendasi dari Dinas

Alasan kepindahan sekolah juga dikaji, apakah karena orang tua berpindah kerja, pindah tempat tinggal, atau karena siswanya berkasus di sekolah lama. Pada kasus siswa bermasalah pindah ke sekolah lain, sesungguhnya secara tidak langsung terjadi perluasan pengaruh kekerasan.

Kekerasan pelajar antar sekolah senantiasa terjadi karena aroma permusuhan (*enemy images*) yang terus dibangun dalam jaringan relasi pelajar, khususnya dengan alumni. Ingatan tentang permusuhan senantiasa direproduksi karena setiap tahun para aktor berganti. Proses tersebut terjadi mulai dari MOS/MOPD hingga Prom Nite/Tutup Tahun, diinisiasi oleh siswa senior maupun alumni.

Pada awal tahun ajaran baru, ada tradisi yang selalu dilakukan secara kolektif, yaitu konvoi/nglithih dengan sepeda motor sebagai penegas identitas sekolah dan untuk “taruh tanda” dalam memperkuat batas teritorial antar sekolah. Selanjutnya, intimidasi dilakukan oleh senior kepada junior melalui ruang-ruang kelas (formal) maupun ruang-ruang informal (tempat kos dan warung-warung angkringan di sekitaran sekolah).

Selama ini OSIS merupakan satu-satunya organisasi siswa yang direstui oleh sekolah. Geng pelajar (informal) seringkali juga berupaya mendesakkan aspirasinya kepada organisasi formal di sekolah (OSIS), agar suara mereka terakomodasi. Misalnya dalam pembuatan buku kenangan atau acara tutup tahun, mereka ingin terlibat. Selama ini mereka tidak terwadahi atau tidak mendapat ruang.

Jika sekolah dikatakan sebagai arena reproduksi kekerasan pelajar, barangkali secara tidak langsung . Sebagai penjelasnya, sekolah seringkali gagal dalam mengurai ketegangan-ketegangan yang dialami oleh para pelajar. Arena yang dimaksud bukan semata-mata ruang sekolah secara formal, melainkan juga ruang-ruang informal di sekitar sekolah yang menjadi tempat menghabiskan waktu luang para anggota geng pelajar.

Dalam ruang itulah terjadi kontestasi dimana wacana-wacana tentang kekerasan dibangun, dinegosiasikan, disepakati, dan diperkuat. Nilai-nilai yang dominan itulah yang menang dalam kontestasi/pertarungan antar habitus dan kemudian memberikan warna dalam relasi sosial pelajar. Sebagaimana tergambar dalam wacana tentang tragedi cangkul Papua di SMA Gama.

Korban cangkul Papua adalah alumni SMA Gadjah Mada bernama Fz. Fz adalah pacar Sn, siswi kelas XII. Berita tentang Fz saat luka dan kritis di Rumah Sakit tersebar di sekolah melalui Hp. Wacana kekerasan seolah merupakan hal biasa bagi warga sekolah di SMA Gadjah Mada.

“Bu, ni alumni SMA Gadjah Mada meninggal. Sekolah sepi, tadi banyak anak-anak yang layat”.

Beberapa hari sebelumnya, beredar berita dan foto mengenai alumni yang menjadi korban kekerasan cangkul Papua dan menjadi pembicaraan di sekolah. Mulai guru di kelas (Bu R), satpam (Pak Y), hingga pelajar, semuanya menginformasikan kepada peneliti. Wacana tentang kekerasan seolah menjadi hal lumrah di sekolah tersebut. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa interaksi antara sekolah, siswa, dengan alumni senantiasa terjalin.

Jika dilihat dari penampilannya, pelajar SMA Gama nampak berbeda dengan pelajar pada umumnya, dan terkesan brutal. Namun, di kalangan sesama teman, mereka akur dan akrab semua. Kesamaan latar belakang, pengalaman, dan perasaan senasib membuat solidaritas di antara mereka sangat kuat, apalagi dibingkai oleh nama kebesaran

sekolah. Anak baru yang masuk Gama biasanya diberi tahu bahwa pelajar sering kumpul bersama, kadang-kadang alumni bergabung juga. Sebagaimana kebiasaan remaja pada umumnya, pelajar SMA sering melakukan kegiatan bersama teman-temannya untuk mengisi waktu luang (*leisure time*). Siswa Gama pada malam minggu biasanya nongkrong di depan BI, kawasan Titik Nol Yogyakarta mulai jam 9an sampai dini hari.

Sekolah terkenal memiliki nama kebesaran Holigan, terkesan sekolahnya anak-anak rusuh. Tetapi tergantung anaknya, kalo tidak dipancing sekolah lain. Saat-saat menjelang ujian, biasanya melakukan konvoi muter kota. Konvoi mau UN sama sesudah UN buat semangat, aku juga heran kenapa di luar pada ngece Gadjah Mada jelek. Kita ya nggabung aja pertama masuk ya kenalan ngenalin nama. Disini ngga ada geng-gengan bener bergerombol tapi merek yang kenal aja, kaya aku anak baru kalo ikut kumpul takut salah, tapi triknya merekapun kalo anak baru ikut nimbrung mereka ngga masalah biasa, malah kita dapet pelajaran baru dari anak lama. GMH Gadjah Mada Holigan udah cuma gitu doang, kan setiap sekolah sekarang munafik dong kalo ngga punya nama kebesaran.

Sebagaimana telah dibahas oleh Clive Harber (2005) bahwa sekolah memiliki variasi kondisi sosio kultural. Sekolah bisa menjadi tempat yang membahayakan pelajar karena mereka dapat mereproduksi kekerasan sosial di lingkungan sekolah mereka. Sekolah juga merupakan ruang bagi individu karena mengembangkan sikap sosial warga sekolah secara partisipatif. Sekolah juga sebagai lokus tempat berlangsungnya reproduksi kesenjangan sosial yang ada dan seringkali juga menjadi lokus yang membahayakan. Dalam pengertian negative tersebut, argumen Harber memperoleh penjelasan bahwa sekolah umumnya mempromosikan respon negatif kepada siswa. Hal ini meliputi serangan agresif pada lingkungan sekolah, pengucilan, perlawanhan pasif, pembolosan, *drop-out*, dan fobia sekolah.

Dalam mencari akar kekerasan di sekolah, ada baiknya merujuk pada Harber ketika melihat struktur sistem persekolahan (*schooling*). Dia menjelaskan bahwa secara umum kebanyakan sekolah lebih mencerminkan model otoriter daripada model demokrasi. Di lingkungan sekolah lebih sering dipromosikan tentang pendidikan untuk melaksanakan kontrol sosial (*social control*) daripada pendidikan untuk membangun kesadaran kritis para pelajar. Pendidikan untuk kontrol sosial bertahan lama karena salah satu tujuan sekolah adalah menciptakan kedisiplinan siswa. Otoriterisme di sekolah seolah mengabaikan

tentang pengembangan nilai-nilai dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dengan semikian, tidak dengan sendirinya sekolah secara otomatis menguntungkan individu (siswa) maupun masyarakat.

Nilai-nilai yang diutamakan di sekolah cenderung memberikan penekanan pada keserakahan, persaingan, individualisme, konsumsi, marketisasi serta kepatuhan yang memungkinkan terjadinya kekerasan, baik oleh guru, maupun di kalangan siswa. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu direfleksikan kembali tentang peran sekolah. Sistem persekolahan perlu menyediakan ruang yang aman bagi para siswa untuk berinteraksi di sekolah. Sekolah perlu melakukan identifikasi problema-problem yang mungkin terjadi untuk mencegah dan mengurangi kekerasan di sekolah. Dalam sebuah tulisannya, Dimitriadis & Cameron (1999) juga mengemukakan bahwa para kritikus telah mencoba menyampaikan pesan korektif kepada sekolah karena dalam kenyataannya sekolah telah menjadi situs bagi terjadinya kekerasan fisik maupun simbolik. Bahkan di sekolah juga, para pelajar mendapati pengalaman kekerasan dalam berbagai cara, di dalam maupun di luar kelas, melalui sistem persekolahan dan kurikulum.

BAB V

KESIMPULAN

Praktik kekerasan pelajar SMA merupakan amatan panjang yang memiliki keterkaitan dengan habitus pelajar pada jenjang sekolah sebelumnya (SMP), sekolah lama (jika pelajar pindahan), dan habitus yang dibawa dari lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan di luar sekolah. Praktik kekerasan pelajar yang hadir dalam arena persekolahan dengan demikian merupakan representasi kontestasi kekerasan yang terjadi pada lingkungan lain. Dengan kata lain, kekerasan yang hadir dalam praktik sosial kehidupan masyarakat menjalar hingga ke dalam praktik pendidikan di sekolah. Hal tersebut merupakan realitas yang tak terelakkan terjadi di sekolah, sehingga sekolah tak ayal menjadi arena reproduksi kekerasan.

Praktik kekerasan pelajar hadir dalam arena persekolahan juga merupakan ekspresi kepemilikan modal kultural berupa nilai-nilai kekerasan yang dihayati dan terinternalisasi dalam diri pelajar. Modal tersebut terekspresikan dalam penampilan dan keberanian dalam diri pelajar. Dalam konteks ini, pelajar sesungguhnya tidak hanya sedang berelasi dengan pihak sekolah, dan dengan orang tua mereka, melainkan juga berhadapan dan bernegosiasi dengan sesamanya, yaitu sesama pelajar. Jika sekolah dikatakan sebagai arena reproduksi kekerasan, itu karena sekolah gagal mengurai ketegangan-ketegangan yang dialami oleh pelajar. Oleh karena itu, kekerasan pelajar perlu dilihat tidak saja dari perspektif orang dewasa (*adult perspective*), melainkan juga perlu diselami dari perspektif pelajar itu sendiri (*their own perspective*). Dengan demikian, upaya solutif untuk mengurai persoalan dan memutus rantai kekerasan pelajar dapat lebih mengena dan menyentuh pada inti persoalannya. Selanjutnya, sekolah perlu direkonstruksi menjadi arena yang kondusif bagi penyemaian nilai-nilai anti kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Assegaf. 2004. *Pendidikan Tanpa Kekerasan: Tipologi Kondisi, Kasus, dan Konsep*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Abdul Munir Mulkan. 2002. *Membongkar Praktik Kekerasan: Menggagas Kultur Nir-Kekerasan*. Malang: Pusat Studi Islam dan Filsafat UMM & Sinergi Press.
- Astor, Ron Avi, et. all. 2010. *How We Can Improve School Safety Research ?*. [Educational Researcher Journal](http://edr.sagepub.com/content/39/1/169). <http://edr.sagepub.com/content/39/1/169>.
- Benbenishty, Rami & Astor, Ron Avi. 2005. *School Violence in Context: Culture, Neighborhood, Family, School, and Gender*. Oxford: Oxford University.
- Bourdieu, Pierre. 1998. *Practical Reason*. Standford, Calif: Stanford University Press.
- 1993. *The Field of Cultural Production: Essays on Art and Leisure*. New York: Columbia University Press.
- 1990. *The Logic of Practice*. Standford, Calif: Standford University Press.
- 1990. *Reproduction in Education, Society and Culture*. London: Sage.
- 1973. *Cultural Reproduction and Social Reproduction*. British Sociological Association: Tavistok.
- Breakwell, Glynis M. 1998. "Coping with Aggresive Behaviour". Yogyakarta: Kanisius.
- Brown, Richard. 1973. *Knowledge, Education, and Cultural Change: Papers in the Sociology of Education*. British Sociological Association: Tavistok.
- Burhan Bungin. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Camara, Dom Helder. 2000. *Spiral Kekerasan*. Yogyakarta: Insist Press.
- Chapin, John & Gleason, David. 2004. *Student Perceptions of School Violence: Could it Happen?*. [Journal of Adolescent Research](#), Vol. 19, No. 3, May.
- Clarke, Simon. 2008. *Culture and Identity. The SAGE Handbook of Cultural Analysis*. Sage Publication.

- Cresswell, John W. 1994. *Research Design: Quantitative and Qualitative Approaches*. London: Sage Publications.
- Cresswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dimitriadi, Greg & Cameron, Mc Carthy. 1999. *Violence in the Theory and Practice: Popular Culture, Schooling, and the Boundaries of Pedagogy*. Journal of Educational Theory, Vol. 49, No. 1.
- Estévez, Estefanía; Jiménez, Teresa I.; and Musitu, Gonzalo. 2008. *School Psychology Violence and Victimization at School in Adolescence*. ISBN 978-1-60456-521-8 Editor: David H. Molina. Nova Science Publishers, Inc. pp. 79-115.
- Hairus Salam, dkk. 2011. *Politik Ruang Publik Sekolah: Negosiasi dan Resistensi di SMUN di Yogyakarta*. Yogyakarta: CRCS.
- Harber, Clive (2005). *Schooling as Violence: How Schools Harm Pupils and Societies*. Journal of Research in International Education. Vol. 5.
- H.A.R. Tilaar. 2003. *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan Kritis dari Perspektif Studi Kultural*. Magelang: Indonesiatera.
- Hatib Abdul Kadir. 2011. *Gangster-gangster Berseragam: Kekerasan Siswa Pasca Orde Baru di Yogyakarta*. Dalam M. Najib, dkk. Pemuda Pasca Orba: Potret Kontemporer Pemuda Indonesia. Yogyakarta: YouSure FISIPOL UGM.
- Heitmeyer, Wilhelm & Hagen, John. 2005. *International Handbook of Violence Research*. London: Springer Science & Business Media Inc.
- Hirkonen, Ulla. 2007. *The Bronfenbrenner Ecological Systems Theory of Human Development*. Published in Scientific Articles of V International Conference Person Color Nature Music. Oct 17-21, Dougavpils University, Saule, Latvia.
- Hyman, Irwin A. & Perone, Donna C. 1998. *Introduction to The Special Theme Section on School Violence: The Ecology of School Violence*. Journal of School Psychology, Vol. 36, No. 1, pp 3-5.
- Ignas Kleden. 1987. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3ES.
- Irwan Abdullah. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Isac, Susamma. 2011. *Education and Socio-Cultural Reproduction: Development of Tribal People in Wayanad Kerala*. Rajagiri Journal of Social Development, Volumne 3, Numbers 1&2, December.

- Jamil Salmi. 2005. *Violence and Democratic Society: Hooliganisme dan Masyarakat Demokrasi*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Jones, PIP. 2010. *Pengantar Teori-teori Sosial: dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Obor.
- Kabeer, Naila. 2005. *Inclusive Citizenship: Meanings and Expressions*. London: Zed Books.
- Kingori, Paul M. Et. all. 1998. *Violence at School: Recent Evidence from Four national Surveys*. Journal of Psychology in The Schools. Vol. 35, No. 3.
- Lambang Triyono. 2014. *Independensi Lembaga Pemilu*. Rubrik Analisis, KR, 17 April.
- Leone, Peter E, et.al. 2000. *School Violence and Disruption: Rhetoric, Reality, and Reasonable Balance*. Journal of Focus on Exceptional Children, Sept; 33; 1; ProQuest.
- Nanang Martono. 2012. *Kekerasan Simbolik di Sekolah: Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*. Jakarta: Rajawali Press.
- Neuman. W. Lawrence. 2000. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn and Bacon.
- Nilan, Pam. 2010. *The Gang, Violence, and the Life Course for Indonesian Male Youth*. Paper for XVII World Congress of Sociology (ISA-RC34), Gothenburg, Sweden, 11-17 July.
- Nilan, Pam; Argyo Damartoto; Agung Wibowo. 2011. *Young Men and Peer Fighting in Solo, Indonesia*.
- Noeng Muhamadjir. 2011. *Metodologi Penelitian: Paradigma Positivisme Objektif, Phenomenologi Interpretif, Logika Bahasa Platonis, Chomskyist, Hegelian & Hermeneutik, Paradigma Studi Islam, Matematik Recursion, Set-Theory & Structural Equation Modeling dan Mixed*. Yogyakarta: Rake Sarasir.
- Paglicci, Lisa A Rapp et.all. 2002. *Handbook of Violence*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Phaerly Maviee Musadi Ratulangi. 2010. *Kekerasan adalah Gaya*. Dalam Jurnal Maarif, Vol. 5, No. 2 Desember.
- Rakhmat Hidayat. *Kurikulum sebagai Arena Kontestasi Kekuasaan: Konseptualisasi Gagasan Michael Apple hingga Pierre Bourdieu*. Jurnal Komunitas.

- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi: dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 2010. *Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Sari Monik Agustin, dalam diskusi hasil penelitian “*Budaya Kekerasan di SMA*” di Universitas Al-Azhar Indonesia, Kebayoran Baru, Jaksel, Kamis 25 Sept 2014 dalam detik.com).
- Sidik Jatmika. 2010. *Geng Remaja: Anak Haram Sejarah ataukah Korban Globalisasi?*. Yogyakarta: Kanisius.
- Smith, Jonathan A. 2009. *Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method, and Research*. London: Sage Publications
- Smyth, John, et all. 2014. *The Socially Just School: Making Space for Youth to Speak Back*. Victoria: Springer.
- Subando Agus Margono. 2012. *Mengenal Konsep Space, Memahami Negosiasi Pemuda*. Jurnal Studi Pemuda, Volume 1, Nomor 2, September.
- Sumjati As (ed). 2001. *Manusia dan Dinamika Budaya, dari Kekerasan sampai Baratayuda*. Yogyakarta : BIGRAF Publishing.
- Thomason, C. Burke. 1982. *Making Sense of Reification*. New Jersey: Humanity Press.
- Thomas Santoso. 2002. *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Triyono Lukmantoro. 2007. *Geng: Distorsi Komunikasi*. Dalam Harian Suara Merdeka 22 November.
- Understanding School Violence*. 2010. www.cdc.gov/violenceprevention
- White, Ben. 2013. *Notes for the Workshop on “Buku Panduan Kajian Kepemudaan”*. Materi Workshop.
- White, Rob & Wyn, Johanna. 1998. *Youth Agency and Social Context*. Journal of Sociology, Vol. 34, No. 3, November.
- <http://www.polity.co.uk/browne/downloads>.